

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BADAN POM



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan yang terbaru Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Dengan penuh kebanggaan dan antusiasme, kami mempersembahkan Laporan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran pada DIPA tahun 2023. Misi kami adalah untuk mendukung Visi Badan POM RI mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan merampungkan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik yang terhimpun dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran kegiatan.

Balai Besar POM di Banda Aceh telah merealisasikan 99,59% anggaran DIPA untuk mengelola 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan dan telah berhasil mencapai Sasaran Kegiatan dengan predikat Istimewa. Namun begitu, Sasaran Kegiatan 11 masih perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja menjadi catatan kinerja yang perlu dibenahi dan akan menjadi rekomendasi perbaikan berkesinambungan khususnya dalam pencapaian kinerja di tahun 2024. Beberapa pencapaian yang membanggakan telah berhasil ditorehkan Balai Besar POM di Banda Aceh di tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Predikat terbaik ke-1 **Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester I Tahun 2023.**
2. Meraih **Predikat WBK** dari Kemen PAN dan RB pada Bulan Desember Tahun 2023.
3. Nilai AKIP 2023 adalah 79,48 predikat BB. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 79,16.
4. Predikat terbaik ke-2 **Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester II Tahun 2023.**

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Utama Badan POM yang telah melakukan bimbingan dan asesmen secara berkelanjutan dengan rekomendasi yang semuanya telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh dan semua pihak yang telah berkontribusi mengelola 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang dicapai dengan predikat Istimewa. Informasi Pencapaian Kinerja telah disajikan dengan lengkap dalam laporan ini dan dapat diandalkan untuk evaluasi bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Anggaran di tahun 2023 tidak menyisakan ketidaksesuaian yang perlu dilaporkan. Kami berharap untuk dapat terus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah lingkup kerja Balai Besar POM di Banda Aceh dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai Sasaran Kegiatan organisasi yang memenuhi ekspektasi Rencana Strategis Badan POM.

Saya, selaku Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan bangga mempersembahkan pencapaian di tahun 2023 dalam laporan ini dan berkomitmen untuk selalu memastikan bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi misinya di tahun 2024 dan selanjutnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2024
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Balai Besar POM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2023. Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan pada tiga level perspektif sesuai Renstra 2020-2024 dengan capaian **Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) 106,51 berpredikat Istimewa.**

Stakeholders Perspective NP 104,68

Sasaran Kegiatan 1, 2 dan 3 telah berhasil dicapai dengan capaian berikut:

1. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dengan NSS sebesar 108,03;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dengan NSS sebesar 101,99;
3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 104,03;

Internal Process Perspective NPS 109,30

Terdapat empat Sasaran Kegiatan berhasil dicapai dengan sangat baik dan melampaui target.

4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik dengan NPS sebesar 109,34;
5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 100,57;
6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 120;
7. Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 107,29.

Learning and Growth Perspective NPS 105,11

Sasaran Kegiatan 8, 9, dan 10 telah dicapai sangat baik dan melampaui target, namun capaian Sasaran Kegiatan 11 masih di bawah target.

8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal dengan NPS sebesar 103,46;
9. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkinerja optimal dengan NPS sebesar 108,59;
10. Menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 110,83;
11. Mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS sebesar 97,54.

Bila mengacu pada capaian di tahun sebelumnya, Pencapaian Sasaran Kegiatan di Tahun 2023 meningkat signifikan dengan hanya menyisakan satu Sasaran Kegiatan saja yang belum mencapai target didasarkan pada 29 (dua puluh sembilan) IKU yang pada tahun 2023 dimana 24 (dua puluh empat) IKU telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dan melampaui target, 3 (tiga) IKU berkategori cukup dan 3 (tiga) IKU tidak dapat disimpulkan.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi berhasil dipertahankan melampaui target dengan capaian 106,19 dan sejalan dengan keberhasilan Balai Besar POM di Banda Aceh meraih predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB di tahun 2023.

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) belum mencapai target di tahun 2023 sehingga capaian kinerja Sasaran 11 Mengelola keuangan secara akuntabel hanya 97,54 dan belum berhasil mencapai target. Rendahnya capaian output dibandingkan realisasi anggaran di tahun 2023 menyebabkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran rendah sehingga penilaian NKA tidak maksimal. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah inefisien, karena capaian sasaran (97.54%) yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran (99.62%) yang dikeluarkan.

Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran diatas 99 % dapat mendongkrak nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran. Oleh karena itu, tahun 2024 dilakukan review target untuk nilai NKA yang disesuaikan dari realisasi pada triwulan III tahun 2023 yaitu 89.87.

Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (105,39).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (110,77).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (104,72).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (172,48).
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (99,26).
6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh (101,99).
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (102,93).
8. Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (103,99).
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (105,16).
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (100).
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (111,73).
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (120).
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (110,18).
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (104,17).
15. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh (99,32).
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (126,58).
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (102,26).
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (100).
19. Jumlah desa pangan aman (100).
20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (100).
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (120).
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (120)

23. Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (107,29).
24. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh (106,19).
25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh (100,74).
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh (108,59).
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (101,67).
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal (120).
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh (97.54).

Balai Besar POM di Banda Aceh telah merealisasikan 99,51% anggaran DIPA untuk mengelola 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan dan telah berhasil mencapai Sasaran Kegiatan dengan predikat Istimewa. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2023 sebesar 89,83% sedikit di bawah target 92,1% sehingga Capaian NKA hanya 97,54. Kriteria NKA belum mencapai target dikarenakan adanya beberapa indikator pada IKPA yang belum terpenuhi dan harus dilakukan usaha yang maksimal untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

Secara umum, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 106,51 dengan serapan anggaran DIPA 99,51% menunjukkan bahwa Kinerja Organisasi dicapai dengan Efisien. Sepuluh Sasaran memiliki tingkat efisiensi berkisar antara 0,01 hingga 0,11, namun berbeda halnya dengan Sasaran 11 Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara akuntabel yang memiliki tingkat efisien dengan nilai -0,02.

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.

Triwulan I



Triwulan II



DEMI WUJUDKAN SDM UNGGUL
BPOM ACEH LAKUKAN SOSIALISASI
PERATURAN BPOM NO 6 TAHUN 2022
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN



BPOM ACEH KEMBALI LAKUKAN
INTESIFIKASI PENGAWASAN PANGAN
JAJANAN RAMADHAN 2023/1444 H
DI KOTA MEULABOH DAN BLANG
PIDIE



BIMBINGAN TEKNIS KADER
KEAMANAN PANGAN DESA (PRO PN
DESA PANGAN AMAN) 2023



SIGAP BENTUK SAKA POM, BPOM
ACEH LAKSANAKAN KURSUS
PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT
DASAR (KMD)



Kegiatan Musabaqah Tunas Ramadhan
XXII Pramuka Se-Aceh



RATUSAN PNS BPOM DILANTIK DAN
DIAMBIL SUMPAH PNS DAN SUMPAH
JABATANNYA.



BPOM ACEH MUSNAHKAN RATUSAN
PRODUK OBAT TRADISIONAL DAN
KOSMETIK ILEGAL.



BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN
PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN
PANGAN SEKOLAH (PRO PN PJAS)



TINGKATKAN KEIMANAN, BPOM
ACEH KEMBALI LAKUKAN KAJIAN
ISLAM SELAMA RAMADHAN



PENGUKUHAN MABI DAN PIN SAKA
RINTISAN TINGKAT DAERAH SATUAN
KARYA PRAMUKA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN



AUDIT INTERNAL SISTEM
MANAJEMEN MUTU BALAI BESAR
POM DI BANDA ACEH



Tingkatkan Kolaborasi dalam
Pengawasan Obat dan Makanan,
BPOM Aceh Lakukan Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama dengan BPS
Provinsi Aceh

Triwulan III



Peningkatan UMK Aceh Melalui Pendampingan Sertifikasi dan Izin Edar



REKRUTMEN DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SAKA POM DI KAB. PIDIE JAYA



TINGKATKAN KEPEDULIAN DAN PENGETAHUAN KOMUNITAS PASAR, B POM ACEH LAKUKAN KAMPANYE PASAR DI KABUPATEN ACEH BESAR



B POM ACEH TERUS LAKUKAN SOSIALISASI SAKA POM KE KWARACAB BANDA ACEH DAN ACEH BESAR



PERINGATI HARI LINGKUNGAN SEDUNIA, B POM ACEH TANAM 200 TANAMAN OBAT



SIAP BENTUK PAMONG RINTISAN SAKA POM, B POM ACEH TUNTASKAN KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR (KMD)



TINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN KOMUNITAS, B POM ACEH LAKUKAN BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI DESA LUBUK SUKON



B POM ACEH GELAR RANGKAIAN KEGIATAN DAN PERLOMBAAN, SAMBUT HUT KE 78 KEMERDEKAAN RI



B POM ACEH TANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN ANTI PENYUAPAN TAHUN 2023



WUJUDKAN KEAMANAN PANGAN PASAR SECARA MANDIRI B POM ACEH LAKUKAN MONEV PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS TAHAP 1



FASILITASI UMKM, B POM ACEH BERSAMA DINKES LAKUKAN BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN ACEH JAYA

Triwulan IV



PERSAMI PERDANA SAKA POM ACEH KWARCAB BIREUEN



PERJANJIAN KERJASAMA DEMI DUKUNGAN UMOT LEBIH BAIK



BPM ACEH KEMBALI LAKUKAN MONITORING PEMBERDAYAAN KADER. DEMI PASTIKAN KEAMANAN PANGAN SEKOLAH DI KABUPATEN ACEH BESAR



REKRUTMEN DAN PEMBELAJARAN SAKA POM KWARCAB ACEH BARAT



SERTIFIKASI PJAS AMAN DIKOTA LANGSA



BPM ACEH RAIH APRESIASI WBK



REKRUTMEN DAN PEMBELAJARAN SAKA POM KWARCAB PIDIE



BPM ACEH GELAR PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1445H/2023



DUKUNG ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, BPM ACEH INISIATIF TANAM MANGROVE



PIAGAM PENGHARGAAN HUT BPM TAHUN 2024
 Balai Besar POM di Banda Aceh
 KATEGORI
THE MOST ENGAGING INSTAGRAM ACCOUNT (UNIT PELAKSANA TEKNIS)



TINGKATKAN DAYA SAING UMKM, BPM ACEH LAKUKAN TALKSHOW BERSAMA PELAKU USAHA



BPM HADIR SUKSEKAN PKA-8 2023



DINKES ACEH BESAR GANDENG BPM ACEH LAKUKAN BIMTEK PKP



BADAN POM IKUTI MALAM PEMULIA JAMEE MUNAS XI GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2023



UPACARA PERINGATAN HARI PRAMUKA KE 62 DI ACEH



PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN UNMUHA DAN SOSIALISASI RESISTENSI ANTIMIKROBA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
HIGHLIGHT KINERJA.....	viii
BAB I 18	
PENDAHULUAN.....	18
1.1. Latar Belakang.....	18
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	19
1.3. Struktur Organisasi	21
1.4. Analisis Lingkungan Strategis Internal	27
BAB II 34	
PERENCANAAN KINERJA	34
2.1. Rencana Strategis.....	34
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	39
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	42
BAB III 48	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	48
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	264
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	266
3.3.1 Pemanfaatan Informasi Kinerja Periodik.....	266
3.3.2 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahunan	266
3.4 Realisasi Anggaran	267

BAB IV 275

PENUTUP 275

4.1 Kesimpulan.....275

4.2 Saran276



DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi	32
Table 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh.....	37
Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023	39
Table 4. Kategori Pencapaian Strategis	45
Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan	49
Table 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	53
Table 7. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024...	54
Table 8. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	57
Table 9. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).....	58
Table 10. Target dan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat.....	59
Table 11. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA 2020-2024.	60
Table 12. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	62
Table 13. Matriks Tindak Lanjut.....	63
Table 14. Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.....	65
Table 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024.	66
Table 16. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	68
Table 17. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	69
Table 18. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023.....	70
Table 19. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024.	71
Table 20. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	73
Table 21. Matriks Tindak lanjut	74

Table 22.Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat.....	75
Table 23.Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap Renstra	76
Table 24.Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	78
Table 25. Matriks Tindak lanjut	79
Table 26.Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2023	80
Table 27.Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 dengan target renstra 2024.....	82
Table 28.Indeks Kesadaran Masyarakat	84
Table 29.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023	85
Table 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023.....	86
Table 31. Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88
Table 32.Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024.....	91
Table 33.Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan....	93
Table 34.Hasil Survei Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) Tahun 2023.....	95
Table 35.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan....	96
Table 36.Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023.....	97
Table 37.Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2024	99

Table 38.Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.....	100
Table 39.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023	102
Table 40.Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 203.....	103
Table 41.Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan target renstra 2024.....	105
Table 42.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.....	109
Table 43.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023	110
Table 44.Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023.....	113
Table 45.Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan tahun 2024.....	115
Table 46.Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	117
Table 47.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	118
Table 48.Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	119
Table 49.Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	121
Table 50.Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	123
Table 51.Tindak lanjut rekomendasi.....	125
Table 52.Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	126

Table 53.Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan target renstra 2024	128
Table 54.Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	131
Table 55.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	133
Table 56.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ...	135
Table 57.Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target Renstra 2024	137
Table 58.Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	139
Table 59.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	140
Table 60.Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ..	141
Table 61.Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target renstra 2024.....	143
Table 62.Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	146
Table 63.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	147
Table 64.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	148
Table 65.Perbandingan Realisasi Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target renstra 2024	151
Table 66.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	154
Table 67.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2023.....	156
Table 68.Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	158

Table 69.Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target renstra 2024	160
Table 70.Efisiensi anggaran pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	163
Table 71.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	164
Table 72.Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	166
Table 73.Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE	167
Table 74.Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	168
Table 75.Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE.....	170
Table 76.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023	171
Table 77.Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.	173
Table 78.Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah	173
Table 79.Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Acehtahun 2023 dengan target renstra 2024	175
Table 80.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ...	180
Table 81.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2023	182
Table 82.Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	182
Table 83.Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman.....	184

Table 84.Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target renstra 2024	184
Table 85.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	188
Table 86.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2023.....	189
Table 87.Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	190
Table 88.Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman.....	191
Table 89.Target dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan	192
Table 90.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	195
Table 91.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	196
Table 92.Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	197
Table 93.Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	201
Table 94.Matriks Tindak lanjut.	202
Table 95.Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	203
Table 96.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA 2020-2024.....	205
Table 97.Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	206
<i>Table 98. Matriks dan Tindak Lanjut</i>	<i>208</i>
Table 99.Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023.....	209
Table 100.Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Target Renstra 2024.....	211

Table 101.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya	217
Table 102.Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya	217
Table 103.Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	219
Table 104.Komponen Penilaian RB.....	220
Table 105.Realisasi Indeks RB BALAI BESAR POM di Banda Aceh tahun 2023.....	221
Table 106.Efisiensi anggaran pada Indikator Indeks RB BALAI BESAR POM di Banda Aceh.....	224
Table 107.Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM	227
Table 108.Kategori Penilaian SAKIP	228
Table 109.Bobot Penilaian SAKIP	228
Table 110.Hasil Evaluasi SAKIP.....	229
Table 111.Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2022	229
Table 112.Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target Renstra 2024	230
Table 113.Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP	232
Table 114. Matriks dan tindak lanjut	233
Table 115.Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh.....	235
Table 116.Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target Renstra 2024.....	237
Table 117.Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP	239
Table 118. Matriks dan Tindak Lanjut.....	240
Table 119.Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP	241
Table 120.Tabel Parameter Penilaian GLP.....	242
Table 121.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024.....	243

Table 122.Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	246
Table 123.Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	248
Table 124.Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target Renstra 2021-2024	249
Table 125.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal.....	251
Table 126. Matriks dan Tindak Lanjut.....	252
Table 127.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	253
Table 128.Realisasi NKA Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023.....	255
Table 129.Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran	258
Table 130.Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).....	259
Table 131.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	264
Table 132.Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan.....	267

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh.....	21
Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh	27
Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	28
Gambar 4. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh.....	29
Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	30
Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh	35
Gambar 7. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.....	36
Gambar 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya	54
Gambar 9. Perbandingan realisasi kinerja BALAI BESAR POM di B. Aceh tahun 2023 dengan Balai lain yang setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.....	55
Gambar 10. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya	60
Gambar 11. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.....	61
Gambar 12. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.	66
Gambar 13. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional	67
Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .	71
Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional	72
Gambar 16. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	76
Gambar 17. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target BPOM.....	77

Gambar 18 Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2023	82
Gambar 19 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 dengan Balai setara dan Capaian Nasional	83
Gambar 20. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 sampai tahun 2023	91
Gambar 21. Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional.....	92
Gambar 22 Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2023	98
Gambar 23 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai setara dan Capaian Nasional	99
Gambar 24 Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2023	105
Gambar 25 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan Balai setara dan Capaian Nasional.....	106
Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2023	115
Gambar 27. Perbandingan realisasi persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan balai lain yang sejenis dengan target nasional.....	116
Gambar 28. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.....	121
Gambar 29. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan balai setara dan target Nasional	122

Gambar 30. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 hingga 2023 .	128
Gambar 31. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional.....	129
Gambar 32. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2023.....	136
Gambar 33. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan balai setara dan target nasional.....	137
Gambar 34. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga 2023	142
Gambar 35. Perbandingan realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional	144
Gambar 36 Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 hingga tahun 2023	150
Gambar 37 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional	152
Gambar 38. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.	160
Gambar 39. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik dan target nasional dengan realisasi kinerja Balai Lain.	161
Gambar 40 Perbandingan Realisasi dan capaian Tingkat efektifitas KIE tahun 2020 hingga tahun 2023	167
Gambar 41 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional	169

Gambar 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	175
Gambar 43 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional	176
Gambar 44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	184
Gambar 45 Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.....	185
Gambar 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas Tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	192
Gambar 47 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional	193
Gambar 48. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	199
Gambar 49. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	205
Gambar 50. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional	205
Gambar 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2023 .	211
Gambar 52. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Setara dan Target Nasional.....	212
Gambar 53 Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	220
Gambar 54. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain	221

Gambar 55 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya	229
Gambar 56 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain	231
Gambar 57 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya	236
Gambar 58 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai	237
Gambar 59. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2023 terhadap kinerja tahun sebelumnya	242
Gambar 60. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional	244
<i>Gambar 61. Realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.</i>	<i>249</i>
<i>Gambar 62. realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.</i>	<i>250</i>
Gambar 63 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya	254
Gambar 64 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.....	255

**PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Nomor: HK.02.02.1A.1A5.01.23.06

Tanggal 06 Januari 2023

Ketua : Marina Kaptriyani, ST, MT

Sekretaris : Eko Aprianto, S.Si, Apt

Anggota : Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm, Apt.
Nani Yusraini, S.Si.
Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt
Novalina BR Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci
Fita Sarafina, SE
Ike Ramadhanty Daniel, S.Si
Zuwinda Safitri, S.E
Endah Kartika, SE
Fahrizal Arbiansyah, A.Md



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Pengendalian terhadap aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh adalah:

- a. Pemantauan dan Pengawasan: Pemantauan dan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Aceh dengan luas wilayah dan jangkauan yang jauh bisa menjadi tugas yang rumit bila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari lintas sektor terkait di Kab/Kota.
- b. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara *online*: Maraknya peredaran Obat dan Makanan yang diperjual belikan secara *online* melalui media sosial dan banyak diminati oleh golongan muda, menjadi tantangan serius yang memerlukan

- konsistensi dalam pengawasannya melalui peningkatan *siber patrol* dan informasi dari masyarakat.
- c. Kepatuhan pelaku usaha: Memastikan produk yang dihasilkan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku guna melindungi masyarakat dari produk obat, dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh ini, sangat dibutuhkan adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal Obat dan Makanan aman di Provinsi Aceh.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax. (0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

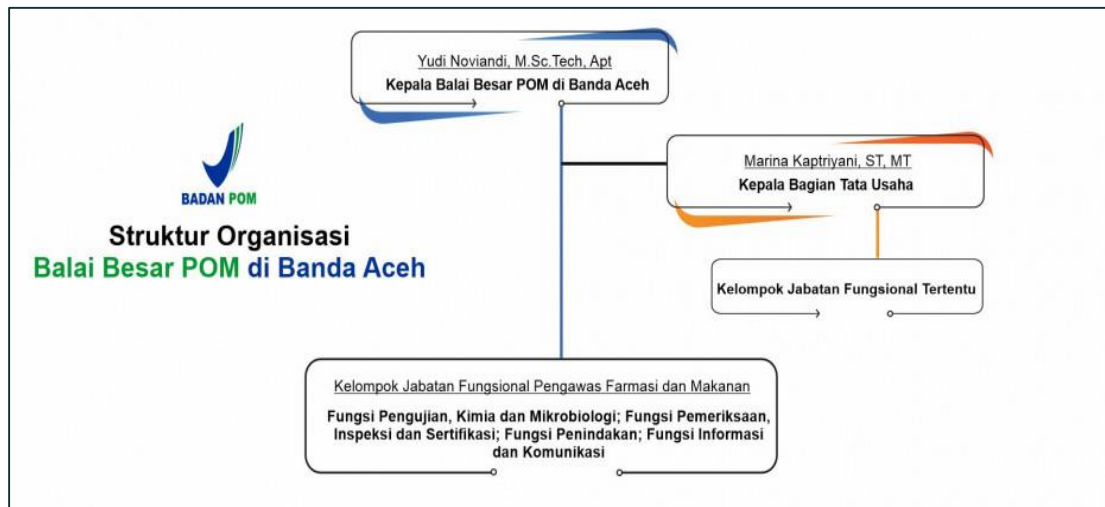
UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
- f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 17 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Banda Aceh yang mengawal pencapaian 32 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 Fungsi serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:
 - Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

b. Fungsi Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
 - Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
 - Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Fungsi Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Fungsi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 - Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
 - Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
 - Pelaksanan urusan kepegawaian.
 - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
 - Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
 - Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan full spectrum

mulai dari premarket hingga post market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam upaya penguatan

pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. Percepatan penanganan Stunting

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*. BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang

obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun, aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun motto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Kemudahan dalam melakukan pengecekan terhadap produk saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, yang dapat diakses secara online. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

3. Reformasi Birokrasi (WBK)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2023. Upaya untuk dapat mempertahankan predikat WBK dilakukan dengan tetap konsisten melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan berorientasi pelayanan prima.

4. Regionalisasi Laboratorium Pengujian

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian laboratorium, telah diterapkan sistem regionalisasi laboratorium, konsep regionalisasi

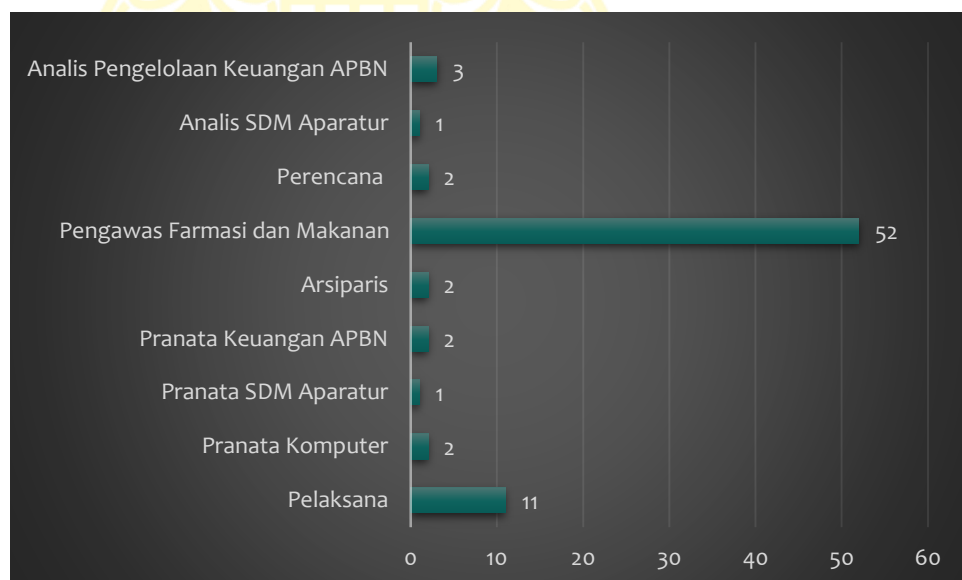
laboratorium ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsep dasar dari regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan region dan spesialisasi pengujian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Model ini tetap mengutamakan validitas dan kecepatan dalam hal pelaksanaan pengujian yang tentunya akan mempercepat tindak lanjut yang perlu dilakukan.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Internal

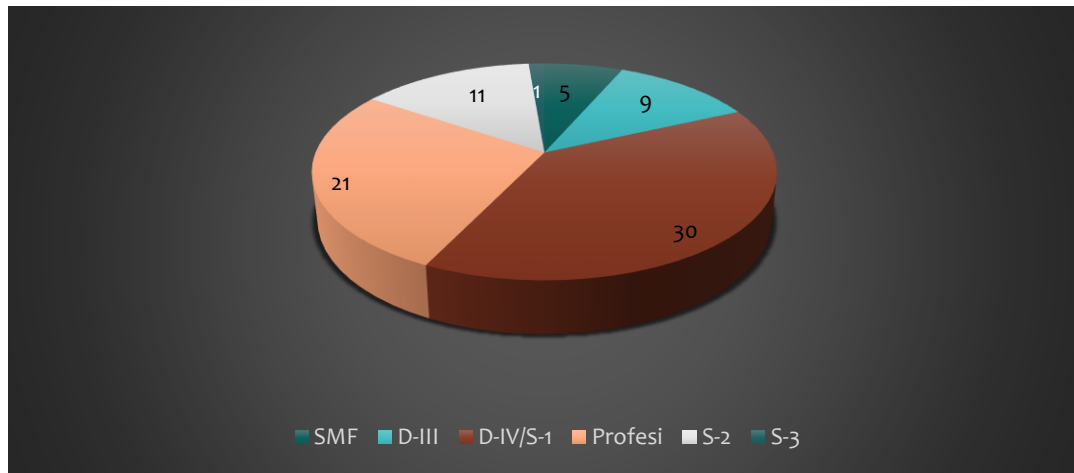
1.4.1 Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 31 Desember 2023 adalah 86 orang yang terdiri atas 77 PNS dan 9 PPPK. Sebanyak 61 orang menduduki jabatan fungsional farmasi dan makanan (PFM), 12 orang jabatan fungsional tertentu lainnya dan 11 orang pelaksana, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 orang, tenaga outsourcing 16 orang, sehingga total pegawai berjumlah 111 orang.



Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020-2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun/pindah.

b. Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.



Gambar 4. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh

c. Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh

- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi.
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja.
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui e-registration.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh.
- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara).
- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

d. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 27.258.618.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan revisi DIPA Pusat untuk pencadangan anggaran, besaran anggaran yang di saving oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 1.242.857.000 (Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) melalui mekanisme Automatic adjustment, selanjutnya pada 14 Februari 2023, 12 April 2023, 13 Juli 2023, dilakukan revisi

Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA. Pada tanggal 31 Agustus 2023 terjadi revisi DIPA penambahan anggaran pengadaan alat laboratorium sebesar Rp. 1.633.729.000, sehingga total anggaran menjadi Rp. 27.649.490.000 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Dan pada tanggal 17 Oktober 2023 dilakukan kembali revisi DIPA penambahan belanja pegawai untuk pemenuhan gaji PPPK sebesar Rp. 1.187.337.000 sehingga total anggaran menjadi Rp.28.836.827.000,- (Dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Total revisi DIPA yang dilakukan selama tahun 2023 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali revisi dan 27 (dua puluh tujuh) kali revisi POK, keseluruhan proses revisi dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian update kegiatan dengan realisasi anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari pagu Rp.28.836.827.000,- Balai Besar POM di Banda Aceh dapat merealisasikan sebesar Rp.28.695.994.705 (99,51%).

1.4.2 Eksternal

a. Kondisi geografis dan Demografis



Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 010 58' 37,2"-060 04' 33,6" LU dan 940 57' 57,6"-980 17' 13,2" BT. dengan ketinggian rata-

rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km².

Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah kepulauan, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada BAB VIII ketentuan peralihan Pasal 29 Poin C disebutkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan program dan kegiatan tersebut berakhir. Maka terhitung 1 Januari 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah mengacu pada ketentuan dalam PerBPOM tersebut dengan cakupan wilayah pengawasan dari 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh (yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

- **Balai Besar POM di Banda Aceh**

Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 9 Kabupaten dan 4 Kota (13 Kab/Kota). Dari 13 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 1 (satu) Kota merupakan daerah kepulauan yaitu Kota Sabang.

- **Loka POM Aceh Selatan**

Cakupan pengawasan Loka Aceh Selatan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue (merupakan pulau terluar).

- **Loka POM Aceh Tengah**

Untuk Loka Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 5 (lima) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya.

b. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	411	Sarana
3.	Toko Obat	474	Sarana
4.	Klinik	239	Sarana
5.	Rumah Sakit	62	Sarana
6.	Puskesmas	306	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2289	Sarana

9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		5046	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	18	Sarana
4.	UKOT	11	Sarana
5.	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	83	Sarana
7.	PIRT	1469	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		1588	Sarana



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

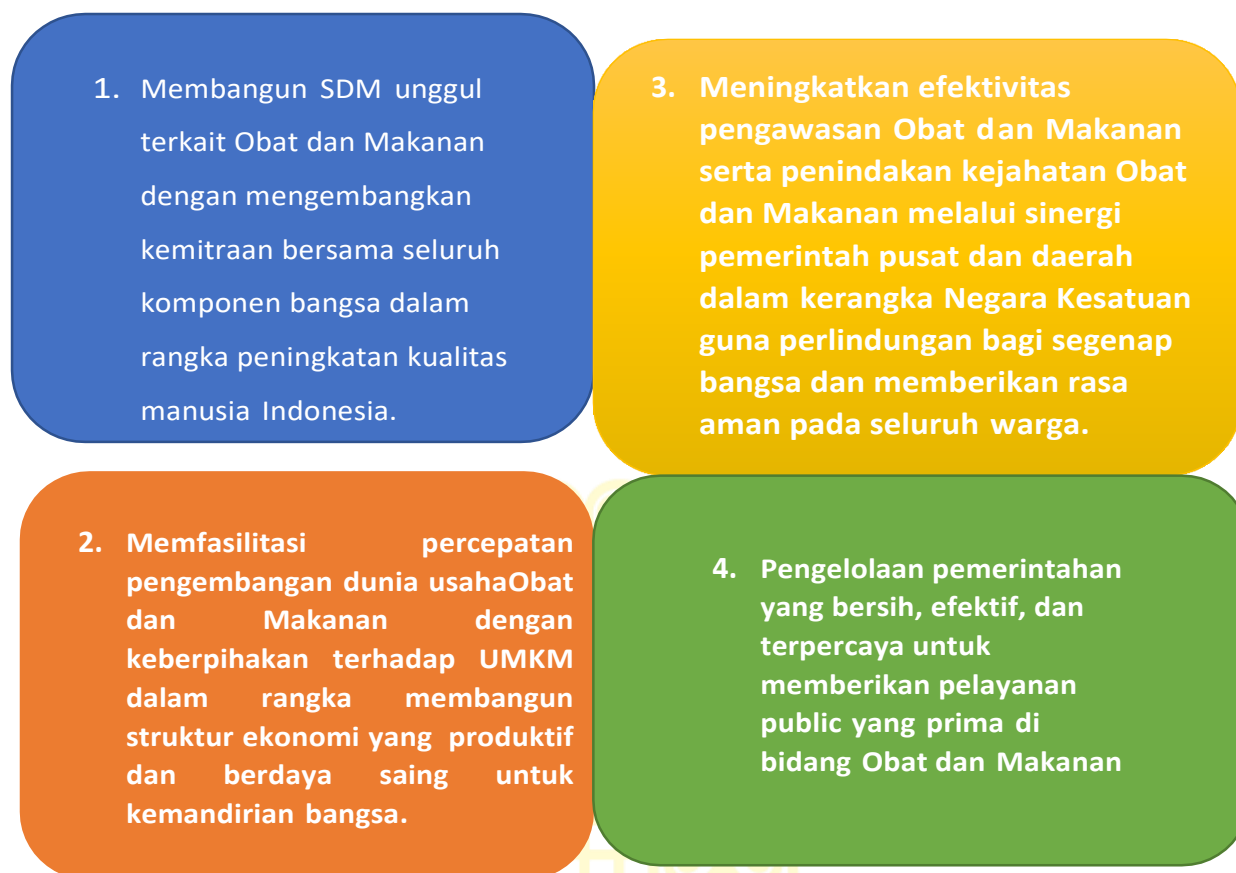
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2020-2024 yaitu:

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI



Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh

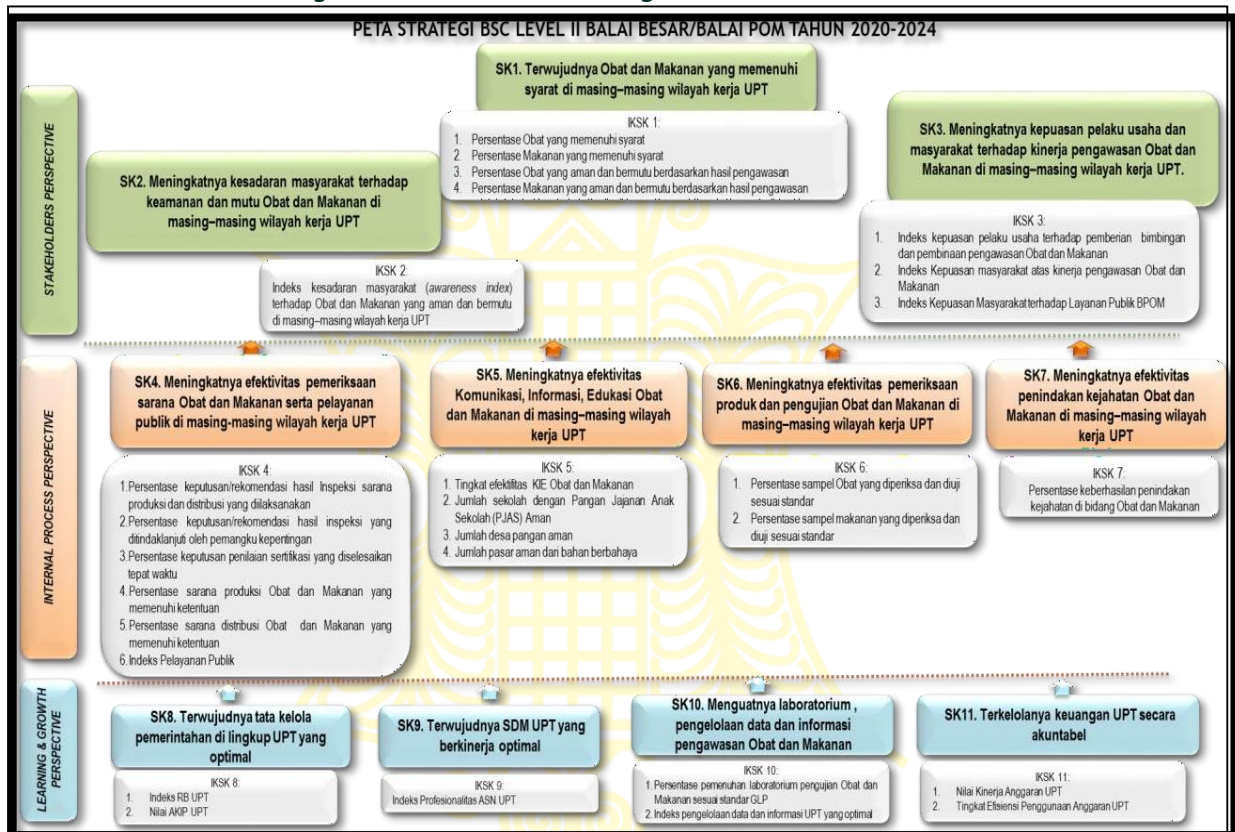
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023.

Table 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	81
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	81,2
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	78,9
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	83
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2,5
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	92,1

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp 27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BALAI BESAR POM di Banda Aceh	81
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	73,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	79

		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dimasing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di BandaAceh	81,2
		Nilai AKIP Balai Besar POM di BandaAceh	78,9
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	83
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat danMakanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2,5
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	92,1

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	749.071.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	547.192.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	607.507.400,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	426.568.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	48.603.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											81		69.551.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											93.4		157.070.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											73.62		51.940.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT											93		136.477.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	318.543.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	107.280.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	333.050.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	81.473.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	718.630.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	569.918.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	7	18	35	42	55	62	65	67	70	71	74	79	52.594.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	218.077.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	25	30	40	50	60	75	80	90	95	72	450.798.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		15	20	25	30	50	60	70	80	85	95	25	658.930.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	32	42	53	63	76	84	88	96	100	90.408.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7	15	27	35	44	57	66	77	92	94	96	100	58.107.400,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	10	27	28	49	62	65	70	74	76	78	80	698.310.000,00
23.	Indeks RB UPT												81.2	274.760.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												78.9	131.300.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	316.670.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	2.703.482.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.95	2.25	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	75.000.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		30	50	60	65	71	71	72	73	74	75	92.1	16.216.906.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		10	15	30	45	60	70	80	90	95	95	19	390.400.000,00
Total												27.258.618.000,00		

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh








Yudi Novlandi, M.Sc.Tech., Apt.




Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Table 4. Kategori Pencapaian Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	<70%	

Kategori capaian indikator kinerja tabel di atas digunakan untuk penilaian pada point a BAB III dan tabel capaian kinerja di bawah untuk digunakan pada penilaian point b di BAB III.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < x < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3}}{3}$$

$$\text{NPS 4} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS 5} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4} + 1\text{NPI 5}}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut: Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai Besar POM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.

1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada aplikasi Sigarang secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), SMART DJA, monev Bappenas, RHPK, BOC dan Aplikasi e-performance.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian

5. reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA










3.1 Capaian Kinerja Organisasi








Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Balai Besar POM di Banda Aceh di Tahun 2023 berhasil meraih Nilai Pencapaian Sasaran Strategis dengan capaian 106,52 dengan Predikat Istimewa. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2023 adalah 106,51 dengan kategori Istimewa. Perspektif Internal process memiliki capaian tertinggi 109,30 disusul Perspektif Internal process dengan capaian 109,30 disusul Perspektif Learning and Growth 105,11 dan Perspektif Stakeholder 104,68.







Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan tahun 2023 sebesar 106,51 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2022 yang memiliki capaian 102,81. Peningkatan Capaian tahun 2023 sebanyak 3,8 poin didukung oleh peningkatan dua capaian Sasaran Kegiatan 1 dan 6 yang pada tahun 2022 tidak mencapai target. Sasaran 1 telah berhasil dicapai dengan nilai 107,92 jauh di atas capaian tahun 2022 sebesar 96,81 dan Sasaran 6 juga telah berhasil ditingkatkan sebanyak 20,13 poin dari 99,87 pada tahun 2022 menjadi 120 di tahun 2023.

Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 106,51 dengan Predikat Istimewa							
1. Nilai Perspektif Stakeholder 104,68 dengan kategori Sangat Baik							
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 107,92 dengan kategori Sangat Baik	IKSK1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	94.85	105.39	Sangat Baik 
		IKSK2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5	89.17	110.77	Sangat Baik 
		IKSK3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	93.77	104.19	Sangat Baik 
		IKSK4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	89.69	172.48	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	89.33	99.26	Cukup 
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 101,99 dengan kategori Sangat Baik	IKSK6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	81	82.61	101.99	Sangat Baik 
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 104,03 dengan kategori Sangat Baik	IKSK7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan makanan	93.4	96.14	102.93	Sangat Baik 
		IKSK8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73.62	76.56	103.99	Sangat Baik 
		IKSK9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93	97.80	105.16	Sangat Baik 

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori		
2. Nilai Perspektif Internal Process 109,30 dengan kategori Sangat Baik							
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 109,34 dengan kategori Sangat Baik	IKSK10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik 
	IKSK11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	69.27	111.73	Sangat Baik 	
	IKSK12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120	Sangat Baik 	
	IKSK13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	65	71.62	110.18	Sangat Baik 	
	IKSK14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	85.42	104.17	Sangat Baik 	
	IKSK15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.40	4.37	99.32	Cukup 	
	IKSK16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	100	126.58	Tidak dapat disimpulkan 	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 100,57 dengan kategori Sangat Baik	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	94.08	102.26	Sangat Baik 
		IKSK18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72	72	100	Baik 
		IKSK19	Jumlah Desa pangan aman	25	25	100	Baik 
		IKSK20	Jumlah Pasar Aman dari Bahan	19	19	100	Baik 
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 120 dengan kategori Sangat Baik	IKSK21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120	Sangat Baik 
		IKSK22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120	Sangat Baik 
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 107,29 dengan kategori Sangat Baik	IKSK23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	85.83	107.29	Sangat Baik 

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kategori		
3. Nilai Perspektif Learning & Growth 105,11 dengan kategori Sangat Baik							
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal 103,46 dengan kategori Sangat Baik	IKSK24	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	81.2	86.23	106.19	Sangat Baik 
		IKSK25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	78.9	79.48	100.74	Sangat Baik 
SS9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal 108,59 dengan kategori Sangat Baik	IKSK26	Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	83	90.13	108.59	Sangat Baik 
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 110,83 dengan kategori Sangat Baik	IKSK27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	85.4	101.67	Sangat Baik 
		IKSK28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2.5	3	120	Sangat Baik 
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara akuntabel 97,54 dengan kategori Cukup	IKSK29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	92.1	89.83	97.54	Cukup 

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik**, 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori **Baik**, 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan** dan 3 (tiga) indikator kinerja yang berkategori **Cukup**. Kategori **Sangat Baik**, **Baik** dan **Tidak dapat disimpulkan** menunjukkan bahwa indikator kinerja telah mencapai target tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh


Sasaran Kegiatan 1 dicapai dengan NSS 108,03 dengan kategori sangat baik. Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh empat IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target. Namun berbeda halnya dengan capaian IKU 5 Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat yang terpaut sedikit di bawah target. Dalam kinerja IKU 5, dari 75 sampel Fortifikasi yang disampling dan diuji, 67 sampel MS (memenuhi syarat) dan 8 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sampel garam curah (TMS Kadar KIO3).

Indikator Kinerja

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Table 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.0	94.85	105.39 	Sangat Baik

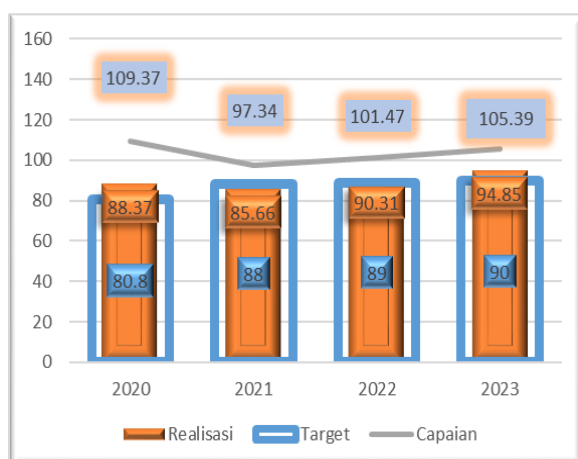
Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud dalam IKU ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kadaluarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat yang dimaksud adalah dari hasil pemeriksaan dan pengujian. Jumlah sampel acak yang masuk ke laboratorium sebanyak 951 sampel. Kesimpulan

yang diperoleh dari sampel tersebut adalah 902 sampel MS (memenuhi syarat), dan 49 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sampel TMS ini diperoleh dari hasil pemeriksaan label/penandaan dan pengujian Persentase capaian target indikator sasaran 2023 sebesar 105.39% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2023 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Gambar 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat di tahun 2023 sebesar 105.39%. Walaupun tahun 2020 capaian kinerja paling tinggi yaitu 109.37%, namun realisasi

sebenarnya cukup kecil karena targetnya rendah maka capaiannya besar. Tapi jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022 capaian ini meningkat signifikan, tahun 2022 capaian kinerja sebesar 90.31% dan tahun 2021 97.34%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 7. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.0	94.85	104.23 ▲	Tercapai/ melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	94.9	94.85	99.94 ▲	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat 2023 sebesar 94.85% sudah melampaui target Renstra 2024 yaitu 91%. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu untuk target tahun 2024 indikator persentase obat yang memenuhi syarat menjadi 94.9. Penetapan target 2024 disesuaikan dari realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat mencapai target kinerja pada tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Gambar 9. Perbandingan realisasi kinerja BALAI BESAR POM di B. Aceh tahun 2023 dengan Balai lain yang setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dibandingkan dengan balai yang setara, menempati urutan paling tinggi yaitu 94.85%. Capaian yang paling rendah adalah Balai Besar POM di Serang dengan capaian kinerja 93.38%. Semua Balai telah melampaui target

nasional yaitu 93.5%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator persentase Obat yang memenuhi syarat sudah memenuhi target 90.00%. Hal ini disebabkan sampel yang tidak memenuhi syarat menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 187 dan menjadi 49 sampel di tahun 2023. Sampel ini diuji oleh balai-balai anggota region I yang dikoordinatori oleh Balai Besar POM di Padang, yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh, Padang,

Medan, Balai POM Batam dan Bengkulu. Pada tanggal 6 Juni 2023 sesuai Surat Keputusan kepala BPOM RI No. 193 tahun 2023 tentang Regionalisasi laboratorium BPOM, koordinator region I berubah menjadi Balai Besar POM di Medan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 21 sampel Obat tidak memenuhi ketentuan label/penandaan (TMK): 5 sampel obat, 14 sampel obat tradisional, 1 sampel obat kuasi dan 1 sampel suplemen komplemen. Selain itu terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian sebanyak 28 sampel yaitu 2 sampel obat, 10 sampel obat tradisional, 15 sampel suplemen komplemen dan 1 sampel Kosmetik. TMS pengujian ini meliputi TMS pemerian, TMS kadar (obat), TMS Mikrobiologi parameter Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK), TMS identifikasi Sibutramin dan Parasetamol pada sediaan obat tradisional dan TMS kadar cemaran logam Pb (timbal) pada sediaan kosmetik. Penurunan TMS yang sangat signifikan ini diakibatkan oleh menurunnya sampel TMS kosmetik yang didominasi oleh TMK label penandaan. Pada saat surat Direktur Pengawasan Kosmetik No. TPW.03.08.44.4431.05,22.1509 tanggal 31 Mei 2022 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik dikeluarkan, banyak produk kosmetik TMK penandaan/label. Pelanggaran yang terjadi meliputi klaim minor dan klaim mayor. Klaim minor yaitu klaim yang memerlukan data dukung atau ada data yang tidak mencantumkan 2D Barcode, sedangkan untuk Klaim mayor diantaranya tidak mencantumkan klaim dilarang, tidak mencantumkan nomor bets, tidak mencantumkan kadaluarsa di kemasan primer, serta tidak mencantumkan negara produsen pada kemasan primer dan sekunder. Klaim mayor memerlukan data dukung seperti non tested on animals dan dermatologically sampling acak. Tahun 2023 terjadi penurunan TMK yang diakibatkan berlakunya peraturan tersebut. Penurunan ini disebabkan gencarnya sosialisasi peraturan tersebut kepada pelaku usaha kosmetik sehingga pemahaman mereka tentang label/penandaan meningkat. Selain TMK label, penyebab sampel TMS juga disumbang oleh pengujian kimia dan mikrobiologi. Hasil pengujian kimia sampel obat tradisional ditemukan bahwa masih ada produk yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sibutramin dan parasetamol. Parameter uji mikrobiologi yang paling banyak menyebabkan sampel TMS pada obat tradisional adalah angka

lempeng total (ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK). TMS ini disebabkan karena obat tradisional tidak higienis, kadar air yang terkandung dalam sediaan memungkinkan tumbuhnya mikroorganisme dan jamur sehingga perlu diadakan KIE terkait distribusi dan penyimpanan sediaan. TMS pada sediaan kosmetik yaitu cemaran kadar Pb (timbal) pada sediaan rias bayangan mata (*eye shadow*).

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 8. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	843.349.200	838.370.809	99.41	105.39	Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dimana capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena perubahan mekanisme pengujian ke sistem regionalisasi laboratorium sudah berjalan dengan lancar. Pengadaan reagen dan suku cadang lebih efisien karena menggunakan perencanaan berdasarkan data realisasi anggaran di tahun sebelumnya dan ketiadaan reagen yang jumlahnya sedikit dapat berbagi dengan balai lainnya. Pengujian juga dapat dilakukan lebih terencana sehingga menghemat reagen dan komponen pendukung laboratorium lain. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya target pada indikator ini karena berbagai upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain melakukan pembinaan pada sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian sehingga diharapkan produk yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sudah memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari segi label/penandaan serta mutu sediaan. Pada awal

peraturan baru mengenai notifikasi kosmetik yaitu surat Direktur Pengawasan Kosmetik No. TPW.03.08.44.4431.05,22.1509 tanggal 31 Mei 2022 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik pada dikeluarkan, banyak produk kosmetik TMK penandaan/label. Sosialisasi dan pembinaan mengenai peraturan ini sepertinya memberi pengaruh yang baik kepada pelaku usaha, hal ini dilihat dari penurunan sampel TMK Kosmetik. Intervensi lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi penguji secara konsisten dengan mengikutsertakan penguji dalam berbagai pelatihan serta meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sehingga pengujian menjadi *reliable*. Peningkatan kompetensi juga diberikan pada personel pemeriksa sehingga memiliki kompetensi yang baik dalam menentukan TMK sediaan sehingga memiliki persepsi sama dengan pusat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 9. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sampel Obat yang disampling Balai Besar POM di B. Aceh masih banyak yang belum selesai uji baik yang diuji di balai sendiri maupun di balai regional	Dikoordinasikan ke masing-masing ketua tim dan Ketua tim di balai regional			Sampel Obat Acak yang diuji belum terealisasi 100%	Sampel Obat Acak di TW IV sudah selesai uji 100%
2.	Sampel yang belum selesai uji mengalami kendala pengujian terkait penumpukan sampel di Oktober-Nopember sehingga masih ada sampel di bulan Desember	Mekanisme lembur pada hari Libur			Sampel yang disampling Oktober dan Nopember masih banyak belum selesai uji	Sampel Obat Acak sudah selesai uji 100%


i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW III digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik sampling maupun pengujian. Kendala pengujian terkait alat dan reagen yang tidak tersedia, dikoordinasikan ke Balai regional dan balai lain yang bukan anggota balai Regional Medan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 10. Target dan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.50	89.17	110.77 	Sangat Baik

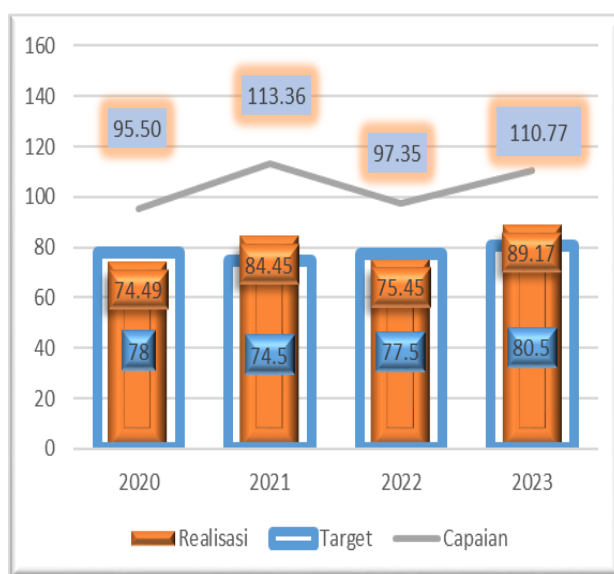
Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh menggunakan formula:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan oleh BALAI BESAR POM di Banda Aceh. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kedaluwarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan label. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Dari 351 sampel acak makanan yang diperiksa oleh Balai Besar POM di

Banda Aceh, terdapat 313 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 38 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 telah melampaui target yaitu 110,77 % dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya



Gambar 10. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya

Terjadi kenaikan signifikan capaian Persentase Makanan yang memenuhi Syarat pada tahun 2023 (110.77%) dibandingkan tahun 2022 (97.32%). Realisasi Kinerja indikator ini mulai dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan

kecuali di tahun 2022. Target kinerja juga meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2020 target lebih tinggi dari 2021 karena capaian 2020 yang rendah maka tahun 2021 target disesuaikan berdasarkan realisasi di tahun 2020. Capaian Kinerja 2023 sebesar 110,77% hanya sedikit dibawah capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 113,36%, hal ini disebabkan target kinerja tahun 2023 lebih besar dibandingkan 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 11. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.50	89.17	106.79 ▲	Tercapai/melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori

	89.2	89.17	99.96 ▲	Akan Tercapai
--	------	-------	------------	----------------------

Capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat di tahun 2023 terhadap RENSTRA 2020-2024 sudah Tercapai/Melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu untuk target tahun 2024 indikator persentase makanan yang memenuhi syarat menjadi 89.2. Penetapan target 2024 disesuaikan dari realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, capaian Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan dapat memperoleh kategori tercapai/melampaui pada tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 11. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Realisasi kinerja Balai Besar POM Banda Aceh di tahun 2023 berada di angka 89.17% yang telah melampaui target nasional 84.2%. Realisasi kinerja yang

paling tinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu sebesar 93.96%, diikuti Balai Besar POM di Banda Aceh, yang paling rendah adalah Balai Besar POM di Serang dengan realisasi 82.26% dan merupakan satu-satunya balai yang belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat Sangat Baik disebabkan sampel TMS label/penandaan sudah tidak banyak. Dari 38 hasil Uji yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat), ada 13 sampel yang TMK label/penandaan yaitu produk AMDK, keripik, Madu, mihun, dan jeli. Sementara itu produk makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) Parameter Uji Kimia antara lain Penetapan Kadar Sulfit pada kismis, Penetapan Kadar logam Sn pada jamur kaleng, Penetapan Kadar Benzoat pada selai, Penetapan Kadar bilangan peroksida pada minyak VCO, Penetapan Kadar Benzoat pada Minuman berperisa, Penetapan Kadar histamin pada produk olahan ikan, serta Penetapan Kadar HMF (hidroksimetilfurfural) dan enzim diastase pada madu. Produk makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) Parameter Mikrobiologi antara lain Angka Kapang Khamir dan Angka Lempeng total pada produk teh, Angka Coliform dan *P. aeruginosa* pada AMDK. Penurunan TMK ini ini disebabkan karena komitmen pelaku usaha yang lebih baik karena gencarnya pembinaan yang dilakukan.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 12. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	647.066.200	642.950.189	99.36	110.77	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran **efisien** di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi di bandingkan dengan realisasi anggaran. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran yang tinggi adalah perbaikan terhadap perencanaan reagen, perbaikan peralatan dan suku cadang. Dengan demikian anggaran tahun 2023 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat karena penggunaan anggaran dapat dioptimalkan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang akan meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. Menjamin peningkatan kompetensi petugas dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait label/penandaan.
2. Melakukan pengawasan yang ketat di pasar dan tempat-tempat pendistribusian makanan.
3. Melakukan inovasi agar lebih menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dengan membuka layanan pengaduan yang mudah diketahui masyarakat dengan gencar mensosialisasikan media pengaduan tersebut agar lebih dikenal.
4. Menjamin kualitas pelayanan dan pengujian dengan mengikuti system mutu 17025:2015 dan QMS 9001:2017 dalam hal ini melakukan audit internal maupun eksternal sehingga hasil uji reliable dapat dipertahankan.
5. Peningkatan kegiatan penyidikan terkait temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga menimbulkan efek jera agar kesalahan yang sama tidak terulangi di kemudian hari.
6. Melakukan KIE terkait makanan yang aman dan bermutu dan mengkader tenaga penyuluh dari komponen masyarakat tentang makanan.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Table 13. Matriks Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Oktober Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target. Sampel total selesai uji adalah 310, belum selesai uji 26. • Pada bulan 	<ul style="list-style-type: none"> -Percepatan pengujian sisa sampel yang belum diuji -Meningkatkan Monitoring dan evaluasi sampling terkait penandaan sampel yang memenuhi 			Sampel Makanan Acak yang diuji belum terealisasi 100%	Sampel Makanan Acak di TW IV sudah selesai uji 100%

	<p>November Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target. Sampel total selesai uji adalah 336, belum selesai uji 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bulan Desember Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target. Sampel total selesai uji adalah 351, semuanya tuntas. Hasilnya adalah 313 sampel MS dan 38 sampel TMS. Dari 38 sampel TMS, TMK Penandaan 13, selebihnya adalah TMS Pengujian. 	syarat setiap bulan				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--	--	--	--

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja


Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh. Selain itu untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Di Lab.Pangan selain menguji sampel rutin acak dari Balai sendiri, Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh juga menguji sampel Regional Medan yaitu Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Padang, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Batam, Balai POM di Payakumbuh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan, Loka POM Tanjung Balai, Loka POM Toba Samosir, Loka POM Dharmasraya, Loka POM Rejang Lebong, dan Loka POM Tanjung Pinang. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai, terutama untuk

pemeliharaan instrumen dan suku cadang instrumen. Karena Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh ditunjuk untuk mengerjakan Parameter Uji cemaran Logam dan Cemaran Proses, maka diperlukan sarana Lemari asam yang memadai agar keselamatan kerja penguji terjamin. Lemari asam yang tersedia saat ini tidak memenuhi syarat disebabkan air flow tidak tercapai. Selain itu juga alat water purification yang telah rusak perlu diganti agar mempercepat dan memperlancar proses pengujian.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 14. Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90.00	94.25	104.72 	Sangat Baik

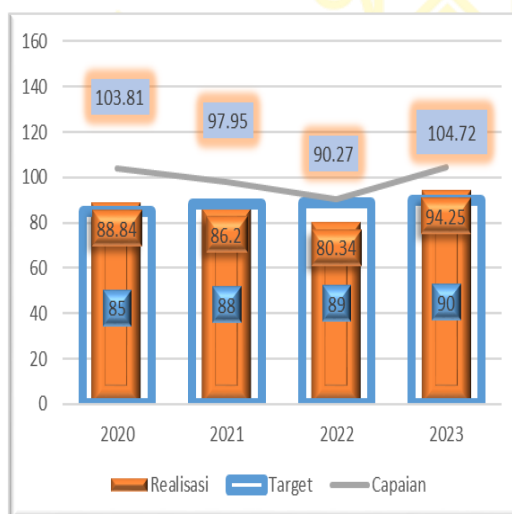
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a). Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kadaluarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi

persentase Obat yang aman dan bermutu diperoleh dari hasil hasil pemeriksaan dan pengujian. Dari 369 sampel targeted yang disampling dan masuk ke laboratorium terdapat 346 sampel MS (memenuhi syarat) dan 23 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Lima sampel Obat TMS yaitu 3 TMK dan dan 2 TMS kimia yaitu sediaan rokok. Sampel OT yang TMS sebanyak 3 TMK label/penandaan dan TMS Pengujian 7 TMS Pengujian yang didominasi oleh TMS kadar vitamin B. TMS kosmetik sebanyak 1 sampel yaitu kadar metanol pada sediaan hair tonik. Realisasi indikator ini 94,25% menghasilkan capaian 104.72% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 12. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2020 yaitu 88.84% dengan capaian 103.81%. Realisasi ini kemudian menjadi dasar penetapan target di tahun 2021. Walaupun realisasi tidak memenuhi target tetapi target tetap dinaikkan

hingga tahun 2023. Berbeda halnya di tahun 2023, Realisasi Kinerja telah mampu melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 104.72% meskipun target UPT naik dibanding dua tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu	89.00	94.25	104.72 ▲	Tercapai/ Melampaui

berdasarkan Hasil Pengawasan	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	94.3	94.25	99.94 ▲	Akan Tercapai

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target renstra tahun 2024 sudah melewati target. Capaian indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 104.72%. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu untuk target tahun 2024 indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menjadi 94.3. Penetapan target 2024 disesuaikan dari realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat memenuhi target kinerja tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 13. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah yang 94.25% diikuti oleh UPT Balai Besar POM di Banjarmasin (93.32%) dan Serang (85.96%). Dari ketiga balai tersebut hanya

Balai Besar POM di Serang yang belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab capaian indikator kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu Sangat Baik adalah hasil pengawasan sampel Obat yang disampling secara targeted menunjukkan penurunan trend sampel tidak memenuhi syarat yang banyak ditemukan di tahun 2022 yaitu sebanyak 49 sampel sedangkan tahun 2023 tidak ada sampel targeted yang TMK label/penandaan. Hal ini disebabkan karena sosialisasi terhadap Peraturan baru yaitu Surat Direktur Pengawasan Kosmetik No. TPW.03.08.44.4431.05,22.1509 tanggal 31 Mei 2022 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik cukup efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan komitmen dari industri dan pelaku usaha kosmetik sudah cukup baik.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 16. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	670.456.900	666.458.915	99.40	104.72	Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dimana capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena TMK label/penandaan sudah menurun serta kontribusi dari hasil pengujian. Pengujian Sampel TMS lebih sedikit sehingga reagen serta baku yang digunakan menjadi lebih sedikit dimana jika sampel TMS akan dilakukan pengulangan yang membuat pemakaian reagen menjadi lebih banyak sehingga berimbas terhadap pemakaian anggaran yang lebih besar. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan keberhasilan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan

serangkaian kegiatan yang mampu mengungkit keberhasilan program-program kinerja Balai Besar di Banda Aceh. Kegiatan tersebut mencakup melakukan pengawasan terhadap sampel targeted dengan melakukan sampling dan pengujian produk Obat yang beredar dan membekali petugas dengan kompetensi untuk meningkatkan kompetensinya terkait label/penandaan saat melakukan KIE kepada pelaku usaha terkait label/penandaan serta cara produksi obat tradisional yang baik serta meningkatkan kompetensi penguji sehingga kemampuan uji terhadap berbagai ruang lingkup dapat ditingkatkan. Petugas juga melakukan KIE kepada masyarakat tentang produk Obat yang aman dan bermutu.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 17. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Sampel Obat masih banyak yang belum selesai uji baik yang diuji di balai sendiri maupun di balai regional	Dikoordinasikan ke masing-masing ketua tim dan Ketua tim di balai regional			Sampel Obat yang diuji belum terealisasi 100%	Sampel Obat di TW IV sudah selesai uji 100%
2.	Sampel yang belum selesai uji mengalami kendala pengujian terkait penumpukan sampel di Oktober-Nopember sehingga masih ada sampel di bulan Desember	Mekanisme lembur pada hari Libur			Sampel yang disampling Oktober dan Nopember masih banyak belum selesai uji	Sampel sudah selesai uji 100%


i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Rekomendasi pada Lakin Interim telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga realisasi dapat mudah dimonitoring dan dievaluasi capaian kinerja.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 18. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023(%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	52.00	89.69	172.48 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

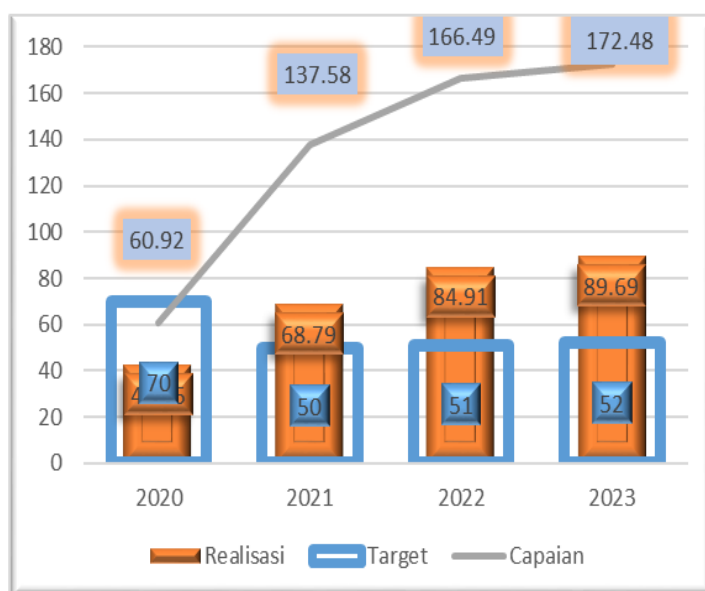
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan menurut UU No.18 tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi yang disampling Balai. Sampel yang disampling Loka menjadi kinerja Loka tersebut. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label

tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **tidak dapat disimpulkan** karena banyaknya sampel targetted memenuhi syarat namun target yang ditetapkan terlalu rendah. Dari 97 sampel targetted yang disampling, 87 sampel MS (memenuhi syarat) dan 10 sampel TMS (tidak memenuhi syarat).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Capaian Kinerja dari tahun 2020-2023 mampu mempertahankan tren kenaikan terus menerus. pada tahun 2020 capaian sangat rendah sehingga target tahun 2021

ditetapkan berdasarkan realisasi tahun 2020. sebelumnya. Dengan capaian 172.48%, capaian kinerja tahun 2023 berhasil melampaui realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022 yang telah memperlihatkan kenaikan capaian berturut-turut sebesar 137.58% dan 166.49%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

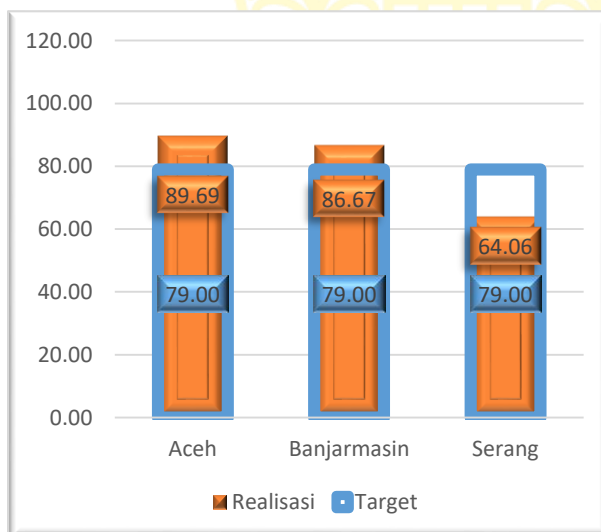
Table 19. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan Aman dan Bermutu	54.00	89.69	166.09	Tidak dapat disimpulkan

berdasarkan Hasil Pengawasan	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	94.3	94.25	99.94 ▲	Akan Tercapai

Realisasi kinerja pada tahun 2023 dibandingkan terhadap target Renstra 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh (54.00%) jauh melampaui target yang ditetapkan (89.69%), sehingga tidak dapat disimpulkan. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator persentase makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menjadi 89.7. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan diharapkan capaian kinerja tahun 2024 dapat memenuhi kategori sangat baik.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Jika dibandingkan dengan dua balai di kluster setara, realisasi tertinggi dicapai Balai Besar POM di Banda Aceh (89.69%) dibandingkan Balai Besar POM di Banjarmasin (86.67%) dan

Balai Besar POM di Serang (64.06%). Dari ketiga balai tersebut hanya Balai Besar POM di Serang yang belum mencapai target nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sampel targeted menurut pedoman sampling tahun 2023 dibagi menjadi sampling pangan tertentu, sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan

sampling produk pangan yang diduga mengandung DNA/ Protein Porcine. Pada tahun 2023 sampel pangan targetted yang di sampling sebanyak 97 sampel dengan hasil 87 sampel MS (memenuhi syarat) dan 10 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Persentase realisasi sampel yang memenuhi syarat adalah 89.69 %, persentase capaian 172.48% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Penyebab hal ini adalah karena penambahan angka target 2023 tidak disesuaikan dengan capaian realisasi dua tahun sebelumnya yang secara berturut-turut jauh diatas target (137.58% dan 166.49%). Meskipun realisasi kinerja 2023 di atas target nasional (79%), realisasi produk pangan targetted memenuhi syarat masih berada pada angka 89.69% sehingga masih perlu dilakukan pembinaan lebih baik lagi terhadap produsen produk yang masih memberikan hasil TMS pengujian sampel targetted. Produk yang masih TMS antara lain TMS Angka Coliform pada AMIU, Penetapan Kadar Siklamat pada sampel PJAS dan limun UMKM, Identifikasi Boraks pada kerupuk tempe, dan Identifikasi DNA porcine pada produk marsmallow.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 20. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	494.642.900	491.405.496	99.35	120	Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2023 sudah efisien dimana capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena realisasi sampel targetted yang disampling dan diuji jauh lebih tinggi dari targetnya. Dari capaian indikator tersebut anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sudah meningkat dari tahun sebelumnya karena berbagai upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh. Selain memperketat pengawasan terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat seperti boraks, formalin dan pewarna yang dilarang, juga aktif melakukan KIE kepada pelaku usaha agar mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan. Di samping itu, terkait dengan masih ditemukannya TMS Boraks pada kerupuk tempe, perlu juga meningkatkan upaya penyidikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang sering melanggar ketentuan peredaran makanan di wilayah Aceh.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Mengingat dua tahun berturut-turut capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dapat disimpulkan, maka tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh akan mengajukan perubahan target kinerja sesuai realisasi kinerja tahun 2023.

Table 21. Matriks Tindak lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pada bulan Oktober Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tidak dapat disimpulkan (176.28%). Sampel total selesai uji adalah 42, belum selesai uji 42. Banyaknya sampel yang belum selesai uji dikarenakan dalam waktu bersamaan juga menguji sampel regional	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel yang belum diuji. • Meningkatkan Monitoring dan evaluasi sampling . Mengubah target Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu sehingga hasil dapat disimpulkan 			Sampel Makanan yang diuji belum terealisasi 100%	Sampel Makanan di TW IV sudah selesai uji 100%
2	Pada bulan November Realisasi Persentase Makanan yang					

	Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tidak dapat disimpulkan (172.48%). Sampel total selesai uji adalah 84, belum selesai uji 5 sampel				
3	Pada bulan Desember Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tidak dapat disimpulkan (172.48%). Sampel total selesai uji adalah 97, semuanya tuntas. Hasilnya adalah 87 sampel MS dan 10 sampel TMS				


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Rekomendasi pada Lakin Interim telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga realisasi kinerja dapat dengan mudah di monitoring dan dievaluasi.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 22. Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat

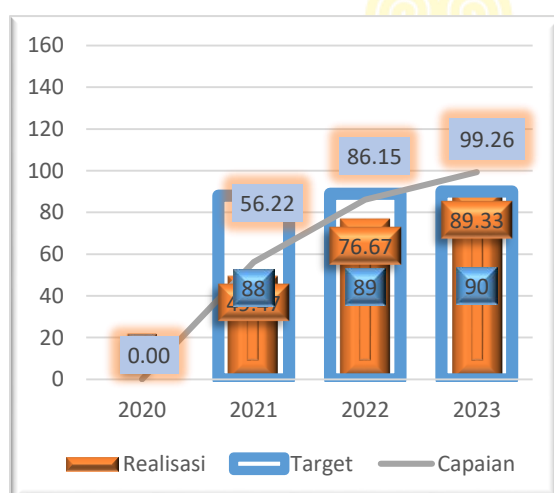
Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	89.33	99.26 	Cukup

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Yang termasuk sampel fortifikasi adalah Tepung Terigu, Minyak Goreng sawit, dan Garam. Fortifikan pada tepung Terigu adalah logam Zn, logam Fe, Vitamin B1, Vitamin B2, dan Vitamin B9. Fortifikan pada Minyak Goreng sawit adalah Vitamin A. Dan fortifikan pada garam adalah KIO3.

Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai

dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 89.33% masuk dalam kategori **Cukup** dengan capaian 99.26%. Dari 75 sampel yang disampling, 67 sampel MS (memenuhi syarat) dan 8 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sampel garam curah (TMS Kadar KIO₃).

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 16. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dijadikan indikator baru ada pada tahun 2021. Capaian realisasi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 capaian realisasi tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup besar

menjadi 99.26% dari 56.22% pada tahun 2021 dan 86.15% di tahun 2022. Walaupun realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan, target kinerja tahun 2022 dinaikkan dari target tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

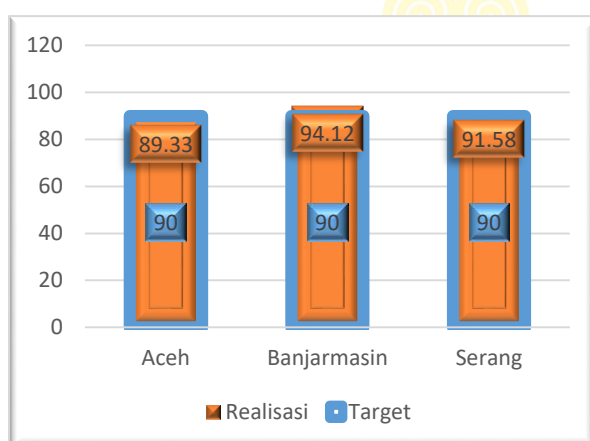
Table 23. Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023(%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	89.33	99.26	Akan Tercapai

Realisasi Indikator kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

tahun 2023 sudah hampir mencapai target dibanding target renstra sehingga masuk kategori **Akan Tercapai** dan diperkirakan akan mampu mencapai target pada periode berikutnya. Perlu komitmen dan strategi yang lebih baik Balai Besar POM di Banda Aceh agar mampu memenuhi target renstra 2024. Antara lain dengan cara memberikan pendampingan yang lebih intensif pada petani garam pada lokus yang telah ditunjuk mengenai teknis pemberian fortifikan KIO3 pada garam.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**



Gambar 17. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target BPOM

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sudah melampaui target nasional walaupun jika dibandingkan dengan kedua balai yang setara. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 89.33%. Realisaasi kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu 94.12% yang merupakan realisasi tertinggi dan realisasi kinerja Balai Besar POM di Serang 91.58%.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab utama indikator kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum memenuhi ekspektasi adalah tingginya sampel TMS (8 sampel) pada produk fortifikasi Garam yaitu Kadar KIO3 yang dibawah standar. Walaupun banyak produk yang TMK label/penandaan tapi pada indikator ini tidak mempengaruhi hasil akhir kesimpulan pada sampel. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Produk yang menyebabkan TMS adalah produk garam. Kondisi ini sering ditemukan pada produk

lokal/UMKM yang mana produk garamnya merupakan garam curah yang belum memenuhi standar SNI. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada produsen garam terkait cara pengolahan garam yang baik agar mutu produk terjamin. Pada produk minyak goreng, parameter uji penetapan kadar asam lemak bebas sering kali TMS. Tingginya kadar asam lemak bebas ini disebabkan penyimpanan sampel yang tidak sesuai. Produk minyak goreng seharusnya didistribusikan dan disimpan dalam kondisi bebas dari panas dan cahaya matahari langsung. Untuk itu perlu juga dilakukan KIE kepada pelaku usaha distribusi tentang penyimpanan produk sampel fortifikasi sehingga fortifikan yang terkandung didalamnya masih dalam kondisi yang sesuai.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 24. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	48.603.000	47.761.773	98.27	99.26	Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dimana capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena pengoptimalisasi dan perencanaan pembelian alat, regen, suku cadang sudah direncanakan dengan lebih baik. Dengan demikian anggaran tahun 2023 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh pelaku usaha. Pengawasan dan KIE yang intensif sudah dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Karena permasalahan modal juga termasuk kendala pada UMKM, Balai Besar POM di Banda Aceh juga

berkoordinasi dengan dinas terkait. Pembinaan pada pedagang pasar juga sering dilakukan, hal ini karena di pasar banyak pedagang yang menempatkan barang dagangannya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang sesuai yang menyebabkan kadar KIO3 menurun.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 25. Matriks Tindak lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Target yang belum tercapai disebabkan oleh hasil uji KIO3 pada garam curah. Hasil KIO3 pada garam curah pada umumnya adalah dibawah standar, artinya KIO3 telah ditambahkan sebagai fortifikan, namun belum memenuhi syarat mungkin disebabkan kurangnya homogenisasi saat penambahan KIO3 pada garam	Memberikan pembinaan kepada petani garam tentang teknis penambahan KIO3 pada garam			Realisasi capaian belum memenuhi target (masih banyak sampel fortifikasi yang TMS)	Capaian belum memenuhi target (masih banyak sampel fortifikasi yang TMS) 89.33%

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha terkait fortifikasi, menggandeng instansi terkait agar bersama-sama mengatasi permasalahan UMKM termasuk instansi yang dapat memberikan masukan terkait modal kepada UMKM. Memetakan daerah dan pelanggaran yang umumnya terjadi di daerah tersebut sehingga dapat dibuat strategi pengatasan masalah bisa lebih efektif.

Sasaran Kegiatan 2


Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 2 dicapai dengan NSS 101,99 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 101,74. Target Kinerja yang meningkat di 2023 dapat diikuti dengan peningkatan capaian kinerja yang melampaui target sehingga memperoleh NSS dengan kategori sangat baik.

Indikator Kinerja

6. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BALAI BESAR POM di Banda Aceh**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Table 26. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness Indeks*) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	81	82,61	101,99 % 	Sangat Baik

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Responden dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM yang berusia 17-65 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer*

Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online* yang dapat dimonitor secara *real-time* melalui *dashboard monitoring* pada: <https://surveiskkm.pom.go.id>

Indeks Kesadaran Masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

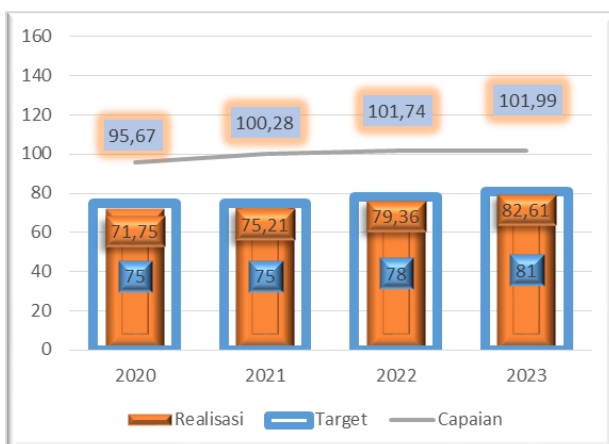
Pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Indeks Kesadaran dan Kepuasan yang digunakan yaitu skala 0 - 100 dengan kategori sebagai berikut:

Kategori	Skala
Tidak Baik / Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 diperoleh sebesar 82,61 dan persentase capaian target indikator sasaran

tersebut adalah sebesar **101,99 %** dengan kategori **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 18 Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022, dimana nilai Indeks tahun 2023 meningkat sebesar 2,15 poin. Hal ini merupakan hasil dari upaya Balai Besar POM di Banda Aceh untuk memberikan layanan publik sampai ke pelosok negeri bahkan kecamatan terpencil, Edukasi secara langsung misalnya melalui Inovasi Sanger Ureueng Aceh dan JANET (Jawab Netizen), serta penyebaran informasi melalui media sosial/ media komunikasi. Layanan langsung kepada masyarakat ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

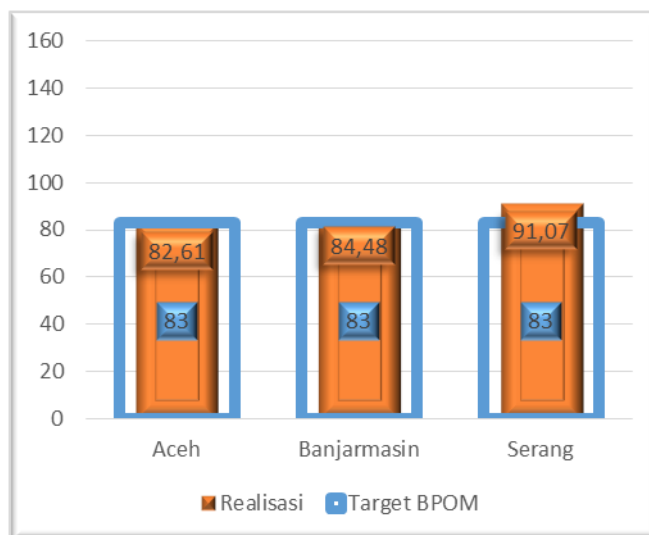
Table 27. Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banda Aceh	84	82,61	98,34%	Akan Tercapai

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 sebesar 82,61 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dimana nilai target

sebesar 84, dengan capaian sebesar 98,34% dengan kategori "Akan Tercapai". Oleh sebab itu Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 19 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 dengan Balai setara dan Capaian Nasional

Berdasarkan grafik di atas, bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 dengan

nilai tertinggi yaitu Balai Besar POM di Serang (91,07), diikuti Balai Besar POM di Bnajarmasin (84,48) dan yang terendah yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh (82,61). Bila di dibandingkan dengan target Nasional hanya Balai Besar POM di Serang dan Banjarmasin memiliki realisasi nilai indeks diatas target nasional, sedangkan Balai Besar POM di Banda Aceh masih di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jumlah responden pada survei pengukuran tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan tahun 2023 adalah sebanyak 540 responden. Aspek pembentuk Indeks Kesadran Masyarakat yang diperoleh dari ketiga aspek berada pada kategori Baik. Indikator yang tertinggi adalah pengetahuan masyarakat yaitu 89,32 (Kategori Baik) dan sikap masyarakat 88,16 (Kategori Baik). Sementara itu, perilaku merupakan indikator kesadaran dengan nilai

yang terendah yaitu sebesar 76,51 (Kategori Baik). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun perlu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Table 28. Indeks Kesadaran Masyarakat

Indeks Kesadaran Masyarakat						
Aspek	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan Olahan	Indeks
Pengetahuan	88,43	82,13	82,14	83,87	86,36	84,96
Sikap	88,57	88,03	87,64	87,5	88,02	88,08
Perilaku	78,34	73,59	71,9	75,58	73,49	74,79
Indeks	85,11	81,25	80,56	82,32	82,63	82,61

Hasil survei Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2023 perkomoditi seluruhnya berada pada kategori Baik, dengan rincian sebagai berikut:

- Obat : 85.11 (Baik/Puas)
- Obat Tradisional : 81.25 (Baik/Puas)
- Suplemen Kesehatan : 80.56 (Baik/Puas)
- Kosmetik : 82.32 (Baik/Puas)
- Pangan Olahan : 82.63 (Baik/Puas)

Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variable pada aspek pengetahuan dan sikap, variable tertinggi yakni terkait kedaluwarsa dan yang perlu upaya peningkatan adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variable tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang perlu ditingkatkan adalah membaca informasi pada label.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE), Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio lokal, bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan, diantaranya

melalui penggerakan Posyandu, mengencarkan promosi penggunaan tagline Cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM *Mobile* melalui berbagai media. Serta keragaman materi pada saat dilakukan penyuluhan/KIE yang di sampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan cara meningkatkan konten/informasi edukasi yang menarik.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 29. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banda Aceh	56,235,000	54,740,400	97,34 %	101,99 %	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 telah digunakan secara efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023, diantaranya dengan cara:

- Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga, terutama di daerah dengan melibatkan Kader Desa Pangan Aman (Kader Keluarga, Kader Sekolah

dan Kader Masyarakat), Kader PJAS (Kepala Sekolah, Komite, Guru dan Siswa) dan Fasilitator Pasar Pangan Aman (Petugas Pasar).

- Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan untuk menyebarkan informasi Keamanan Obat dan Makanan melalui pesan Cek Klik dengan melibatkan Anggota SAKA POM se-Aceh dan Kader Sanger Ureueng Aceh.
- Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat, terutama konten di medsos dengan update berita terkini seputar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.
- Kegiatan Penyebaran Informasi melalui Media sosial yang dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh misalnya Instagram, Subsitusi, X, Tiktok, Youtube, WhatsApp dan Facebook. Selama tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh telah menayangkan 1267 layanan informasi melalui kanal media sosial tersebut dengan topik antara lain Pangan Aman tanggungjawab bersama, Kosmetik Aman, Obat Tradisional Aman, Suplemen Kesehatan Aman, Cek KLIK, Klarifikasi BPOM tentang berbagai kasus Obat dan Makanan, Penggunaan Obat secara Rasional, BPOM Bergerak Menindak, Perangi Penyalahgunaan Obat, Kolaborasi pengawasan Obat dan Makanan, dll. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor.

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal Sebelumnya

Table 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023

		Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah
			Belum		

No.	Rekomendasi	Selesai	Rencana Aksi	Time line		Rencana Aksi
1.	Kegiatan KIE yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Telah dilaksanakan KIE tentang Obat dan Makanan Aman, P4GN dan Cek KLIK serta BPOM Mobile	-	-	Banyak yang tidak mengetahui bagaimana mengenali bahaya Obat dan Makanan Ilegal dan Bahan berbahaya yang sering di tambahkan pada pangan dan kosmetik Banyak yang masih belum pahan keterkaitan BPOM dengan materi P4GN dan banyaknya pertanyaan terkait legalitas produk melalui Medsos	Tingkat Pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan serta P4GN meningkat
2.	Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendesiminasikan materi terkait keamanan pangan	Publikasi melalui TV Radio lokal, media cetak dan infografis di media sosial	-	-	Penyebaran informasi belum menyebar secara menyeluruh di Prov. Aceh Dan informasi yang disampaikan kurang menarik	Publikasi dilakukan dengan lebih kekenian dengan melibatkan Anggota SAKA POM dalam penyebaran informasi berbasis digital

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dan interim memberikan manfaat baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro

Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, perguruan tinggi, media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Selama ini kerjasama Balai Besar POM di Banda Aceh dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh


Sasaran Kegiatan 3 dicapai dengan NSS 104,03 dengan kategori sangat baik. Capaian Kinerja Tiga IKU yang dikelola dalam Sasaran Kegiatan 3 berhasil melampaui target. Realisasi yang telah melampaui target menunjukkan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh telah dirasakan langsung manfaatnya.

Indikator Kinerja

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 31. Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	96,14	102,93 	Sangat Baik

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara daring dan luring dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi.

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17).
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110).
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230).

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan

terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.

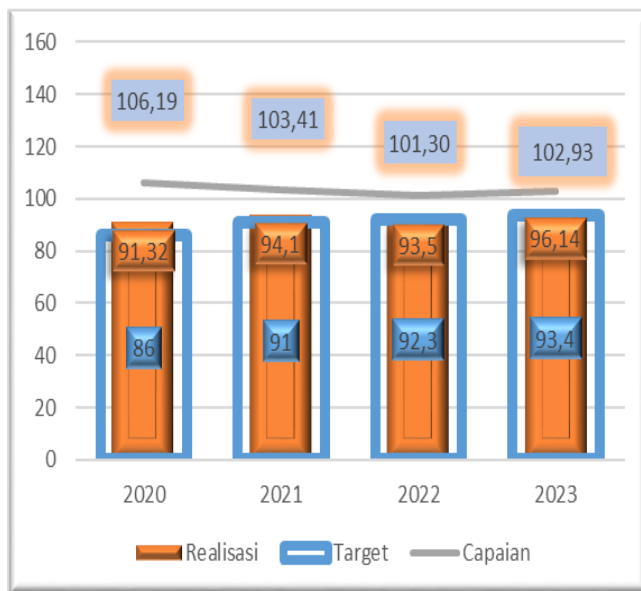
Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- Aspek bimbingan dan pembinaan.
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.
- Aspek penanganan saran dan masukan.
- Aspek manfaat.
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Pada tahun 2023, dari survei yang disampaikan kepada pelaku usaha diperoleh hasil Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 96,14%. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu 102,93% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 20. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 sampai tahun 2023

Berdasarkan gambar, diketahui bahwa terdapat kenaikan pencapaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat

dan makanan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, tetapi masih dalam kategori sangat baik. Untuk tetap dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian perlu adanya komitmen serta dukungan dari setiap unit terkait untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha obat dan makanan terutama UMKM.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

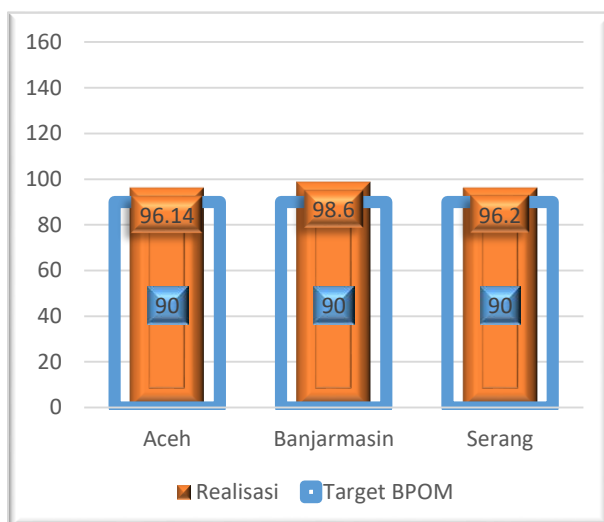
Table 32. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	94,6	96,14	101,63 ▲	Tercapai / Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	96,2	96,14	99,37 ▲	Akan Tercapai

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 sudah mencapai target

renstra 2024 dengan kategori tercapai/melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan menjadi 96.2. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan diharapkan capaian kinerja tahun 2024 dapat tercapai disertai upaya strategi peningkatan pelayanan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional



Gambar 21. Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan gambar disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan

makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banda Aceh. Realisasi ketiga balai yang diperbandingkan sudah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 90%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dilakukan terhadap 79 responden dengan 6 kegiatan bimbingan dan pendampingan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha ini diperoleh dari 6 (empat) Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP). Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha yang dilakukan yaitu : Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pelaku Usaha Kosmetika Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023, Desk/Pendampingan CDOB Balai Besar

POM di Banda Aceh Tahun 2023, Bimbingan Teknis CPPOB Bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023, dan Bimbingan Teknis Bagi UMK Obat Tradisional , Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023, Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan Balai Besar POM di Banda Aceh.

Realisasi yang telah melampaui target menunjukkan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh telah dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha baik pada saat bimbingan teknis ataupun desk registrasi. Bimbingan teknis yang diberikan terkait CPPOB, CPKB, CPOTB, dan Bimtek membantu pelaku usaha dalam pembuatan denah bangunan/ layout sarana produksi dan penyusunan dokumen yang digunakan pada saat pengajuan permohonan. Hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan permintaan perbaikan akibat tidak sesuai dengan persyaratan dan agar lebih cepat mendapatkan persetujuan dari UPT Pusat BPOM.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi UMK Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023 mendapat nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan KBP lainnya. Kegiatan yang dilakukan secara daring menjadi salah satu penyebab rendahnya kepuasan pelaku usaha terhadap KBP ini sehingga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan KBP ini secara daring tidak memperoleh hasil maksimal karena kendala jaringan yang menyebabkan suara atau gambar tidak dapat diterima dan terbatasnya interaksi antara peserta dengan narasumber.

Untuk dapat lebih meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh perlu memperbaiki kurikulum materi bimbingan teknis agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan dalam proses pendaftaran produk serta memperbesar *bandwith* saat sedang melaksanakan KBP yang dilakukan secara daring.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 33. Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	75.872.000	75.863.700	99.99 %	102,93%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

g. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Hasil survei pada masing-masing kegiatan bimbingan dan pembinaan memiliki sebaran hasil yang variatif. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, sedangkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan dengan metode daring memberikan nilai yang lebih rendah. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan secara tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih baik antara pelaku usaha dengan narasumber. Demikian pula untuk kegiatan bimbingan dan pembinaan dalam bentuk desk dimana pelaku usaha akan menerima secara langsung hasil desk saat itu. Kegiatan pembinaan dan pendampingan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh adanya program/kegiatan sebagai berikut:

Table 34. Hasil Survei Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) Tahun 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Metode	Nilai
1	Bimtek Pelaku Usaha Kosmetika Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023	Mandiri	Daring	95,74
2	Desk/Pendampingan CDOB Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023	Mandiri	Tatap Muka	100,00
3	Bimbingan Teknis CPPOB Bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023	Mandiri	Tatap Muka	95,75
4	Bimbingan Teknis Bagi UMK Obat Tradisional , Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023	Mandiri	Daring	88,58
5	Sosialisasi Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BALAI BESAR POM di Aceh Tahun 2023	Kerja sama unit lain	Tatap Muka	97,31
6	Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BALAI BESAR POM di Aceh Tahun 2023	Kerja sama unit lain	Tatap Muka	99,47

- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey	Monev pada laporan periodik	-	-	Mempertahankan nilai survei sementara per bulan agar di bulan berikutnya tetap sesuai target	Nilai Indeks tahunan IKEPU di atas target
2.	Menindaklanjuti saran dan masukan responden	Membuat format-format dokumen terkait CPOTB, CPKB dan CPPOB	-	-	Belum tersedia format dokumen	Sudah tersedia format dokumen
3.	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Petugas BPOM Pusat	Melalui saluran komunikasi aktif	-	-	Petugas aktif mendampingi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan	Petugas aktif mendampingi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan

Seluruh rekomendasi untuk pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sudah dilaksanakan seluruhnya sehingga indikator ini dapat tercapai dengan kategori sangat baik.


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan laporan interim, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target untuk tahun 2023, dan ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring hasil survey dan melaksanakan rekomendasi pada triwulan sebelumnya.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 36. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73.62	76,56	103,99 	Sangat baik

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

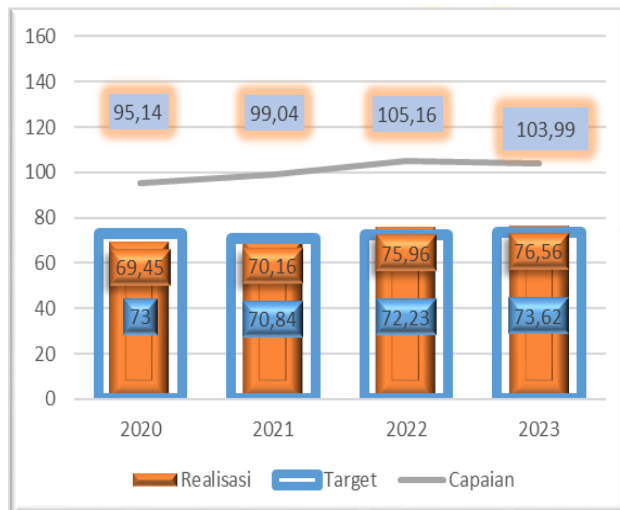
1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada tahun 2023 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan nilai 76,56. Survei dilakukan terhadap 5 komoditi yang diawasi BPOM dengan hasil survei sebagai berikut:

- Obat : 77.44 (Baik/Puas)
- Obat Tradisional : 76.76 (Baik/Puas)
- Suplemen Kesehatan : 75.92 (Baik/Puas)
- Kosmetik : 75.90 (Baik/Puas)
- Pangan Olaha : 76.18 (Baik/Puas)

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 22 Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2023

Berdasarkan grafik, diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023 dibandingkan tahun 2020, 2021

dan 2022. Hal ini disebabkan adanya dukungan dan kerjasama serta komitmen dari setiap unit terkait untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat terkait pengawasan, penindakan, pemberian informasi serta jaminan keamanan obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

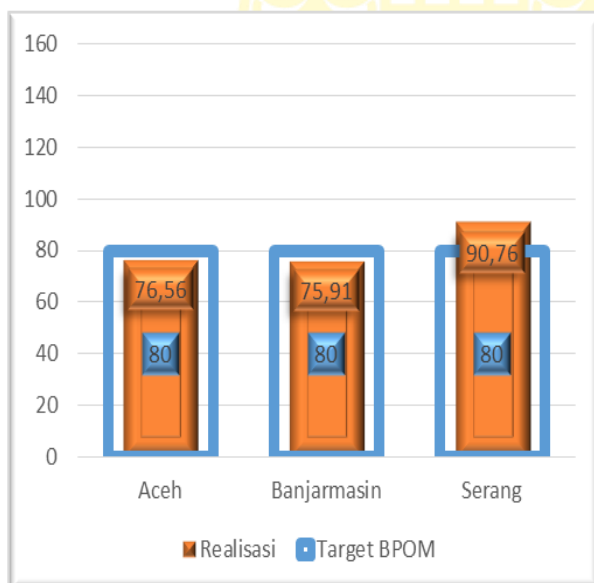
Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023 sudah mencapai target renstra 2024 dengan kategori “tercapai/melampaui”. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator indeks indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan menjadi 76.6. Dengan dilakukannya reviu

target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis mencapai target tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Table 37. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	75.01 %	76.56 %	102,07 % ▲	Tercapai/ Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	76.6	76.56	99.94 ▲	Akan Tercapai

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional



Gambar 23 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai setara dan Capaian Nasional

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM

di Serang (90,76), diikuti Balai Besar POM di Banda Aceh (76,56) dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banjarmasin (75,91). Dari ketiga balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Serang yang sudah mencapai target nasional.

e. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks kepuasan masyarakat diukur melalui kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang diinformasikan melalui fasilitas website yang *terupdate*, media social (WhatsApp, website, Instagram, X, Facebook, Youtube dan WA blast), media cetak (media koran lokal) dan media elektronik (televisi and radio). Balai Besar POM di Banda Aceh juga melakukan pemberian informasi sesuai permintaan stake holder, seperti topic terkait Keamanan pangan, Tata Cara Registrasi Pangan Olahan yang Baik, Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Iklan Kosmetik yang baik dan lainnya.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait isu-isu terkini yang terjadi di masyarakat seperti Sirup Obat Aman, Cikibul dan penggunaan Nitrogen cair pada makanan, Beras dan telur sintesis, Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Kosmetik mengandung merkuri, Bahan Berhaya pada pangan, Antimicrobial resistensi (AMR), Ayo buang sampah Obat, Penggunaan Obat secara rasional, P4GN dan Stunting. Adanya Tim KIE Balai Besar POM di Banda Aceh yang mampu membuat desain serta tampilan informasi di media sosial yang menarik, informatif, Kekinian dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan *follower* dan *engagement* media sosial BPOM Aceh. Layanan email maupun WhatsApp juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Meningkatkan intensifikasi KIE kepada masyarakat serta penyediaan layanan dengan pemanfaatan media sosial secara maksimal seperti tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM, Halo BPOM, website, dan alamat media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 38. Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	33.310.050	33.127.500	99.45 %	103.99%	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan.

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan agar menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan antara lain;

1. Pembaharuan data sarana dan produk yang akan diawasi, serta merencanakan kegiatan pada awal tahun secara proporsional dalam mengawasi semua produk Obat dan Makanan.
2. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan setiap akhir bulan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pada kegiatan bulan berikutnya hingga akhir tahun.
3. Melibatkan Lintas Sektor terkait Dinas Kesehatan, dan Disperdagkop dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal.
4. Melibatkan media cetak dan televisi untuk membantu menyebarkan informasi hasil pengawasan seperti aksi pemberantasan komestik illegal, kegiatan instensifikasi pangan hari besar keagamaan.
5. Melaksanakan MoU dengan organisasi kemasyarakatan & organisasi lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Muhammadiyah sebagai perpanjangan tangan BPOM dalam meningkatkan cakupan penyebaran Informasi, komunikasi, dan edukasi serta Pengawasan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

6. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) yang terdiri dari Pemda dan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 39. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey	Monev pada aplikasi	-	-
2.	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor melalui MOU	MOU BPS, UNMUHA sebagai perpanjang tangan B POM dalam memberikan informasi dan mengawasi peredaran Obat dan Makanan	-	-
3.	Pemanfaatan media social yang optimal terkait isu terkini	Aktif penyampaian informasi di media social terkait perkembangan terkini Sirup Obat Aman, Cikibul dan penggunaan Nitrogen cair pada makanan, Beras dan telur sintesis, Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Kosmetik mengandung merkuri, Bahan Berhaya pada pangan, Antimicrobial resistensi (AMR), Ayo buang sampah Obat, Penggunaan Obat secara rasional, P4GN dan Stunting	-	-

Seluruh rekomendasi untuk pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sudah dilaksanakan seluruhnya sehingga indikator ini dapat tercapai dengan kategori sangat baik.


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan telah dilakukan berbagai upaya yaitu penambahan anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi DIPA untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2023. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 40. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93	97.80	105.16 % 	Sangat Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori	Skala
Tidak Baik/Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM melalui aplikasi SAPA APIP (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka. Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2023.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui Aplikasi SapaAPIP dengan link <https://tinyurl.com/YanblikBALAI BESAR POM BandaAceh> pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan setelah layanan 100% selesai. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap penerima layanan Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik; Sertifikasi cara distribusi obat yang baik; sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B; pengujian Obat dan Makanan; Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; dan Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Pelaksanaan layanan publik di Balai Besar POM di Banda Aceh, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang “**sangat Baik**”, dengan nilai SKM **97.80**, menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 yang mencapai nilai 91,93.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 24 Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2023

Berdasarkan grafik diatas, realisasi dan capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 yaitu 97,80 dimana terjadi peningkatan capaian bila dibandingkan dengan tahun

tahun 2022 yaitu 91,93 sebanyak 5.87 point peningkatan. Capaian tahun 2020 hingga 2023 terus meningkat. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dengan penetapan kebijakan pelayanan publik sesuai ketentuan, percepatan timeline hasil uji, penyelesaian pelayanan publik, peningkatan sarana prasarana dan kompetensi petugas layanan publik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

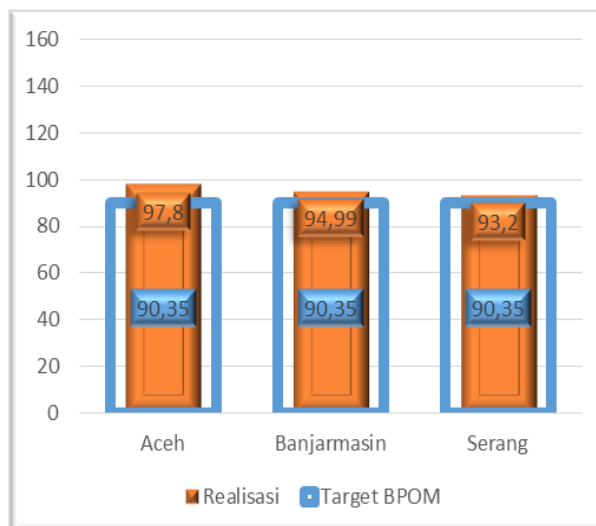
Table 41. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan target renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98,0	97,80	99,80 %	Akan Tercapai
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	98,25	97,80	99.54	Akan Tercapai

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 sebesar 97,80 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori “Akan Tercapai”. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

BPOM menjadi 98.25. Penetapan target 2024 berdasarkan realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reuiu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 25 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan Balai setara dan Capaian Nasional

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh (97,80), dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar

POM di Banjarmasin (94,99), dan Balai Besar POM di Serang (93,20). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 90,35, maka capaian dari ketiga balai telah melampaui nilai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil SKM tahun 2022, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 06 Juni 2023 dengan keluaran Standar Pelayanan Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada tahun 2023 Jumlah responden penerima layanan diperoleh sebanyak 99 orang responden. Pengolahan data SKM menggunakan Aplikasi sapaapip.pom.go.id dan

diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai SKM per Jenis Layanan





Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	98.08	98.08	97.44	97.44	98.08	98.72	98.08	98.08	98.72	98.08
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik golongan B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengujian Obat dan Makanan	96.67	95.71	94.29	95.24	94.29	96.67	96.67	95.24	92.86	95.29
Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	100	100	99.65	99.48	100	100	100	100	100	99.90
Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Nilai SKM per unsur dan unit Layanan

Unsur Pelayanan		2022	2023	Naik
U1	Persyaratan	91,16	98,32	7,16

U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	90,40	97,98	7,58
U3	Waktu Penyelesaian	90,99	97,19	6,2
U4	Biaya/Tarif	89,39	97,47	8,08
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,16	97,47	6,31
U6	Kompetensi Pelaksana	94,70	98,48	3,78
U7	Perilaku Pelaksana	94,70	98,32	3,62
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	93,69	97,81	4,12
U9	Sarana dan Prasarana	91,16	97,14	5,98
	Nilai SKM Unit Layanan	91,93	97,80	5,87

Keterangan:

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
	: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Dari Sembilan Jenis layanan yang tertuang pada Standar Pelayanan Balai Besar POM di Banda Aceh, hanya enam Jenis layanan yang tersedia pada menu pengukuran di aplikasi sapaapip.pom.go.id, sehingga dua Jenis Layanan yaitu SKI/SKE serta Penerbitan rekomendasi notifikasi kosmetika tidak tergambarkan dalam pengukuran kepuasan masyarakat pada Tahun 2023 ini. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu : Waktu penyelesaian pada layanan Izin Penerapan CPPOB, Tarif dan Biaya pada Layanan Pengujian Obat dan Makanan, serta Mekanisme pengaduan pada Layanan

Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Unsur Layanan yang termasuk tiga tertinggi yaitu Kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta Persyaratan pelayanan

Peningkatan capaian pada tahun 2023 diperoleh dari berbagai faktor diantaranya yaitu meningkatnya kompetensi petugas layanan dan petugas layanan publik yang selalu menerapkan budaya pelayanan 5S dalam melayani responden, mulai dari satpam, petugas layanan sampai dengan petugas pendamping registrasi, baik di MPP dan UPP Balai Besar POM di Banda Aceh dan peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan pelayanan publik tingkat dasar dan lanjutan, Fasilitas pelayanan yang sudah memenuhi sarana dan prasarana serta mekanisme dan prosedur pelayanan yang sudah baku sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan mencakup seluruh aspek termasuk pengaduan. Produk layanan yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan serta tarif dan biaya yang diproses setelah mendapatkan persetujuan dan tanpa paksaan, pemberian pelayanan tanpa adanya membeda-bedakan karena seluruh pelanggan merupakan prioritas sehingga waktu proses disesuaikan dan diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan peraturan, selanjutnya pemilihan responden yang benar benar telah mendapati layanan sampai selesai (100%).

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Table 42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	153.796.500	152.412.733	99.10	105.16	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan layanan publik dan peningkatan kompetensi pelaksanaan layanan publik dalam rangka pencapaian output indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh yang meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator tahun 2023 yaitu pendampingan UMKM melalui inovasi e-learning korporasi, program spesifik daerah seperti inovasi Sanger Ureueng Aceh dan publikasi terkait PNBP, hasil pengawasan yang update pada media social maupun SIPPN, Timeline pengujian yang semakin cepat, dan selalu mengupdate kompetensi petugas layanan serta pemenuhan sarana prasarana.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 43. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Pendampingan UMKM melalui inovasi	Publikasi PNBP dan pendampingan UMK melalui inovasi <i>e-learning</i> korporasi	-	-	Proses pendampingan cenderung lambat	Proses pendampingan lebih cepat dan UMK bisa akses informasi terkait pengurusan

						pendaftaran produk 24 jam di aplikasi <i>e-learning</i> korporasi
2.	Peningkatan kompetensi Petugas Layanan	Pelaksanaan Pelatih untuk petugas Layanan seperti pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, pelatihan media sosial	-	-	Kompetensi petugas layanan belum terupdate	Kompetensi petugas meningkat dan memiliki pengetahuan yang terupdate
3	Pengurusan rekomendasi CPPOB	Pengurusan CPPOB bertahap dilakukan pendampingan oleh fasilitator yang telah di rekrut oleh BPOM mulai dari pembuatan SSOP, login di OSS dengan pemilihan PBUMKU sampai dengan pendampingan di web e srtifikasi.pom.go.id	-	-	Pengurusan rekomendasi CPPOB membutuhkan waktu penyelesaian yang lama	Adanya petugas tambahan yaitu fasilitator UMK yang memiliki kompetensi terkait pengurusan CPPOB sehingga pengurusan CPPOB lebih cepat
4	Peningkatan Layanan Pengujian di BPOM	Percepatan penyelesaian waktu pengujian dan revisi Standar Pelayanan	-	-	Timeline hasil uji lebih lama dibandingkan dengan instansi lain di beberapa parameter uji	Sudah dilakukan revisi pada Standar Pelayanan Pengujian dengan jangka waktu pelayanan pengujian pada Uji Kimia: 1 s.d 6 HK dan Uji Mikrobiologi: 5 s.d 9 HK

5.	Penyebaran informasi terkait layanan Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	Publikasi Layanan Pengaduan di berbagai media elektronik	-	-	Masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengaduan secara online	Publikasi di media sosial terkait SP4N-LAPOR dan menu layanan pengaduan pada subsite PPID agar masyarakat bisa menggunakan akses dimaksud secara online
----	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---	---	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja kedepannya sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh


Sasaran Kegiatan 4 dicapai dengan NSS 109,34. Enam IKU berkinerja sangat baik namun IKU 16 Indeks Pelayanan Publik belum mencapai target dengan capaian kinerja 99.32.

Indikator Kinerja

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 44. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100 	Baik

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus: $(A+B+C+D) / 4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

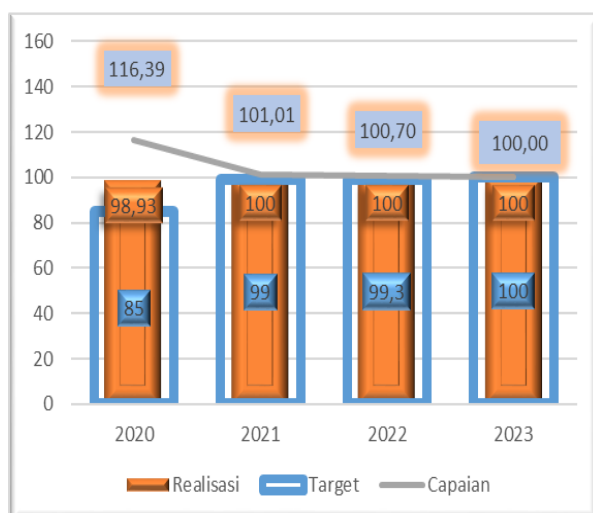
Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan

distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal dan KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.
- d. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 278 keputusan/rekomendasi dari 278 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2023

Untuk tahun 2023, terdapat penurunan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan tahun 2022, 2021

dan tahun 2020 namun target tetap tercapai. Hal ini dikarenakan target tahun 2023 sudah maksimal pada 100% dan terealisasi seluruhnya sebesar 100%. Komitmen bersama dalam pelaksanaan sistem sangat mendukung hingga rekomendasi dapat dilaksanakan seluruhnya.

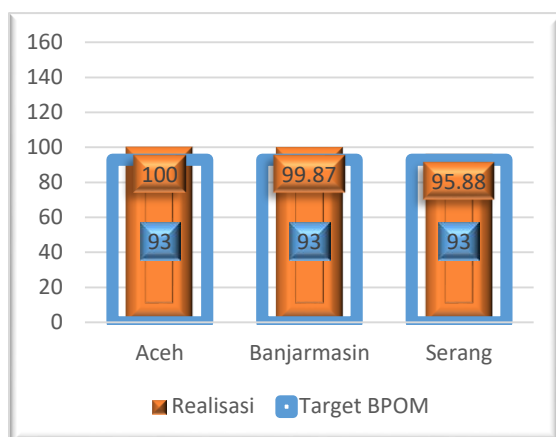
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 telah mencapai target renstra untuk tahun 2024 dengan kategori tercapai. Untuk dapat mempertahankan capaian yang telah dicapai sangat diperlukan kerjasama dan komitmen bersama semua unit terkait.

Table 45. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100 ▲	Tercapai / Melampaui

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional



Gambar 27. Perbandingan realisasi persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan balai lain yang sejenis dengan target nasional

Berdasarkan gambar disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang

dilaksanakan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh dimana seluruh rekomendasi hasil inspeksi sarana telah ditindaklanjuti. Untuk realisasi terendah adalah Balai Besar POM di Serang. Ketiga balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional 93%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil realisasi dan capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2023. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tercapai 100% dimana seluruh rekomendasi sudah ditindaklanjuti berupa surat sanksi administratif sebanyak 278 rekomendasi dan telah diterima pelaku usaha. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100%, dimana seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat seperti surat pelaporan hasil pengawasan sarana dan produk sudah ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 49 hasil keputusan/rekomendasi. Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100% karena pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 2 laporan pengaduan. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh

Pusat/UPT tercapai 100% karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti. Indikator ini tercapai karena semakin baiknya kinerja dan respon Balai Besar POM di Banda Aceh menindaklanjuti serta menangani rekomendasi baik yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, Pusat, UPT lain maupun lintas sektor serta dalam respon cepat terkait isu-isu terkini pengawasan obat dan makanan. Koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dengan pihak-pihak terkait serta pengelolaan administrasi rekomendasi internal Balai Besar POM di Banda Aceh telah dikelola dengan baik dengan adanya penetapan timeline penerbitan tindak lanjut sebagai bentuk percepatan tindak lanjut yaitu 7 hari kerja sejak diterbitkannya rekomendasi. Rekomendasi dari lintas sektor maupun pemangku kepentingan terkait obat dan makanan yang ditindak lanjuti segera merupakan respon aktif Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengatasi dan mengelola isu-isu maupun permasalahan obat dan makanan yang terjadi khususnya permasalahan khusus di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Upaya selanjutnya untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator ini adalah dengan selalui aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, koordinasi aktif dan melalui saluran komunikasi yang ada antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan pusat dan dengan UPT lain, dan melakukan koordinasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di Propinsi Aceh terkait isu dan permasalahan obat dan makanan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 46. Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	179,444,000	177,242,405	98,77	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator persentase kinerja keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 25 sarana, dan dalam rangka pengaduan konsumen sebanyak 2 yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Banda Aceh.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Pusat terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), pemantauan produk *public warning*, *recall* dan produk terkait isu-isu yang beredar di masyarakat.
- Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan bersama dengan lintas sektor/pemangku kepentingan terkait obat dan makanan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan monev rekomendasi yang belum dilaksanakan	Ketua tim melakukan monev aktif terhadap rekomendasi yang diterima untuk dilaksanakan	-	-	Terdapat beberapa rekomendasi pusat yang terlambat ditindaklanjuti	Semua rekomendasi yang diterima telah ditindaklanjuti
2.	Penetapan timeline membuat surat tindak lanjut 7 hari kerja	Tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai time line di bawah 7 hari kerja	-	-	Terdapat rekomendasi yang dilaksanakan lebih dari 7 hari kerja	Semua rekomendasi yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai timeline


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target, dan dipertahankan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang diterima dan diterbitkan, selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan pusat (Kedeputian I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh yang memerlukan tindak lanjut dari pusat.

11. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 48. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	69,27	111,73 	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:

% Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = $(A + B) / 2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

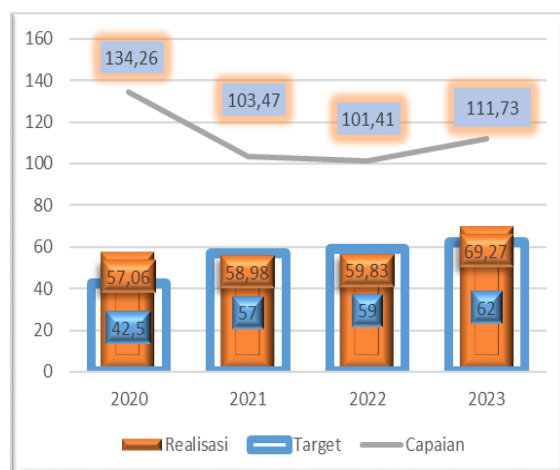
$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penertiban keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 278 surat rekomendasi. Dari surat yang

diterbitkan, sebanyak 189 pelaku usaha dan instansi terkait yang memberikan respon tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebesar 111,73% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 28. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun

2022, dan penurunan capaian dari tahun 2020 dan 2021. Tahun 2021 dilakukan penyesuaian target terhadap capaian tahun 2020 yang tidak dapat disimpulkan. Pemenuhan capaian target ini dapat dicapai dan dipertahankan karena komitmen bersama, komunikasi dan sinergitas yang baik dengan pelaku usaha dan lintas sektor terkait yang mendukung pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga terdapat peningkatan tindak lanjut oleh pelaku usaha.

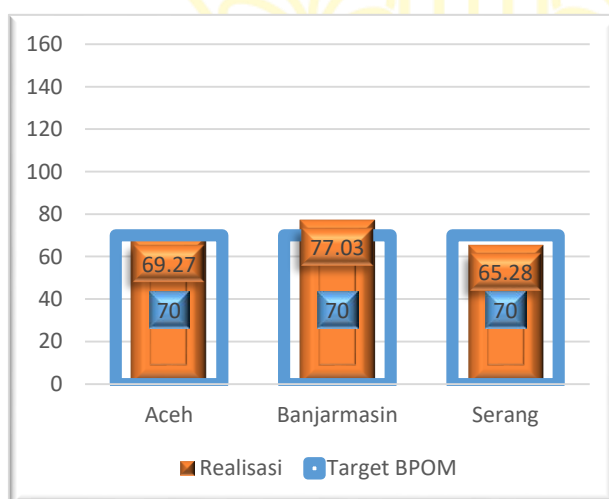
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Table 49. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	69,27	106,57% ▲	Tercapai / Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	69,3	69,27	99,95 ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 sudah mencapai target renstra tahun 2024 dengan kriteria tercapai / melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan menjadi 69.3. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya yang lebih efektif dan berkesinambungan agar target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis / setara, dengan target nasional



Gambar 29. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan balai setara dan target Nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku

kepentingan untuk tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin, dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang. Dari 3 balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Banjarmasin yang mencapai target nasional. Balai Besar di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Serang masih berada di bawah target nasional walaupun Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Serang sudah mencapai target untuk tahun 2023.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 67,72%. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha meningkat dimana koordinasi dan komunikasi aktif terus dilakukan untuk percepatan respon tindak lanjut dari pelaku usaha dengan tetap melakukan sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, aktif menanyakan melalui telepon maupun WhatsApp ke sarana / pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 70,83%, capaian ini diperoleh karena petugas Balai Besar POM di Banda Aceh yang aktif menanyakan melalui saluran komunikasi WhatsApp dan telepon ke Dinas Kesehatan agar memberikan tindak lanjut secara administrative terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi yang dikirimkan Balai Besar POM di Banda Aceh. Dari hasil tersebut diatas, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sektor) mencapai target yang ditetapkan. Untuk dapat terus meningkatkan serta mempertahankan capaian terhadap indikator keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sesuai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan dan langkah strategis secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kefarmasian dengan melakukan pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA maupun melakukan Bimtek CAPA dan monev tindak lanjut rutin terhadap rekomendasi yang belum mendapat respon/tindak lanjut.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 50. Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	107,290,000	107,287,100	100	111,73	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

- Pembuatan tindak lanjut berupa CAPA langsung ditempatkan oleh sarana khususnya sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh agar memberikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana walaupun belum maksimal dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi terkait pembuata CAPA hasil pemeriksaan.
- Komunikasi aktif dan koordinasi yang berkesinambungan dengan lintas sektor untuk meningkatkan komitmen dalam efektivitas pengawasan obat dan makanan.
- Masih kurangnya kontrol/monitoring dan evaluasi Balai Besar POM di Banda

Aceh terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha apakah sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atau tidak sesuai timeline yang diberikan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 51. Tindak lanjut rekomendasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha	Petugas menyampaikan pada pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan	-	-	Pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban menindaklanjuti rekomendasi	Peningkatan pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
2.	Meningkatkan monev surat tindak lanjut yang belum direspon pelaku usaha dan lintas sektor.	Monev aktif oleh ketua tim beserta petugas terhadap surat tindak lanjut yang belum direspon pelaku usaha dan lintas sektor	-	-	Kurangnya monev ketua tim beserta petugas terhadap surat tindak lanjut yang belum direspon	Ketua tim dan petugas telah melakukan monev terhadap surat yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor
3	Komunikasi aktif dengan pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tindak lanjut	Komunikasi melalui telepon dan whatsapp dengan pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan	-	-	Pelaku usaha dan lintas sektor tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan	Peningkatan pelaku usaha dan lintas sektor yang menindaklanjuti secara administratif rekomendasi yang diberikan

Rekomendasi pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga target pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat tercapai dengan kriteria “Sangat Baik”.


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target, dan dipertahankan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor dengan melakukan komunikasi aktif untuk meminta respon yang ditindaklanjuti secara administratif.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 52. *Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100 	Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

Indikator persentase Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Yang dimaksud **tepat waktu** adalah **tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dan lainnya. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 diperoleh dari 351 sertifikat yang diterbitkan dari semua permohonan yang diterima. Seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi lainnya seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan sesuai dengan ketentuan timeline masing-masing layanan. Persentase capaian sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 30. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 hingga 2023

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan tahun 2022 sudah mencapai target 100%,

dan meningkat dibandingkan tahun 2020, dikarenakan target tahun 2020 sebesar 85% dan capaian 100%. Tahun 2022 dan 2023 target yang ditetapkan sudah maksimal 100% dan tercapai sesuai target. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari setiap unit terkait untuk mencapai penyelesaian sertifikasi sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 tetap dapat dipertahankan.

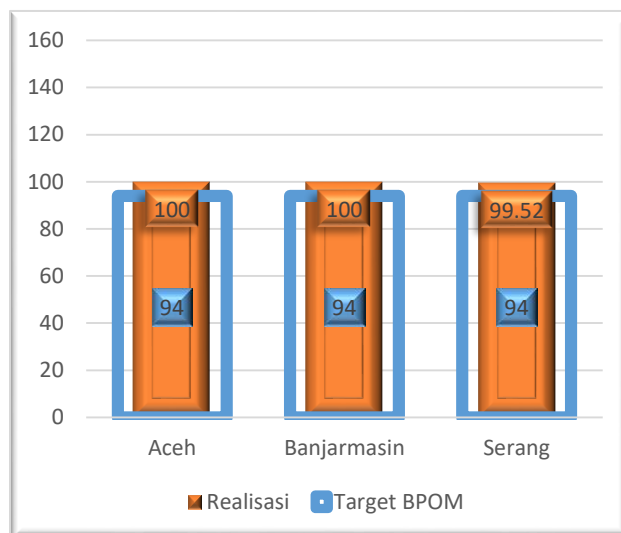
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Table 53. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100 ▲	Tercapai

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 sudah mencapai target renstra tahun 2024. Walaupun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar capaian renstra sampai tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara, dengan target nasional



Gambar 31. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional

Berdasarkan gambar disamping dapat disimpulkan bahwa persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 yang

terendah adalah Balai Besar POM di Serang sebesar 99,52%, sedangkan Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Banjarmasin sudah mencapai realisasi 100%. Realisasi ketiga balai yang diperbandingkan sudah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 94%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan penerbitan sertifikat pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 255 sertifikat (77,74%) dan sisanya 73 keputusan (22,26%) terdiri dari 34 Izin penerapan CPPOB (10,37%), hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi IP CPPOB 24 sarana (7,32%), 1 rekomendasi (0,30%) penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), 4 rekomendasi sarana Obat Tradisional dalam rangkap CPOTB Bertahap (1,22%), 1 rekomendasi surat permohonan aspek cara produksi kosmetika yang baik (0,30%), 1 rekomendasi sarana pemohon notifikasi (0,30%), dan 8 hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB (2,44%). Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan tidak melakukan pengujian sampel pihak ketiga sehingga layanan pengujian sampel yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh tidak termasuk untuk

wilayah kerja Loka Aceh Tengah dan Loka Aceh Selatan.

Penyelesaian 273 sertifikat sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu didukung dengan kompetensi dan komitmen personil laboratorium pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu dengan memangkas *timeline* pengujian hingga terbit sertifikat hasil uji sampel barang bukti tindak pidana narkotika dari 10 HK menjadi 2 HK saja. Sedangkan untuk pengujian sampel selain barang bukti tindak pidana narkotika dapat terpenuhi dengan dukungan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM di laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh. Koordinasi yang baik antara subkelompok substansi sertifikasi dengan kelompok substansi pengujian dan tim penerima sampel untuk penyelesaian pengujian sampel pihak ke-tiga juga menjadi faktor penting keberhasilan keputusan sertifikasi dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu sebanyak 73 keputusan sertifikasi lainnya yang dapat diselesaikan sesuai timeline layanan dapat tercapai dengan didukung pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan registrasi; adanya *desk-konsultasi* registrasi dan *desk-CAPA (Corrective Action Preventive Action)* atas temuan audit yang dilakukan. Selain itu, keputusan sertifikasi dapat sesuai dengan timeline didukung oleh komitmen dan kompetensi petugas sertifikasi dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk, Evaluasi secara berjenjang dilaksanakan dengan baik.

Sebagai implementasi Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya menyebabkan adanya penyesuaian dalam penerbitan proses perizinan yaitu proses perizinan awal dimulai dari aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan SKPD terkait lainnya agar terdapat kesamaan persepsi antar petugas sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dalam setiap tahapan perizinan.

Meskipun sudah mencapai target, masih diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja agar tetap mencapai target yang ditetapkan secara maksimal, antara lain dengan:

1. Koordinasi dengan lintas sektor dan Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi untuk

- pengembangan serta memberikan stimulus kepada UMKM agar target UMKM mendapatkan manfaat seperti pengembangan jaringan distribusi dan permodalan.
2. Melakukan program desk CAPA secara berkesinambungan dan terprogram secara onsite maupun daring. termasuk yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA.
 3. Meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi serta *sharing knowledge* antara petugas di SubKelompok Substansi Sertifikasi dan Kelompok Subtansi Infokom.
 4. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik.
 5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi melalui Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
 6. Memperkuat layanan prima dalam pendampingan e-sertifikasi untuk produk pangan, kosmetika dan Obat Tradisional.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Table 54. Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	491.354.000	471.871.847	96.04 %	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target jumlah keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaku usaha. Pelatihan yang diikuti oleh petugas yaitu pelatihan fasilitator pangan, kosmetik dan OTSK, pelatihan inspektur kosmetik, sosialisasi dan bimtek terkait regristrasi pangan olahan berbasis resiko, sosialisasi dan bimtek tentang penerapan SMKPO, dan pelatihan lainnya yang terkait dengan perizinan pangan dan OTSK.
2. Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian pihak ketiga.
3. Pelaksanaan program “KORPORASI” (Kolaborasi Fasilitasi UMK dalam Sertifikasi dan Izin Edar) Balai Besar POM di Banda Aceh bersama OPD terkait untuk berkolaborasi memfasilitasi UMK dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi izin edar obat tradisional, kosmetika dan pangan di Aceh guna meningkatkan pemenuhan mutu dan standar produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap produk UMK lokal di Aceh. Kegiatan Koorporasi meliputi:
 - a. Pembentukan fasilitator sehingga dapat mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi karena dapat memberikan layanan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan rekrutmen dan melatih 1 (satu) tenaga profesional dari luar, ditugaskan melakukan pendampingan secara intensif pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB dan registrasi izin edar.
 - b. Pelatihan Fasilitator Layanan Sertifikasi dan Izin Edar. Pelatihan Fasilitator telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023.
 - c. Pendampingan yang intensif terkait denah dan sertifikasi sarana produksi. Pendampingan dilakukan secara langsung ke sarana produksi melalui kegiatan asistensi dan kepada beberapa pelaku usaha secara *on the spot* pada saat

kegiatan bimbingan teknis cara produksi yang baik dengan metode *desk-consultation*

d. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang akan mengajukan layanan sertifikasi baik secara daring maupun luring. Salah satunya yaitu akan dilaksanakan pelaksanaan Bimtek e-Reg Pangan pada bulan Juli tahun 2023.

4. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi Aceh, Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke *both* Balai Besar POM di Banda Aceh yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 55. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Selesai			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.	Rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal	-	-	Belum ada tenaga fasilitator eksternal	Sudah ada tenaga fasilitator eksternal
2.	Akan terus dilakukan program desk CAPA yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumber daya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang	Desk Capa telah dilaksanakan pada TW I, II, III, dan IV	-	-	Pelaku usaha ada yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan CAPA	Pelaku usaha memahami CAPA yang diminta dan dapat menyelesaikan CAPA

	dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA					
3.	Memperkuat sosialisasi tentang tatacara pendaftaran produk	Petugas sertifikasi telah berkontribusi dalam memberikan layanan Jawab Netizen dan di publish di medsos Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	Belum tersedia konten di media sosial	Sudah tersedia konten di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat
4.	Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM (monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi).	Telah dilakukan pendampingan denah, pendampingan pemenuhan persyaratan izin penerapan CPPOB, pendampingan SPA SCPK dan CPOTB bertahap	-	-	Pelaku usaha ada yang belum memahami proses dan tatacara registrasi	Pelaku usaha memahami proses dan tatacara registrasi
5.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi olahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha kosmetik pada Maret 2023 ➤ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha pangan dan Obat Tradisional pada Maret 2023 	-	-	Pelaku usaha ada yang belum memahami proses dan tatacara	Pelaku usaha memahami proses dan tatacara
6.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk	Telah dilakukan rekrutmen dan	-	-	Belum ada fasilitator eksternal	Sudah ada fasilitator eksternal

	mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.	pelatihan fasilitator eksternal pada bulan April 2023				yang terlatih
--	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--	--	--	---------------

Rekomendasi pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga target pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat tercapai 100% dengan kategori baik.


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan laporan interim, pencapaian indikator ini telah tercapai seluruhnya sesuai target untuk tahun 2023, Rekomendasi pada laporan interim telah dilaksanakan sehingga capaian tetap dapat dipertahankan.

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 56. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71,62	110,18 	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

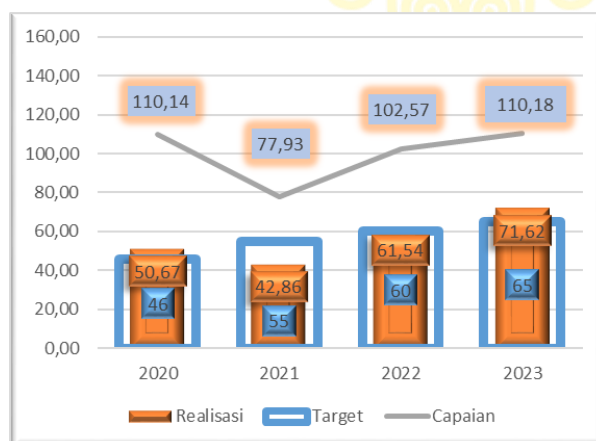
$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana Produksi obat dan makanan yang diperiksa Balai Besar POM di Banda Aceh meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP, sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan

perintah perbaikan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro. Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sebanyak 74 sarana yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian resiko dengan hasil pemeriksaan sebanyak 53 sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 21 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan sehingga persentase sarana yang diperiksa yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 71,62%. Dengan demikian capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target yaitu 110,18 dengan kriteria Sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 32. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2023.

Untuk tahun 2023, terdapat kenaikan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun

2020 dan tahun 2023. Penurunan capaian terjadi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020. Tercapainya indikator ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya yang

lebih aktif dari petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam membina sarana produksi obat dan makanan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

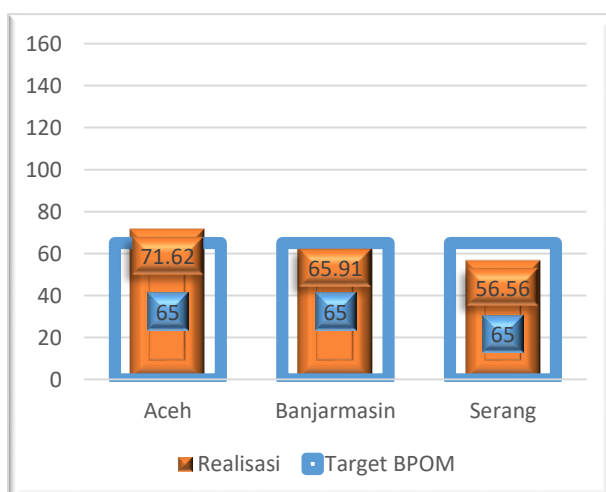
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Table 57. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70	71,62	102,31 ▲	Tercapai / Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	71,7	71,62	99,88 ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 sudah mencapai target renstra tahun 2024 dengan kriteria tercapai/melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan menjadi 71,7. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya peningkatan dan perbaikan untuk sarana produksi obat dan makanan agar target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara, dengan target nasional



Gambar 33. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan balai setara dan target nasional

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang

tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang. Dari 3 balai yang diperbandingkan, Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Banjarmasin telah mencapai target nasional, sedangkan Balai Besar POM di Serang tidak mencapai target nasional tahun 2023 yang ditetapkan yaitu sebesar 65%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria sangat baik. Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan / laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa. Pemeriksaan sarana produksi yang paling banyak dilakukan pemeriksaan didominasi oleh sarana produksi industri pangan, dari sebanyak 51 sarana industri pangan olahan yang diperiksa, sebanyak 36 sarana yang memenuhi ketentuan, dan untuk sarana produksi industri rumah tangga pangan dari 7 sarana, hanya 2 sarana yang memenuhi ketentuan. Hal ini disebabkan, masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan komitmen dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas terutama terkait hygiene dan sanitasi produksi makanan. Koordinasi dengan lintas sektor Dinas Kesehatan juga dilakukan untuk melakukan pembinaan baik berupa bimtek CPPIRT kepada pelaku usaha IRTP di wilayah kabupaten/kota.

Untuk sarana produksi usaha kecil obat tradisional sebanyak 1 sarana tidak memenuhi ketentuan dari 8 sarana UKOT yang diperiksa. Sarana UKOT yang tidak memenuhi ketentuan tersebut disebabkan belum lengkapnya dokumen dalam proses produksi sesuai persyaratan terhadap UKOT 2.

Sarana produksi UMOT yang diperiksa sebanyak 4 sarana dan industri kosmetik sebanyak 4 sarana sudah memenuhi ketentuan untuk semua sarana yang diperiksa. Selama tahun 2023, peningkatan kompetensi petugas dan sharing ilmu juga dilakukan untuk menyamakan persepsi untuk menyamakan persepsi dan memperkecil gap kompetensi antar petugas. Berbagai upaya telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh berupa pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi sesuai ketentuan dan cara produksi obat dan makanan yang baik, pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta peningkatan koordinasi dan pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Obat dan Makanan dengan lintas sektor. Upaya-upaya ini perlu dilakukan terus menerus supaya pelaku usaha lebih peduli terhadap keamanan produk obat dan makanan yang diproduksi dan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 58. Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	84,161,000	83,085,350	98,72	110,18	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator ini adalah berupa bimbingan teknis Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik bagi pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Peningkatan kompetensi petugas pengawas baik secara daring maupun luring guna pemerataan dan penyamaan persepsi terkait pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan, serta membuka layanan konsultasi dengan petugas yang kompeten untuk pendampingan bagi pelaku usahah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 59. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perbaikan terhadap metode penyusunan target pemeriksaan sarana dengan mengikutkan sarana baru	Inspeksi sarana baru yang telah selesai pendampingan oleh tim sertifikasi	-	-	Penetapan target berdasarkan analisis resiko sarana	Perbaikan penatapan target menyertakan sarana baru yang belum diperiksa
2.	Meningkatkan monev terhadap penyusunan sarana produksi yang diawasi	monev penyusunan target pemeriksaan	-	-	Kurangnya monev terhadap target pemeriksaan sarana	Meningkatkan monev penyusunan target pemeriksaan
3	Peningkatan kompetensi petugas oleh petugas yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan oleh inspektur senior/ketua tim.	Sosialisasi oleh petugas yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan oleh inspektur senior/ketua tim	-	-	Perbedaan persepsi petugas pemeriksaan	Persepsi yang sama petugas pemeriksaan

Rekomendasi pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga target pada indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dapat tercapai dengan kategori Sangat Baik.


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target untuk capaian tahunan, dimana pada laporan Interim I tercapai sebesar 86,54%, pada laporan Interim II tercapai sebesar 91,17% dan pada laporan Interim III tercapai sebesar 99,55%, capaian pada indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan sampai pelaporan interim III, sehingga perlu upaya lebih dan rekomendasi pada interim sebelumnya yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini.

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 60. *Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	85,42	104,17 	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

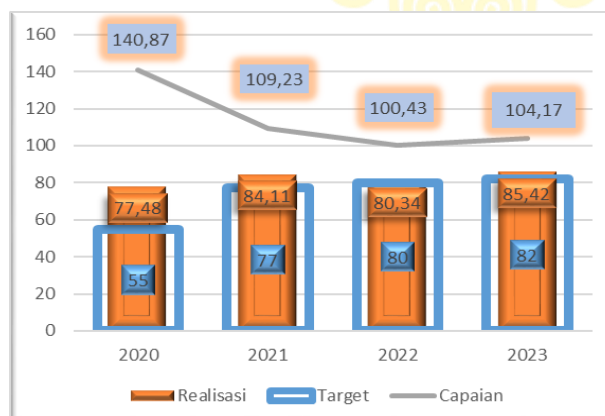
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat.

2. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
3. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Pada tahun 2023, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 912 sarana diperiksa dari target 896 sarana dengan hasil sebanyak 779 sarana Memenuhi Ketentuan dan 133 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu sebesar 85,42%. Dengan demikian capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 104,17% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya




Gambar 34. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga 2023

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 walaupun masih dalam kategori sangat baik. Realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

Tahun 2021 dilakukan penyesuaian target dikarenakan capaian tahun 2020 tidak dapat disimpulkan. capaian indikator ini dapat ditingkatkan dikarenakan adanya peningkatan sarana Memenuhi Ketentuan pada sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian Puskesmas, sarana obat tradisional dan sarana pangan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya.

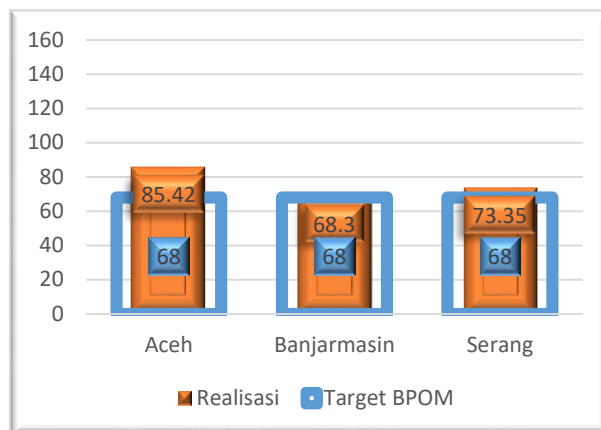
c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Table 61. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	85	85,42	100,49 	Tercapai / Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	85,5	85,42	99,90 	Akan Tercapai

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 sudah mencapai target renstra 2024 yaitu dengan kategori tercapai/melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reuiu target tahun 2024 untuk indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan menjadi 85,5. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reuiu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif untuk pembinaan sarana distribusi obat dan makanan agar target tahun 2024 dapat dicapai dan ditingkatkan.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai Lain yang sejenis / setara, dengan target nasional.**



Gambar 35. Perbandingan realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2023 yang

tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh, dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banjarmasin. Balai-balai yang diperbandingkan sudah mencapai target nasional tahun 2023 yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan saryanfar telah dilakukan sebanyak 361 sarana dari target 360 sarana dengan hasil sebanyak 291 sarana Memenuhi ketentuan (80,61%) dan 70 sarana Tidak memenuhi ketentuan (19,39%). Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri atas pemeriksaan pada PBF sebanyak 19 sarana dengan hasil 16 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada apotek sebanyak 90 sarana dengan hasil 67 sarana memenuhi ketentuan dan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada toko obat sebanyak 39 sarana dengan hasil 33 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada Instalasi Farmasi Propinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 17 sarana dan semuanya memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada rumah sakit sebanyak 45 sarana dengan hasil 38 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada klinik sebanyak 86 sarana dengan hasil 55 sarana memenuhi ketentuan dan 31 sarana memenuhi ketentuan. Sarana pelayanan kefarmasian yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu Instalasi Farmasi

kabupaten/kota dan puskesmas, dimana puskesmas di wilayah Aceh sudah banyak yang memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab farmasi di Puskesmas dan telah melakukan pengelolaan obat dengan baik. Berkurangnya ketidaksesuaian dengan kategori kritis maupun bersifat mayor sistemik terhadap pengelolaan obat sehingga hasil pemeriksaan bersifat pembinaan teknis maupun surat tindak lanjut administratif berupa peringatan menjadikan hasil pemeriksaan sarana Memenuhi Ketentuan. Sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan terutama didominasi oleh sarana apotek dan klinik, dimana masih terdapat apotek maupun klinik yang belum memiliki izin operasional dan penanggung jawab, melakukan pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang dapat menurunkan mutu produk.

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan telah dilakukan terhadap 551 sarana dari target sebanyak 536 sarana dengan hasil 488 sarana Memenuhi Ketentuan (88,57%) dan 63 sarana Tidak memenuhi ketentuan (12,43%). Pemeriksaan pada sarana obat tradisional sebanyak 63 sarana dengan hasil 58 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada sarana suplemen kesehatan sebanyak 9 sarana dengan hasil seluruhnya memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik sebanyak 308 sarana dengan 260 sarana memenuhi ketentuan dan 48 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada sarana distribusi pangan sebanyak 156 sarana dengan hasil 146 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik dimana masih banyaknya produk - produk tanpa izin edar dikarenakan tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, dan juga bertambahnya sarana-sarana distribusi baru yang belum pernah mendapat pembinaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, jumlah sarana yang memenuhi ketentuan meningkat dikarenakan semakin

meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya terutama terkait produk ilegal dan kedaluwarsa.

Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha dapat berupa bimbingan teknis seperti Bimtek CDOB, Sosialisasi peraturan terbaru maupun pembinaan langsung saat pemeriksaan sarana untuk selalu memenuhi ketentuan terkait cara distribusi obat dan makanan yang baik serta penerapan sanksi yang sesuai ketentuan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 62. Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	582,141,000	581,478,362	99,89	110,18	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja indikator ini antara lain:

- Pembinaan teknis secara intensif kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuang yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.

- Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor pada kegiatan intensifikasi pangan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru, Aksi kosmetik ilegal, aksi obat tradisional ilegal dan pemeriksaan bersama di sarana pelayanan kefarmasian dan pemeriksaan bersama penggunaan antibiotic pada pakan hewan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga target pada indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dapat tercapai dengan kriteria Sangat Baik.

Table 63. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi sesudah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha & penerapan sanksi yang sesuai	Pembinaan intensif saat pemeriksaan, dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha			Kepatuhan sarana kurang	Kepatuhan sarana meningkat
2.	Peningkatan kompetensi inspektur berjenjang dan persamaan persepsi petugas	Pelatihan terjadwal yang diikuti petugas (Inspektur CDOB, Inspektur kosmetik, inspektur OT, dan Inspektur Pangan, beserta sosialisasi pada petugas lainnya.			Personil baru belum memahami terkait pemeriksaan distribusi dan terdapat perbedaan persepsi petugas	Hasil Inspeksi lebih dalam dan persepsi petugas mulai sama.
3.	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan pelaku usaha distribusi obat dan makanan	Monev aktif sarana dengan riwayat TMK			Sarana riwayat TMK ada yang tidak diperiksa ulang	Sarana TMK sudah diperiksa ulang dan kepatuhan sarana meningkat


i. **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target untuk setiap interim, dimana pada interim I tercapai 103,57%, pada Interim II tercapai 101,76%, pada interim III tercapai 102,71%. Capaian ini ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2023 sehingga capaian meningkat menjadi 104,17%.

15. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh

a. **Perbandingan target dan realisas tahun 2023**

Table 64. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,40	4,37	99,32 % 	Cukup

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik yaitu:

1. Kebijakan pelayanan (Standar Pelayanan, FKP).
2. Profesionalisme SDM (waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan, budaya pelayanan).
3. Sarana prasarana (parkir, ruang tunggu, toilet, sarpras disabilitas, front office).
4. Sistem informasi pelayanan publik (SIPP penunjang, kualitas, pemutakhiran data).
5. Konsultasi dan pengaduan (sarana prasarana, media, akuntabilitas dan tindaklanjut).
6. Inovasi pelayanan (penciptaan, sumber daya).

Pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui

persilangan antara 6 prinsip tata kelolapemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari hasil analisis dengan metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot aspek dan indikator instrumen yang digunakan dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dikarenakan telah memenuhi kriteria yaitu nilai *Consistency Ratio* (CR) dibawah 10% dan memiliki nilai konsensus lebih dari 65%: Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 2 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai hasil pembobotan formulir F02 dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh telah diperoleh sebesar 4,37 dari target 4,40 dengan capaian sebesar 99,3% dan dengan kategori Nilai IPP “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 36 Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 hingga tahun 2023

Target tahunan Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh adalah target yang diperoleh pada TW III, dengan nilai sebesar 4,37 dari target 4,40 dengan capaian

sebesar 99,3% dengan kategori “Cukup”. Capaian indeks pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022 Balai besar POM di Banda Aceh memperoleh predikat pelayanan Prima. Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 menurun dari target yang telah ditetapkan dimana terjadi beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh yang disebabkan beberapa faktor yaitu:

- Perubahan tools penilaian tahun 2022 dengan 2023 (pembobotan penilaian di F-02 dan F-03 dari 50:50 menjadi 75:25). Berdasarkan data penilaian di F-03 untuk Aceh termasuk tinggi, sehingga dengan berkurangnya bobot penilaian pada F-03 dari 50% menjadi 25% sedangkan pada nilai di F-03 tinggi maka menyebabkan menurunnya pembobotan nilai pada IPP tahun 2023.
- Dari 6 Aspek Penilaian, 3 Aspek diantaranya memperoleh nilai yang sangat rendah yaitu: Aspek SIPP, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi. Kurang penilaian ini disebabkan data dukung yang disampaikan kurang lengkap dan kurang sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya:

- Aspek Inovasi merupakan aspek paling lemah, dengan nilai 2,5. Hal ini disebabkan karena inovasi belum masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) tahun 2023, sudah diikutsertakan namun gugur dalam penilaian proposal karena masih belum sampai 1 tahun umur inovasi tersebut (Korporasi dan Sanger), selain itu data dukung yang di up load pada sistem evortala kurang lengkap.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan dengan nilai 3,35 dan Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dengan nilai 3,9. Pada kedua aspek ini penyampaian data dukung kurang lengkap dan dinilai tidak sesuai.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%).
2. Profesionalitas SDM (25%).
3. Sarana Prasarana (18%).
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%).
6. Inovasi (12%).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

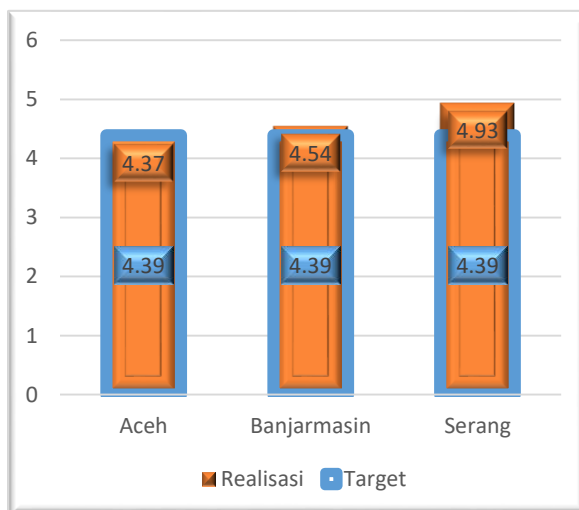
Table 65. Perbandingan Realisasi Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh	4,45	4,37	98,20 % 	Akan Tercapai

Pada perbandingan indeks pelayanan publik antara target renstra 2024 dengan

realisasi target tahun 2023 belum memenuhi target hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,20 % dengan kategori “Akan Tercapai”. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 37 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan gambar di atas, realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 yang tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Serang 4,93 (Pelayanan Prima) diikuti oleh Balai Besar POM di

Banjarmasin 4,54 (Pelayanan Prima) dan Balai Besar POM di Banda Aceh 4,37 (Sangat Baik) Dari ketiga balai yang dibandingkan dua balai yaitu Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banjarmasin telah melebihi target nasional, sementara Balai Besar POM di Banda Aceh belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya dan meningkatkan pelayanan untuk dapat meraih predikat pelayanan prima di tahun mendatang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2023 yang menghasilkan

Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,37 bagi Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dibandingkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 4,56 yang turun signifikan dari predikat Pelayanan Prima menjadi Pelayanan Sangat Baik, turun 0,19 poin. Kurang fokusnya tim dalam menyampaikan data dukung evaluasi kinerja pelayanan publik ini sangat berdampak pada penilaian, tentunya ini akan menjadi fokus evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Hasil penilaian IPP tahun 2023 terdapat 3 aspek penilaian yang nilainya rendah yaitu Aspek SIPP, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi, dapat dilihat dari sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan: nilai indeks peraspek 4.79.
2. Profesionalitas SDM: nilai indeks peraspek 4.6
3. Sarana Prasarana: nilai indeks peraspek 4.6
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): nilai indeks peraspek 3.9
5. Konsultasi dan Pengaduan: nilai indeks peraspek 3.35
6. Inovasi: nilai indeks peraspek 2.5

Rendahnya nilai pada ketiga aspek penilaian tersebut berdampak pada rendahnya nilai pada F02 yang mempunyai bobot 75% dari total perhitungan Indeks Pelayanan Publik. Rendahnya nilai pada 3 aspek di atas disebabkan penyampaian data dukung yang kurang sesuai dan kurang lengkap. Aspek Inovasi merupakan aspek paling lemah, dengan nilai 2,5. Hal ini disebabkan karena inovasi sudah diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) tahun 2023 namun gugur dalam penilaian proposal karena umur inovasi masih belum sampai 1 tahun umur inovasi tersebut (Korporasi dan Sanger), selain itu data dukung yang diupload pada sistem evortal kurang lengkap. Aspek Konsultasi dan Pengaduan dengan nilai 3,35 dan Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dengan nilai 3,9. Penyampaian data dukung pada kedua aspek ini kurang lengkap dan tidak sesuai. Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga di tahun mendatang Balai Besar POM di Banda Aceh dapat memperoleh predikat Pelayanan Prima.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 66. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh	546.614.000	545.858.750	99,86 %	99.32 %	Tidak Efisien

Penggunaan anggaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) tidak efisien. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian pada indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Alokasi anggaran pada IPP yaitu sarana prasarana ruang pelayanan publik, publikasi di media cetak, elektronik dan media sosial balai serta penyelenggaraan forum konsultasi publik terkait produk layanann Balai Besar POM di Banda Aceh.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Mengingat cepatnya perubahan dan dinamika dalam sektor publik, instrumen penilaian (tools) pelayanan publik IPP perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait dengan sistem informasi, telah dibangun database yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR). Penilaian IPP diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan standar pelayanan publik. Pemanfaatan ajang SINOVIK untuk mencari inovasi terbaik, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan standar pelayanan yang secara berkala, yang merespon kebutuhan masyarakat. Pengembangan *knowledge management* di unit kerja, perlu dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme *hands-on-learning* secara daring dan luring, sehingga bermanfaat bagi pengembangan perbaikan pelayanan publik secara terus menerus.

Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan upaya perbaikan, diantaranya terkait inovasi, dilakukan perbaikan untuk peningkatan dengan mengikutkan sertakan dan mengajukan proposal inovasi pelayanan publik (Janet, Sanger

Ureung Aceh dan Korporasi) dalam ajang kontes inovasi KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) di tahun 2024. Dan melakukan review data dukung aspek penilaian terendah dan melengkapi data yang kurang yaitu pada aspek SIPP, Konsultasi Pengaduan dan Inovasi. Balai Besar POM di Banda Aceh untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi dilakukan berbagai hal, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan standar pelayanan yang melibatkan berbagai 5 unsur (penta heliks) seperti Pelaku Usaha, Lintas sektor terkait (Dinas perdagangan, Dinas Pangan dan Pertanian, Perikanan dan kelautan, Dinas Kesehatan), media massa, Komunitas Masyarakat dan Akademisi. Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.
2. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan misalnya timeline untuk Pengujian Sampel.
3. Menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya Inovasi E-learning Korporasi, Sanger Ureung Aceh, JANET (Jawab Netizen). Inovasi pelayanan publik e-learning korporasi telah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berkelanjutan serta sudah pernah mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, namun diberikan nama yang berbeda sehingga dianggap bukan kebaruan inovasi tetapi inovasi baru.
4. Meningkatkan publikasi pada system Informasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai SKM terlihat di ruang publik, media social balai, sehingga

- mudah diakses dan dapat diterima oleh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana di ruang layanan publik sehingga dapat memadai dan dibuat agar konsumen lebih merasa nyaman dengan fasilitas fasilitas seperti Wifi, AC, TV, Fotocopi gratis, Snack gratis, ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang konsultasi, tersedia toilet yang cukup, dll.
 6. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Petugas Pelayanan dengan pelatihan Service Excellent.
 7. Memberikan reward kepada petugas layanan terbaik dan dipublikasikan di website/media sosial setiap triwulan dan dipublikasikan di media sosial.
 8. Mengupdate pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik di sistem informasi.
 9. Meningkatkan kenyamanan dan keterjangkauan pelayanan masyarakat sehingga lebih dirasakan kemudahannya.
 10. Melengkapi sarana prasana pengguna layanan disabilitas atau layanan khusus sehingga pelayanan yang diberikan memiliki unsur keadilan secara merata.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 67. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur dan profesi	-	-	Standar Pelayanan akan diupdate setelah pelaksanaan FKP berdasarkan saran dan masukan	Penetapan Standar pelayanan dan maklumat pelayanan
2.	Pemberian Reward dan Punishment Petugas Pelayanan dilakukan setiap bulan	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan setiap bulan dan di publish di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan per triwulan dan di publish di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan perbulan dan di publish di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh

3.	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana di ruang pelayanan publik	Renovasi toilet, sistem antrian, dan ruang pelayanan publik	-	-	Toilet disabilitas belum tersedia, sistem antrian masih manual dan ruang pelayanan publik masih belum lengkap	Toilet disabilitas telah tersedia, sistem antrian telah diupdate dengan sistem antrian elektronik dan ruang pelayanan publik masih belum lengkap
4	Mengikutkan inovasi pelayanan publik dalam ajang kontes inovasi KIPP	mengajukan proposal inovasi pelayanan publik dalam ajang kontes inovasi KIPP	-	-	Inovasi tidak lolos seleksi	Inovasi terus berjalan dan akan diusulkan kembali pada tahun 2024

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi saran perbaikan laporan kinerja maka untuk mencapai target renstra telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur dan profesi seperti Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Mahasiswa dan lapisan Masyarakat serta melaksanakan monitoring evaluasi secara berkelanjutan.
- Mendokumentasikan dan mempublikasikan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai SKM di area ruang pelayanan (brosur, poster/banner, katalog, dan media informasi (baliho), media cetak, dan website/media social.
- Hasil SKM berupa saran dan kritikan di tindaklanjuti dan dibuatkan laporan hasil tindaklanjut SKM.
- Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana ruang pelayanan sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan.
- Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme petugas layanan.
- Pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara rutin dan terus menerus.

- Inovasi telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, dan berkelanjutan serta mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 68. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	100	126,58	Tidak dapat disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

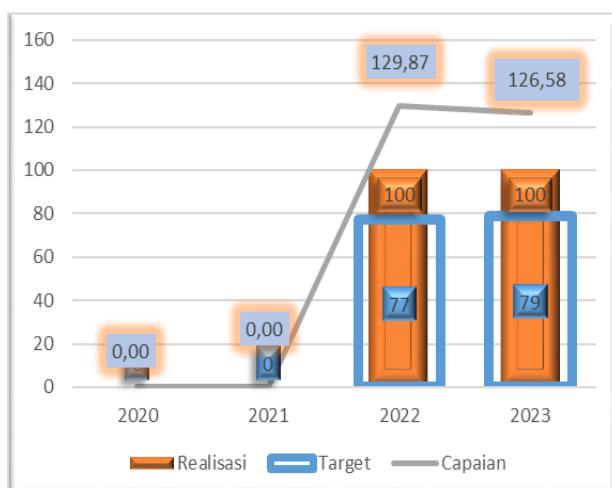
$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau

hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan 121 Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki esertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada Tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan layanan pendampingan terhadap 14 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dan semua target tersebut telah memenuhi tahapan progres yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik berada pada kategori Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 38. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

Berdasarkan gambar di samping, capaian persentase UMKM yang memenuhi standar

produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menurun dibandingkan tahun 2022. Indikator Kinerja ini baru ada pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 maupun 2021. Realisasi pada indikator kinerja ini sudah tercapai sepenuhnya 100% pada tahun 2022 maupun 2023, hanya saja terdapat kenaikan target sehingga capaian realisasi tahun 2023 jadi menurun. Walaupun demikian, tetap diperlukan adanya upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

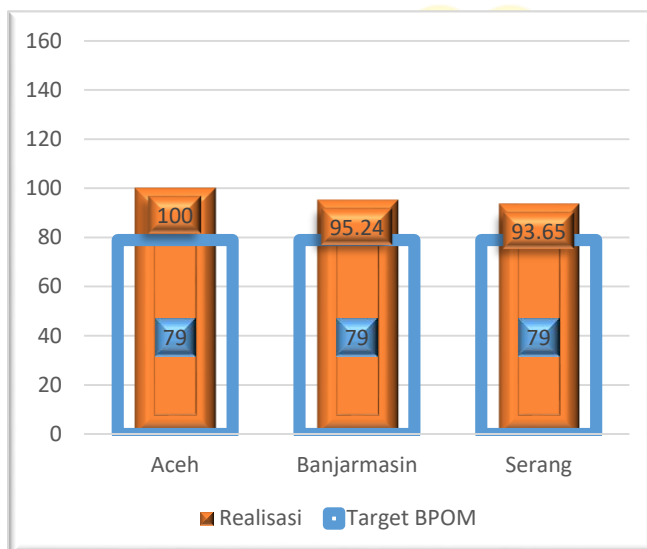
Table 69. Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	100	123,46 ▲	Tercapai / Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	100	100	100 ▲	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dibandingkan dengan target renstra 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan dengan kategori Tidak Dapat

Disimpulkan. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menjadi 100. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan tetap melakukan pendampingan UMKM secara optimal untuk dapat mempertahankan realisasi yang telah dicapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai Lain yang sejenis / setara, dengan target nasional



Gambar 39. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik dan target nasional dengan realisasi kinerja Balai Lain.

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau

Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik untuk tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai 100%, dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang. Balai - balai yang diperbandingkan semuanya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program pendampingan UMKM bertujuan untuk menjadikan UMKM mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya sertifikat atau rekomendasi. Pada tahun 2023 telah dilakukan pendampingan

terhadap 33 UMKM pangan olahan dan telah diterbitkan sertifikat Izin Penerapan CPPOB, terdiri dari 9 UMK Pangan target yang didampingi sesuai dengan tahapan mekanisme, dan 24 UMK yang di dampingi di luar mekanisme melalui inovasi Korporasi. Penerbitan sertifikat ini dapat dilakukan monitoring melalui esertifikasi.pom.go.id setelah diterapkannya Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan cara produksi Pangan Olahan yang Baik. Pelaku usaha mendapat pendampingan dari petugas balai dari pembuatan denah lay out sarana produksi, pembuatan dokumen mutu dan pendaftaran izin edar di aplikasi. Untuk kemudahan pelaku usaha telah disediakan format dokumen mutu serta fasilitasi dan bimbingan teknis cara pembuatan dokumen, sehingga terjadi percepatan pembuatan dokumen oleh pelaku usaha. Tetapi kendala tetap ditemukan disebabkan rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi sehingga beberapa pelaku usaha mendapat pendampingan intensif dari petugas balai.

Pendampingan terhadap pelaku usaha obat tradisional (UMOT) telah dilakukan dan diterbitkan 4 sertifikat pemenuhan aspek CPOTB tahap 1, terdiri dari 2 UMK Obat Tradisional target yang didampingi sesuai dengan tahapan mekanisme dan 2 di luar mekanisme. Proses pendampingan dilakukan oleh fasilitator UMKM OT yang telah dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan terkini terkait persyaratan dan aplikasi yang digunakan dalam mendapatkan SPA CPOTB bertahap. Pendampingan terhadap pelaku usaha kosmetik sesuai target yaitu 3 UMKM yang telah di telah didampingi berhasil terbit izin edar notifikasinya dan telah didampingi 2 UMK lainnya di luar target yang berhasil terbit persetujuan denah kosmetiknya.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik sudah tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progres pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh ketepatan petugas dalam melaporkan setiap tahapan pendampingan sesuai timeline, mulai dari laporan penetapan UMKM yang didampingi, laporan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek CPKB, bimtek CPOTB, dan bimtek izin penerapan CPPOB), laporan pelaksanaan pendampingan (termasuk fasilitasi pendampingan dan PSB pangan), serta monitoring dan evaluasi. Selain itu

keberhasilan pelaksanaan pendampingan juga disebabkan oleh kompetensi petugas dan efisiensi SDM di subkelompok subansi sertifikasi dengan bantuan fasilitator.

Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.
 - b. Pembinaan terprogram secara terus menerus kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OTSK.
 - c. Pendampingan secara kerkesinambungan dalam desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan.
 - d. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh.
 - e. Monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap UMKM produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik sesuai tahapan progres yang terjadwal.
- f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 70. Efisiensi anggaran pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	52.594.000	52.592.000	100	126.58%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah

sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program-program yang telah dilakukan selama tahun 2023 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait agar terdapat persamaan persepsi petugas. Selain itu dukungan yang diperoleh akan sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui oss..rba yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan Obat Tradisional).
- d. Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk lebih cepat memenuhi perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 71. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Selesai			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pendampingan ke sarana sesuai	Telah dilakukan pendampinan	-	-	Pelaku usaha belum memahami	Pelaku usaha memahami

	jadwal yang ditetapkan	langsung ke sarana produksi kepada semua UMK target			persyaratan pendaftaran terutama pembuatan denah layout sarana produksi	pembuatan denah layout sarana produksi
2.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi olahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha kosmetik ➢ Telah dilakukan pelatihan/ bimtek kepada pelaku usaha pangan dan pelaku usaha obat tradisional 	-	-	Pelaku usaha belum memahami persyaratan pendaftaran /standar produksi	Pelaku usaha memahami persyaratan pendaftaran /standar produksi
3.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilakukan rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal pada bulan April 2023 	-	-	Belum tersedia tenaga fasilitator	Tersedia tenaga fasilitator

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan laporan interim, pencapaian indikator ini telah tercapai seluruhnya sesuai target untuk tahun 2023, Rekomendasi pada laporan interim telah dilaksanakan sehingga capaian tetap dapat dipertahankan.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 5 dicapai dengan NSS 100,57. Kinerja IKU 17 hingga IKU 20 diperoleh hasil capaian yang sangat baik. Salah satu strategi pencapaian yang dilakukan diantaranya Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan

advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh, mampu mendapatkan 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2023 sehingga Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dapat tercapai sesuai target.

Indikator Kinerja

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 72. Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	94.08	102.26 %	Sangat Baik

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (1) KIE melalui media cetak dan elektronik; (2) KIE langsung ke masyarakat; dan (3) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh. Teknik survei berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Adapun kategori hasil tingkat efektifitas KIE sebagai berikut:

Table 73. Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan survei Efektifitas KIE tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 421 orang responden. Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan tahun 2023 di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 94,08 dan capaian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yaitu 102,16 % dengan kategori “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 40 Perbandingan Realisasi dan capaian Tingkat efektifitas KIE tahun 2020 hingga tahun 2023



Hasil perbandingan yang diperoleh dari tahun sebelumnya dengan tahun 2023 sama-sama memberikan hasil sangat baik dengan tingkat efektifitas sangat efektif sekali. Realisasi Tahun

2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi efektifitas KIE tahun 2020 dan 2021. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat efektifitas KIE tahun 2022 yaitu 95,26 terjadi penurunan tingkat efektifitas KIE pada tahun 2023 yaitu 94,08. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal penerimaan informasi dan pemahaman terhadap informasi yang telah di sampaikan kepada responden yang

mengisi survey oleh karena itu Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya meningkatkan efektifitas pemberian KIE Obat dan Makanan di Provinsi Aceh.

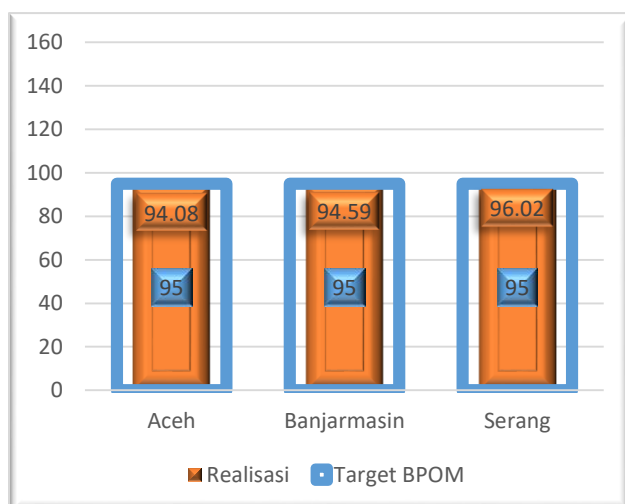
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 74. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.00	94.08	101.16 	Tercapai/ Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	94.9	94.08	99.13 	Akan Tercapai

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan target indeks 93,0 dan % capaian sebesar 101,16 % dengan kategori “Tercapai/ Melampaui”. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan menjadi 94,9. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya peningkatan dan perbaikan untuk sarana produksi obat dan makanan agar target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 41 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM

di Serang dengan nilai 96,02 diikuti Balai Besar POM di Banjarmasin (94,59) dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banda Aceh (94,08). Dari ketiga Balai pembanding lainnya yang setara yang sudah melampaui target IKU Nasional adalah Balai Besar POM di Serang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan sebagai berikut:

- Talkshow/Dialog Interaktif tentang: Intervensi Keamanan Pangan Melalui Program Prioritas Nasional Di Bener Meriah; Keamanan Jajanan Anak Sekolah Dalam Rangka Hari Gizi Nasional Bersama Rri Banda Aceh; Memaksimalkan Pengawasan Pangan Berbuka Di Ramadhan 1444 H/ 2023 M; Pengawasan Pangan Aman Idul Fitri 1444 H; Aceh Bicara Bahas Sertifikasi Halal, Peningkah; Meningkatkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Penyebaran informasi tentang: Keamanan Pangan, Obat dan Obat Tradisional, Cerdas Memilih dan menggunakan Kosmetika Aman serta Pengenalan Aplikasi BPOM Mobile, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Cerdaskan Masyarakat hingga ke pelosok desa, KIE Keamanan Pangan; Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Ramadhan, Natal

dan Tahun Baru; Antimicrobial Resistance (AMR) dan Bahaya Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

- Kegiatan Sosialisasi/Bimtek, Penyuluhan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) tentang Keamanan Pangan, Cegah Stunting, Gizi Seimbang , Informasi Nilai Gizi, dan BPOM Mobile.
- Podcast dengan Influencer dan KPIA terkait Isu yang sedang trend diantaranya Kemudahan perizinan, Endorse produk kosmetik, AMR, Tips and Trik Iklan yang benar, Bijak menggunakan Obat, Mengenal SAKA POM, Keunggulan Laboratorium BPOM, Layanan Publik/PPID, BPOM Mobile dan juga P4GN.
- Kegiatan Rekrutmen dan Pembelajaran SAKA POM kepada 17 Kab/Kota se-Aceh tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, KIE Obat dan Makanan.
- Penyebaran informasi melalui subsite Balai Besar POM di Banda Aceh (aceh.pom.go.id).
- Penyebaran informasi melalui media sosial antara lain facebook, instagram, X, Youtube, whatapps dan tiktok.

Keberhasilan dalam capaian nilai Indeks Efektifitas KIE dikarenakan tema yang diangkat merupakan hal yang sangat ingin diketahui masyarakat serta keragaman materi yang disampaikan mampu menarik minat dari masyarakat. Dengan adanya konten yang dibuat sangat membantu dalam meningkatkan *follower dan engagement* media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh. Balai Besar POM di Banda Aceh terus senantiasa bekerja demi mewujudkan keamanan Obat dan Makanan di seluruh lapisan masyarakat melalui informasi yang diberikan dari berbagai media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 75. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektifitas KIE	225.227.000	225.277.000	98.75	102.26	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan antaralain Adanya Inovasi JANET (Jawab Netizen) yang merupakan Inovasi dalam menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh kemudian di jawab berupa infografis, video offline maupun secara online. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat; Adanya penyebaran informasi KIE melalui media cetak dan media sosial berupa infografis maupun video edukas yang menarik dan kekiniani; Cakupan KIE dan Publikasi Pengawasan Obat dan Makanan di Situs pelayanan publik nasional (SIPPN); Adanya pelaksanaan Program kegiatan KIE Obat dan Makanan berupa: kegiatan Advokasi terpadu Keamanan Pangan, rekrutmen dan pembelajaran SAKA POM, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi P4GN, Sosialisasi Anti Microbial Resistensi (AMR), KIE Pameran Kebudayaan Aceh ke-8 dan lain sebagainya.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 76. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Melibatkan peran SAKA POM pada kegiatan KIE di area keramaian dan sarana ritel/warung	Anggota SAKA POM dilibatkan KIE di Sekolah dan pada kegiatan Inovasi Sanger Ureung Aceh serta kegiatan pengawasan pada saat hari besar keagamaan	-	-	Belum ada pembentukan anggota SAKA POM	Pembentukan SAKA POM dan disahkannya SAKA POM pada saat MUNAS Pramuka tahun 2023
2	Peran Anggota SAKA POM khususnya Krida Informasi untuk membuat Konten-konten edukasi yang menarik yang dipublikasi pada media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh	Video konten edukasi terkait Obat dan Makanan dibuat secara menarik dan kekinian	-	-	Viewer dan Follower medsos Balai Besar POM di Banda Aceh masih sedikit	Viewer dan Follower medsos Balai Besar POM di Banda Aceh meningkat pesat


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 77. Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72	72	100% 	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Program PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Tahapan Intervensi Keamanan PJAS yang dilakukan meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS, Sosialisasi Keamanann PJAS, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian paket edukasi berupa produk informasi keamanan pangan, Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, sampling dan pengujian sampel PJAS di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah serta pembinaan terhadap petugas kantin dan pedagang disekitar sekolah, tahapan selanjutnya adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, serta tahapan Pengawasan Sekolah tahun sebelumnya. Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 78. Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2023	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Sosialisasi Keamanan Pangan	10 %	Maret - April	100 %	10 %
Bimbingan Teknis kader Keamanan Pangan Sekolah	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10 %	April - Nov	100 %	10 %
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah PJAS	15 %	Juni - Sept	100 %	15 %
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20 %	Agust - Nov	100 %	20 %
Pengawalan	10 %	Okt - Des	100 %	10 %
Total Skor	100 %			100 %

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah, dan menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Langsa, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen dan Kab. Bener Meriah. Target tahun 2023 berjumlah 16 sekolah intervensi 2023 dan 56 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021, dan 2022. Semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan PJAS yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Yangmana kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah tercapai yaitu 100% atau 72 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Terdapat kenaikan realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Capaian sekolah dengan Sertifikat PJAS Aman dapat terealisasi dengan capaian 100 %. Hal ini dapat tercapai karena adanya komitmen yang tinggi dari sekolah-sekolah intervensi untuk melaksanakan semua tahapan program dan merealisasikan rencana aksi yang telah ditetapkan di sekolah. Target indikator sekolah dengan PJAS Aman telah ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

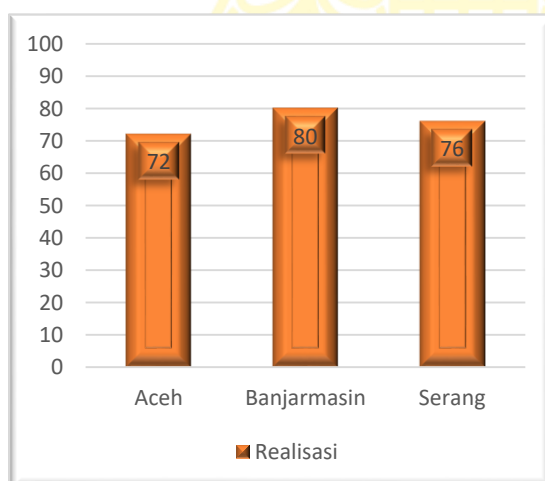
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 79. Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	72	81,82 % ▲	Akan Tercapai

Realisasi jumlah sekolah program PJAS Aman tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024, perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2024 tetap dapat tercapai. Target renstra di 2024 sebanyak 88 sekolah ini akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan. Ada 16 sekolah yang harus dicapai setiap tahun yang menjadi target intervensi A, sehingga nanti di tahun 2024 sebagai target renstra dapat dicapai sesuai perencanaan. Pencapaian target ini akan tercapai dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, terkait anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung program PJAS aman.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 43 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 seluruh balai telah menyelesaikan capaian target yang

ditetapkan di renstra masing-masing. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan. Pencapaian target sekolah intervensi PJAS aman oleh balai-balai pembanding sama dengan pencapaian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) memiliki target tahun 2023 berjumlah 72 Sekolah terdiri dari 16 Sekolah intervensi tahun 2023 di 4 kabupaten/kota intervensi dari sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA /SMK/MA dan 56 sekolah pengawalan yang diintervensi tahun 2020, 2021 dan 2022, serta untuk sekolah perluasan cakupan sebanyak 65 sekolah. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh, sehingga didapat 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2023.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi dengan pemerintah daerah selanjutnya mensurvey sekolah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan progress program PJAS adalah Advokasi terpadu keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada saat advokasi ditentukan lokus sekolah yang akan diintervensi keamanan pangannya. Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dengan target 4 Kabupaten/kota intervensi yaitu Langsa, Aceh Besar, Bireuen dan Bener Meriah, sedangkan 2 kabupaten/kota perluasan yaitu Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Dengan jumlah target sekolah yaitu sebanyak 16 sekolah kategori intervensi A dan sebanyak 65 sekolah perluasan. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah kepala sekolah/guru dan siswa. Selanjutnya dilaksanakan juga tahapan Program PN PJAS yaitu Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dihadiri sebanyak 16 sekolah yang diintervensi tahun 2023, pada saat bimtek kader dipaparkan materi tentang cara memilih dan mengolah pangan aman, Pengenalan bahan berbahaya pada pangan, Gizi seimbang SDM Unggul serta Pengenalan Aplikasi BPOM Mobile. Pada tahapan bimtek ini dilakukan juga tahapan

pemberian produk informasi keamanan pangan kepada seluruh sekolah yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan. Produk Informasi yang diberikan diantaranya Roll Banner Keamanan Pangan, Flashdisk yang berisi materi dan Video Keamanan Pangan, Poster-poster Keamanan Pangan (6 macam Informasi terkait keamanan pangan), Celemek Keamanan Pangan, Buku terkait Keamanan Pangan (3 Macam Buku), Goodybag Keamanan Pangan, Paket edukasi Ular Tangga Keamanan Pangan dan Rompi Kader Keamanan Pangan Sekolah.

Tahapan selanjutnya Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, sampling dan pengujian sampel PJAS di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah serta pembinaan terhadap petugas kantin dan pedagang disekitar sekolah, Balai Besar POM di Banda Aceh memastikan sekolah telah melakukan pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah melalui penerbitan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan memastikan Kader Keamanan Pangan Sekolah melakukan intervensi keamanan pangan sekolah melalui komitmen kepala sekolah, rencana aksi sekolah (Sosialisasi, Rekap Nilai pre post, Kuesioner, Dokumentasi sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan oleh Kader, dll). Pada tahapan kegiatan monitoring kader sekolah, Balai Besar POM di Banda Aceh juga melakukan Sampling dan Pengujian terhadap sampel PJAS di masing-masing sekolah intervensi A dengan parameter uji kimia (Formalin, Boraks, Methanyl Yellow dan Rhodamin B), dan uji mikrobiologi (uji E.coli dan uji Salmonella) dengan menggunakan rapid tes kit. Kegiatan sampling dan pengujian PJAS ini dilakukan untuk memotret kondisi keamanan PJAS di kabupaten/kota yang diintervensi. Sampel merupakan dari kategori PJAS yang diambil di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Jumlah sampel yang di sampling dan diuji yaitu sebanyak 152 Sampel.

Tahapan kegiatan PJAS yang dilaksanakan selanjutnya adalah sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman kepada 16 sekolah yang diintervensi tahun 2023, yang mana tujuan pelaksanaan sertifikasi sekolah PJAS Aman untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanannya pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dimana hasil verifikasi menunjukkan bahwa ke 16 sekolah yang diintervensi dapat memperoleh sertifikat PJAS Aman dengan nilai >90, bahwa sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk

mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Dengan harapan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh juga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta capaian program PJAS tahun 2023 untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS, serta memberikan apresiasi kepada sekolah yang memiliki komitmen tertinggi dalam menjalankan program PJAS.

Pada tahap akhir Program PJAS dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Sekolah yang sudah diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) tahun sebelumnya yaitu sekolah yang diintervensi tahun 2020, 2021 dan 2022 serta sekolah yang telah meraih predikat sekolah Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) tahun 2018. Kegiatan Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sekolah yang diintervensi telah melaksanakan program keamanan PJAS secara berkelanjutan dan untuk mengetahui tindak lanjut dari rencana program keamanan pangan yang disusun oleh tim keamanan pangan sekolah. Serta menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan Sekolah yang telah dilatih dengan penyampaian materi Lima Kunci Keamanan Pangan memilih Pangan Aman, Lima Kunci Mengolah Pangan, Gizi Seimbang, Stunting, Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, BPOM Mobile, Pelaksanaan program Keamanan Pangan secara Mandiri di Sekolah. Sekolah berkomitmen akan selalu melaksanakan program PJAS secara mandiri di sekolah dan membuat rencana aksi terkait program PJAS tahun 2023.

Keberhasilan capaian tahapan kegiatan PJAS disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Perencanaan dan pelaksanaan setiap tahapan program PJAS diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan PJAS tahunan.
3. Koordinasi secara intens dengan kader keamanan pangan sekolah melalui

WhatsApp Grup yang dibentuk sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik., serta dapat mengshare berita/informasi terupdate tentang keamanan pangan.

4. Komitmen yang tinggi dari Kepala sekolah dan komunitas sekolah untuk menjalankan program PJAS secara mandiri dan berkesinambungan di sekolah.
5. Kesadaran Masyarakat khususnya terhadap keamanan pangan semakin meningkat menyebabkan program semakin dirasakan manfaatnya oleh komunitas sekolah, terutama dalam melakukan pengambilan sampling dan uji PJAS di lingkungan sekolah.
6. Komitmen Tim Pro PN Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus melakukan monitoring dalam memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya menjadi kunci keberhasilan program capaian realisasi Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2023.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 80. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Sekolah dengan (PJAS) Aman	477.144.000	477.094.725	99,99 %	100 %	100 % (Efisien)

Kegiatan program PJAS ini sudah efisien atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Pro PN lainnya, seperti untuk salah satu tahapan pelaksanaan monitoring pemberdayaan kader digabung dengan kegiatan pasar kampanye/penyuluhan serta pasar pangan aman. Jadi efisiensi anggaran dapat disinergikan untuk kegiatan yang tidak memiliki mata anggaran pada DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh seperti Penyelenggaraan MUNAS Pramuka dan kegiatan lain-lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai target yang ditetapkan disebabkan:

- Dari awal pelaksanaan, tim Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan penggalangan komitmen dan dukungan dari pemda dan dinas terkait lainnya, sehingga program dapat diintegrasikan ataupun disinergikan dengan program lainnya pada dinas terkait.
- Sekolah yang dipilih untuk dilakukan program PJAS Aman adalah sekolah yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah sebagai sekolah percontohan dengan PJAS Aman di Kabupaten/ Kota Intervensi. Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan seluruh tahapan program PJAS tepat waktu, sesuai dengan target pelaksanaan tahapan program yang dapat dilihat dari tingginya komitmen kader sekolah dalam menjalankan program PJAS secara mandiri, sehingga 16 sekolah yang diintervensi memperoleh predikat Sekolah PJAS Aman dengan nilai rata-rata > 90.
- Peran dan dukungan lintas sektor terkait telah tertuang dalam Komitmen tertulis Pemerintah daerah untuk menjalankan dan mensinergikan program pemerintah daerah dengan program PJAS. Diharapkan Sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman diharapkan dapat meneruskan program ini secara berkelanjutan dan mereplikasi program PJAS ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS.
- Adanya apresiasi kepada pelaksana program (Sekolah Intervensi) seperti pemberian sertifikat, piagam penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen tinggi memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi pihak sekolah.
- Tim Pro PN Balai Besar POM di Banda Aceh tetap memberikan pendampingan kepada petugas pasar yang telah dilatih dan ditunjuk dalam melakukan tahapan sampling dan pengujian. Hal ini dilakukan agar data sampling dan uji tetap valid terutama untuk produk pangan yang berpotensi tinggi mengandung bahan berbahaya.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 81. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan	-	-	Belum ada usulan rekomendasi sekolah yang akan diintervensi Program Pro PN Desa, Pasar dan Sekolah	Lokus Desa Pasar dan Sekolah yang akan diintervensi tahun 2023
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)	-	-	Belum menggalang komitmen bersama dalam pelaksanaan program Pro PN Keamanan Pangan	Adanya Komitmen tertulis dari Pemerintah daerah yang di tanda tangani


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 82. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian %	Kategori
Jumlah desa pangan aman	25	25	100% 	Baik

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) dengan tahapan berupa Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitas Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman dan pengawalan desa sebelumnya. Kegiatan intervensi desa dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan intervensi pada pasar dan sekolah. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desayang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas kelembagaan Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrase dengan program lain).

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dihitung sebagai jumlah desa tetapi berdasarkan progress tahapan program. Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 program intervensi Desa Pangan aman di 6 (enam) desa intervensi pada 4 kabupaten/kota. Secara progress tahapan program capaian 100 % dengan kategori “Baik. Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 83. Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2023	% Capaian
Advokasi kelembagaan desa	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Pengadaan gimmick, rapid test	5 %	TW 1- TW2	100 %	5 %
Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Bimtek Komunitas Desa	15 %	Mei - Okt	100 %	15 %
Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Juni - Nov	100 %	10 %
Intensifikasi Keamanan Pangan	10 %	Nov	100 %	10 %
Monev	10 %	Nov- Des	100 %	10 %
Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Des	100 %	5 %
Pengawasan	10 %	Juni-Des	100 %	10 %
Total Skor	100 %			100 %

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Pencapaian hasil kegiatan intervensi Desa pangan aman tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat tercapai sesuai target 100 %. Tahapan program kegiatan yang

telah direncanakan dilaksanakan dengan dukungan dan komitmen lintas sektor terkait. Serta tidak ada kendala kegiatan karena kerja sama tim dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

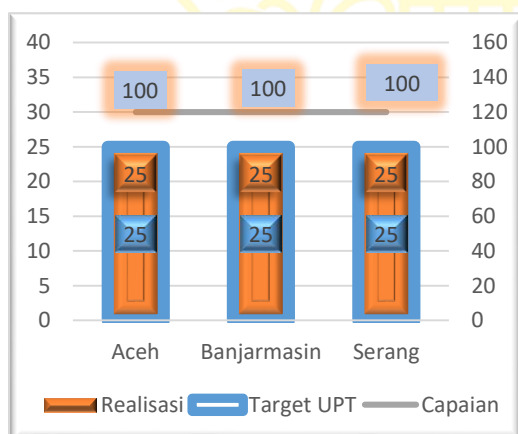
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 84. Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	32	25	78,13 % ▲	Akan Tercapai

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024, perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2024 tetap dapat tercapai. Target renstra di 2024 sebanyak 32 desa akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan. Pencapaian target ini akan tercapai dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, terkait anggaran dan sarana prasara dalam mendukung program Desa Pangan Aman.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 45 Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2023 masing-masing balai sama yaitu 25 desa dengan capaian 100 %, tentunya target ini sudah disesuaikan dengan target perencanaan dari renstra, begitu juga

dengan balai lain sesuai target yang ditetapkan di renstra masing-masing. Realisasi nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya antara Balai-balai yang melaksanakan program terkait.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan Desa Pangan Aman tahun 2023 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 Target Jumlah Desa Pangan

Aman Balai Besar POM di Banda Aceh adalah 25 Desa, Terdiri dari 19 Desa pengawalan yang telah intervensi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 , 2021 dan 2022 dan 6 desa baru intervensi keamanan pangan tahun 2023, dimana 3 desa yang diintervensi tahun 2023 merupakan desa stunting yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota yang diintervensi diantaranya:

- Kota Langsa yaitu desa matang seulimeng (Desa Stunting)
- Kabupaten Aceh Besar yaitu desa Lubuk sukun (Desa Stunting)
- Kabupaten Bener Meriah yaitu desa hakim tunggul naru (Desa Stunting)
- Kabupaten Aceh Besar yaitu desa Nusa
- Kabupaten Bireuen yaitu desa Jangka Alue
- Kabupaten Bener Meriah yaitu desa geugerung.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Desa yang menjadi target intervensi merupakan desa stunting, desa dengan kader desa yang aktif, desa destinasi wisata dan desa yang memiliki usaha pangan desa yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah setempat. Tahapan Desa pangan aman berupa Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan gimmik dan rapid tes kit, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitas Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman dan pengawalan desa sebelumnya. Kegiatan ini perlu koordinasi yang intens dengan desa-desa intervensi untuk dapat melaksanakan rencana aksi kegiatan yang telah ditetapkan di awal program.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi yang selanjutnya dilakukan tahapan program Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi ditentukan lokus desa yang telah didahului dengan survey desa pada saat audiensi yang dilakukan

bersamaan dengan survey pasar dan sekolah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Desa. Pada kegiatan Advokasi telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pemerintah Daerah yang diintervensi Keamanan Pangannya.

Untuk tahapan Bimtek Kader dan Komunitas Desa dan pengawalan diberikan materi tentang Keamanan Pangan, Stunting, Gizi Seimbang (Informasi Nilai Gizi, Baca Label dan Gula, Garam, Lemak), 5 kunci Keamanan Pangan (Keluarga, Ritel, Siap Saji, dan Sekolah) serta materi tentang keracunan alergi dan Intoleransi pangan. Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2023 telah melatih dan membentuk sejumlah 90 orang kader keamanan pangan desa yang terdiri dari kader masyarakat, kader keluarga dan kader sekolah. Kader yang telah dilatih ini secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada komunitas masing-masing desa, dan melaksanakan fasilitasi keamanan pangan di ritel tradisional, dapur keluarga dan warung pangan siap saji serta mengedukasi keamanan pangan kepada pedagang kaki lima (PKL) disekitaran desa serta melaksanakan tahapan intensifikasi keamanan pangan desa. Setiap desa yang diintervensi telah diberikan satu paket rapid tes kit dan produk edukasi berupa Poster tentang Cek KLIK dan Ayo Cegah Stunting serta ular tangga keamanan pangan.

Program desa pangan aman selanjutnya adalah Monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Desa yang diintervensi Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan seluruh tahapan program desa pangan aman secara baik dan telah merencanakan alokasi anggaran desa untuk pelaksanaan program desa pangan aman secara mandiri di tahun berikutnya. Balai Besar POM di Banda Aceh telah menunjuk satu desa yang diintervensi pada tahun 2023 yaitu desa jangka alue kab. Bireuen untuk menjadi nominasi desa pangan aman tingkat nasional.

Keberhasilan capaian realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023, disebabkan oleh:

- Semua tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tenggat waktu yang mengacu pada

petunjuk teknis maupun KAK per tahapan program.

- Dari awal pelaksanaan program, tim Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan audiensi, advokasi penggalangan komitmen dan dukungan dari pemda dan dinas terkait lainnya, sehingga desa penerima program adalah yang memang direkomendasikan dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program kedepan.
- Penyusunan action plan dari masing masing desa di awal tahun serta dilakukan monitoring oleh kepala desa, aparat desa dan kader keamanan pangan menjadikan realisasi pelaksanaan program tercapai.
- Kesadaran Masyarakat khususnya terhadap keamanan pangan di masyarakat semakin meningkat menyebabkan program semakin dirasakan manfaatnya menyebabkan tim dan kader dalam melaksanakan tahapan program memiliki semangat dan komitmen yang baik.
- Desa yang menjadi pilot project terutama bagi pelaku usaha pangan menjadi prioritas dalam keikutsertaan dalam mengikuti bimtek Penyuluh Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh dinas Kesehatan dan diberikan akselerasi dalam mendapatkan izin edar baik izin BPOM maupun PIRT
- Komitmen Tim Pro PN dari Program PJAS dari Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus melakukan monitoring dalam memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya menjadi kunci keberhasilan program capaian realisasi Kinerja Program Desa Pangan Aman pada tahun 2023.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	650.093.000	643.869.384	99,04	100	100 % (Efisien)

Kegiatan program pasar intervensi ini sudah efisien atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. kegiatan harus di sinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan

Pro PN lainnya, seperti untuk salah satu tahapan pelaksanaan Bimtek komunitas digabung dengan kegiatan pasar kampanye/penyuluhan serta monitoring sampling dan pengujian pasar pangan aman. Jadi efisiensi anggaran dapat disinergikan untuk kegiatan yang tidak memiliki mata anggaran pada DIPA seperti rekrutmen dan pembelajaran SAKA POM tingkat cabang Se-Aceh dan kegiatan lain-lain.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai target yang ditetapkan disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- Adanya tahapan audiensi di awal pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, DPMG, Bappeda, Dinas Pangan menjadikan program dapat berjalan dengan baik.
- Koordinasi dengan membentuk WA grup seluruh Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan yang telah dilatih, untuk mengkoordinasikan tahapan kegiatan selanjutnya.
- Adanya monitoring dari Tim Balai Besar POM di Banda Aceh yang terus mengawal pelaksanaan program menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan program.
- Keterlibatan lintas sektor seperti dinas Kesehatan, petugas kecamatan, petugas puskesmas dan petugas DPMG dalam sebagian tahapan program menjadi faktor lainnya yang menunjang keberhasilan program.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh	Telah dilakukan Audiensi dan Advokasi	-	-	Belum ada usulan rekomendasi sekolah yang	Lokus Desa Pasar dan Sekolah yang akan

	dengan Pemerintah Daerah	Keamanan Pangan			akan diintervensi Program Pro PN Desa, Pasar dan Sekolah	diintervensi tahun 2023
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)	-	-	Belum menggalang komitmen bersama dalam pelaksanaan program Pro PN Keamanan Pangan	Adanya Komitmen tertulis dari Pemerintah daerah yang di tandai tangani


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2022 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 87. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	19	19	100 % 	Baik

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply dan demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi dan capaian tahapan program jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai target tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan secara terpadu dalam kabupaten/kota yang sama berdampak positif terhadap pencapaian kabupaten/kota intervensi. Adanya dukungan dan komitmen dari pihak terkait sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 88. Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2023	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Feb-Apr	100 %	20 %
Survey Pasar	5 %	Jan-Apr	100 %	5 %

Bimbingan Teknis Petugas Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15 %	April - Mei	100 %	15 %
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	15 %	April - Mei	100 %	15 %
Penyuluhan	10 %	Juni – Juli	100 %	10 %
Kampanye	10 %	Juni – Juli	100 %	10 %
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 2	15 %	Sept - Okt	100 %	15 %-
Pengawasan	10 %	Feb - Okt	100 %	10 %
Total Skor	100 %			100 %

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Gambar 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas Tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Terdapat kenaikan realisasi jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Capaian Pasar Pangan Aman dapat

terrealisasikan dengan capaian 100 %. Hal ini dapat tercapai karena adanya dukungan dan komitmen lintas sektor terkait. Serta tidak ada kendala kegiatan karena kerja sama tim dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Target indikator jumlah PPABK telah ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

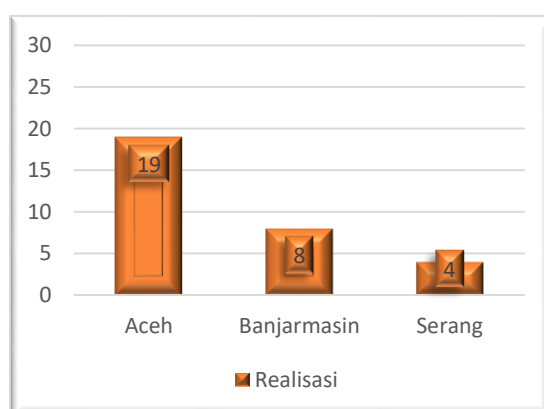
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 89. Target dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	24	19	79.16 % ▲	Akan Tercapai

Target pasar intervensi yang telah ditetapkan pada renstra masih belum tercapai di tahun 2023, hal ini karena program intervensi pasar ini perhitungannya targetnya secara kumulatif dari awal tahun target sampai nanti berakhir di tahun 2024 dengan total target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Gambar 47 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan pasar aman yang dicapai oleh UPT dengan balai pembanding untuk Aceh mendapatkan target terbanyak yaitu

19 pasar. Namun hal ini juga tentunya tidak dapat dibanding dengan pencapaian dari balai pembanding karena pasar pangan aman ini merupakan program bertarget yang sudah ditentukan jumlahnya setiap tahun berjalan. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023 Target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebanyak 19 Pasar, terdiri dari 14 Pasar pengawalan yang telah intervensi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 , 2021 dan 2022 dan 5 Pasar baru intervensi keamanan pangan tahun 2023 yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota intervensi diantaranya:

- Kota Langsa yaitu pasar induk.
- Kabupaten Aceh Besar yaitu pasar lambaro dan pasar keutapang dua.
- Kabupaten Bireuen yaitu pasar ganda pura.
- Kabupaten Bener Meriah yaitu pasar simpang tiga redelong.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi dengan pemerintah daerah selanjutnya melakukan survei yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan progress program PPABK adalah Survei, Advokasi terpadu keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Pasar, Bappeda, Dinas Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat advokasi ditentukan lokus pasar yang akan diintervensi keamanannya. Untuk tahapan kegiatan Bimtek Petugas Pasar dan Pelatihan Fasilitator dilaksanakan secara terpadu pada satu waktu di Kota Banda Aceh dimana materi yang disampaikan adalah tentang Modul 1 Pengetahuan Bahan Berbahaya, modul 2 Identifikasi Pasar untuk pengendalian Bahan Berbahaya, modul 3 Identifikasi Pedagang pasar dan Inventarisasi, modul 4 pengambilan contoh sampel, modul 5 pengujian bahan berbahaya dan modul 6 monitoring dan evaluasi pengawasan pasar dari bahan berbahaya, 5 kunci keamanan pangan di retail, dan Cek Klik serta demo penggunaan rapid tes kit. Dengan adanya pelatihan ini telah mencetak kader pasar/ fasilitator pasar pangan aman berbasis komunitas yang akan menjaga keamanan pangan di pasar dan menyebarkan pesan keamanan pangan ke komunitas pasar maupun masyarakat luas. Kader Pasar/ Fasilitator pasar selanjutnya melaksanakan monitoring dan sampling tahap 1 dan 2 untuk pangan dan minuman yang dijual disekitar lingkungan dipasar intervensi. Hasil pengujian dilaporkan tepat waktu ke sipaman.pom.go.id

Tahapan program PPABK yang dilakukan selanjutnya yaitu kegiatan Kampanye dan Penyuluhan serta kegiatan Pengawasan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Diharapkan dengan telah terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan keikutsertaan dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Indikator keberhasilan program juga didasari oleh penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan dan pangan

mengandung bahan berbahaya selama satu tahun berjalan yang selanjutnya akan mendapatkan program pengawalan pada tahun berikutnya. Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 mengikutsertakan salahsatu pasar yang diintervensi untuk menjadi nominator Lomba Pasar Aman yaitu Pasar Lambaro Kab. Aceh Besar.

Keberhasilan capaian realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023, disebabkan:

- Adanya koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota Intervensi.
- Pemilihan yang tepat dari petugas pasar yang akan menjadi petugas sampling dan uji pada tahapan sampling dan pengujian mandiri.
- Pemanfaatan media online seperti WAG juga berkontribusi dalam memberikan kemudahan koordinasi dengan petugas pasar di tiap daerah.
- Adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan komunitas pasar (pengelola pasar, pedagang, pengunjung, dan masyarakat sekitar) tentang keamanan pangan yang dijual dipasar.
- Komitmen dari Tim Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan semua tahapan sesuai dengan KAK kerja dan tahapan program yang dilaksanakan secara mandiri oleh petugas pasar, Tim Balai Besar POM di Banda Aceh terus melakukan monitoring dan mengawal setiap pelaksanaan tahapan program.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 90. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas	403.621.000	402.876.810	99.82	100 %	100 % (Efisien)

Kegiatan program pasar intervensi ini sudah efisien atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan di sinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Pro

PN lainnya, seperti untuk salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan pasar kampanye/penyuluhan dan monev pasar tahap 1 dan 2 digabung dengan kegiatan Bimtek Komunitas Desa serta Monitoring pemberdayaan kader sekolah. Jadi efisiensi anggaran dapat disinergikan untuk kegiatan yang tidak memiliki mata anggaran pada DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh seperti Penyelenggaraan MUNAS Pramuka dan kegiatan lain-lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai target yang ditetapkan disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- Tim Pro PN Balai Besar POM di Banda Aceh tetap memberikan pendampingan kepada petugas pasar yang telah dilatih dan ditunjuk dalam melakukan tahapan sampling dan pengujian. Hal ini dilakukan agar data sampling dan uji tetap valid terutama untuk produk pangan yang berpotensi tinggi mengandung bahan berbahaya.
- Surat Rekomendasi Hasil Pengawasan yang tidak memenuhi syarat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga terjadi penurunan produk pangan tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat terlihat dari data produk yang tidak memenuhi mengalami penurunan pada monev tahap 2 (post intervensi).

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 91. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai	(telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)	-		Meningkatnya kerjasama dan koordinasi yang baik

2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN PPPABK	Selesai	(telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)	-		Adanya Komitmen tertulis dari Pemerintah daerah
---	---------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	--	-------------------------------------------------

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Diharapkan para pedagang pada pasar yang intervensi akan terus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan menjaga Pangan terbebas dari Bahan Berbahaya yang dilarang pada pangan.

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh


Sasaran Kegiatan 6 dicapai dengan NPS 120 dengan kategori sangat baik. Target Kinerja IKU 21 dan 22 telah berhasil dicapai. Pengujian Sampel Obat dan Makanan berhasil diselesaikan di tahun 2023 dan tidak ada yang carry over.

Indikator Kinerja

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 92. Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100 	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$(A + B) / 2$$

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

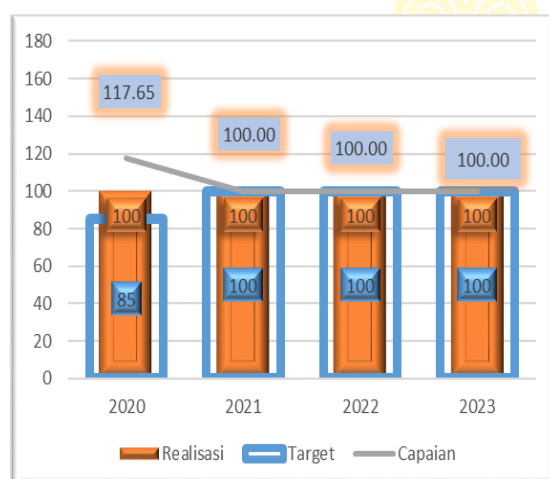
B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Balai Besar POM di Banda Aceh berasal dari balai/Loka di Region Padang yang pada tanggal 6 Juni 2023 beralih menjadi regional Medan yang beranggotakan: Balai Besar POM di Banda Aceh, Loka POM di Aceh Selatan, Loka POM di Aceh Tengah, Balai Besar POM di Padang, Loka POM di Payakumbuh, Loka POM di Dharmasraya, Balai Besar POM di Medan, Loka POM di Tanjung Balai dan Loka POM di Toba, Balai POM di Batam, Loka POM di Tanjung Pinang, Balai POM di Bengkulu, Loka POM di Rejang Lebong. Sampel yang diterima sebanyak 1320 sampel dari total target 1320. Sampel yang diuji sebanyak 2047 sampel dari total target sampel yang masuk laboratorium sebanyak 2047 sampel. Realisasi indikator Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori

Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dikonversi menjadi 120%.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 48. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi kinerja di tahun 2020. Demikian juga halnya target tahun berikutnya. Balai Besar POM di Banda Aceh secara konsisten mempertahankan realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Obat yang

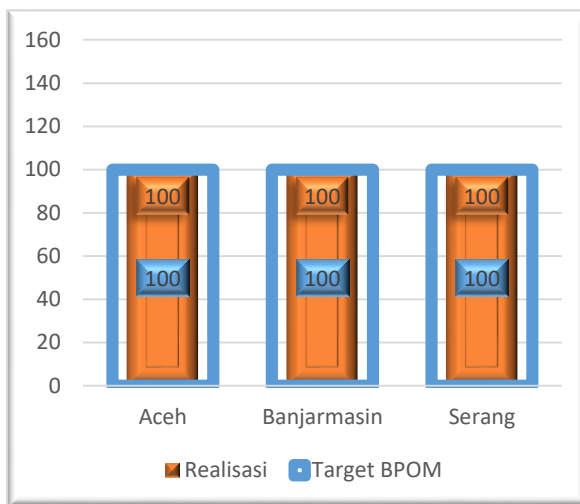
diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 100% dari tahun 2021 hingga 2023 dengan kategori Baik. Pada tahun 2021 - 2023 target indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023(%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100 ▲	Tercapai / Melampaui

Dilihat dari konsistensi hasil capaian 2021 hingga tahun 2023 yakni 100% Balai Besar POM di Banda Aceh optimis mampu mencapai target kinerja renstra tahun 2024 yaitu 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.



UPT Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin, dan Balai Besar POM di Serang sama-sama telah memenuhi target Realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni 100% dan memenuhi target nasional sebesar 100%.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan

Capaian indikator kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **Tercapai** disebabkan oleh Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas sampling dan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh dan laboratorium lain di wilayah regionalisasi Padang/Medan. Aplikasi APRESIASI yang merupakan inovasi Balai Besar POM di Banda Aceh sangat membantu dalam kegiatan pengujian terkait ketersediaan reagen di anggota Regional Medan. Aplikasi ini memudahkan permintaan/peminjaman reagensia sehingga sampel tidak menumpuk terlalu lama. Berikutnya APRESIASI akan menyediakan fitur Baku Pembanding sehingga jika terjadi kekurangan Baku dalam waktu berjalan akan lebih mudah dikomunikasikan dengan Balai pemilik Baku Pembanding tersebut. Sistem pemerintahan berbasis Elektronik mendapat perhatian utama di tahun 2023 yang telah berjalan secara optimal. Laporan dan catatan pengujian sudah menggunakan teknik *paperless*, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 93. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87.912.900	87.192.785	99.18	100	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi di bandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini dipengaruhi karena regionalisasi lab. Pada regionalisasi laboratorium, masalah kekurangan reagen, suku cadang dapat diatasi karena sebagian balai masih mempunyai stok reagen, suku cadang tertentu serta alat yang tidak dibutuhkan lagi karena pembagian tugas regionalisasi. Dikarenakan mereka sudah tidak menguji parameter tertentu akibatnya reagen, alat suku cadang dapat dipindahkan ke balai lain yang membutuhkan. Anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk memenuhi target capaian kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banda Aceh sudah melakukan kegiatan bertujuan mencegah dan mengatasi kendala terkait indikator kinerja ini. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

1. Pada tahun 2023 SIPT sudah berjalan di awal tahun sehingga SPBE pengujian dapat dioptimalkan sejak awal tahun.
2. Arsip laporan uji sudah menggunakan mekanisme *paperless* di tahun 2023 sehingga mempercepat penyelesaian sampel dan efisiensi biaya.
3. Awal tahun 2023 sudah dilakukan perbaikan di ruangan laboratorium obat sehingga ruangan menjadi lebih efektif dengan penyusunan ulang ruangan preparasi dan ruangan khusus disolusi.

4. Penambahan 1 unit KCKT di laboratorium OT/SK pada triwulan 4 meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian pengujian.
5. Mengadakan rapat internal dengan ketua tim dan anggota tim pemeriksaan dan pengujian terkait kendala laboratorium dan sampling produk Obat.
6. Memfasilitasi tim pengujian untuk meningkatkan kompetensinya terkait pengujian Obat diantaranya mengadakan pelatihan pengujian sampel pihak ketiga Metamfetamin, Identifikasi obat antialergi(Difenhidramin dll secara GCMS).
7. Membuka komunikasi dengan balai-balai regional terkait masalah laboratorium seperti ketersediaan reagen, suku cadang, peralatan, SIPT dan masalah teknis lain terkait pengujian.
8. Aplikasi APRESIASI sangat memudahkan dalam hal ketersediaan reagen sehingga kekurangan reagen bisa di atasi dengan melakukan kordinasi melalui aplikasi tersebut.
9. Komunikasi yang baik antara tim penguji dengan tim inspeksi di Balai Besar POM di Banda Aceh maupun balai regional lain terkait sampling dan kemampuan uji laboratorium sehingga dapat dipastikan sampel yang masuk ke Balai Besar POM di Banda Aceh dapat diuji.
10. Secara konsisten menerapkan ISO 17025:2017 dan ISO 9001: 2015.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 94.Matriks Tindak lanjut.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sampel Obat masih banyak yang belum selesai uji baik sampel yang disampling Balai Besar	Dikoordinasikan ke masing-masing ketua tim dan masalah yang umumnya adalah penumpukan sampel, overload di bulan Oktober			Sampel Obat yang diuji belum terealisasi 100%	Sampel Obat di TW IV sudah selesai uji 100%

	POM di Banda Aceh maupun sampel milik balai regional lain	mupun Nopember dan ketiadaan reagen, misalnya kH2 PO4 yang tidak tersedia di balai Regional Medan dan sudah di minta ke Balai Besar POM di Pekanbaru				
--	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--


i. **Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan Interim TW III digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik sampling maupun pengujian. Kendala pengujian yang paling banyak terkait penginputan SIPT oleh balai regional yang tidak konsisten, sehingga dapat menjadi dasar untuk koordinasi ke balai tersebut telah dibahas di lakin interim dan telah ditindaklanjuti sehingga sampel dapat selesai diperiksa dan diuji sesuai standar di tahun 2023.

22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Table 95. Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100 	Baik

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

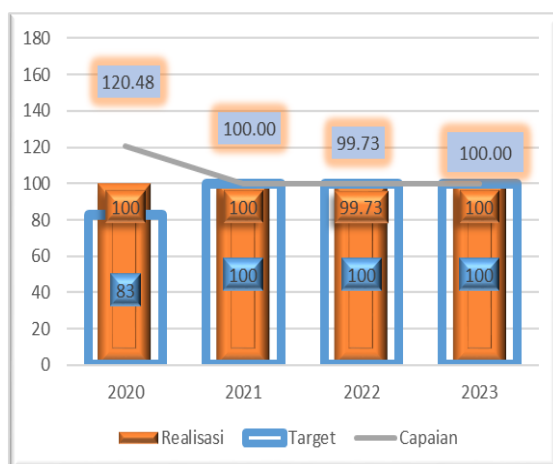
$$(A+B)/2$$

A = Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel Makanan x 100%

B = Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sebanyak 448 sampel dari target 448 sampel. Sampel yang masuk ke Laboratorium sebanyak 1309 sampel yang berasal dari Balai Besar POM di Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan dan sampel dari Balai Besar POM/BPOM/Loka lain yang berada di wilayah regional. Dari 1309 sampel, sebanyak 1309 yang dapat diuji sesuai timeline pengujian yang disepakati yaitu 30 hari dengan memperhatikan clock off dan clock off akibat ketidakterediaan reagen, kerusakan alat dan masalah teknis lainnya. Realisasi indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 49. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target kinerja tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi pada tahun 2020. Realisasi kinerja dari tahun 2020-2023 rata-rata 100% hanya di tahun 2022 yang mengalami penurunan menjadi 99.73% sehingga menyebabkan hasil

kinerja menjadi Belum Memenuhi ekspektasi/Kurang efektif.

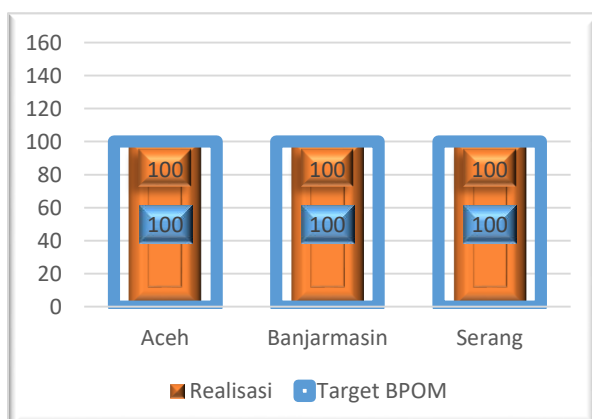
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 96. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100 ▲	Tercapai / Melampaui

Realisasi tahun 2023 yaitu 100% telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebanyak 100% menghasilkan capaian 99.73%. Dengan perencanaan yang baik di tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh akan mampu mencapai realisasi yang optimal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 50. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Serang memperoleh realisasi 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target dikarenakan perencanaan yang baik. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah perencanaan terhadap perawatan peralatan dan pengembangan kompetensi personel terkait pengujian, sampel sesuai pembagian tugas terhadap sampel regionalisasi dan pengerjaan sampel DAK dari dinkes Kab/Kota oleh personel pengujian.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 97. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	56,644,900	56,224,408	99.26	100	Tidak Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2023 **tidak efisien** karena capaian indikator kinerja lebih rendah dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan anggaran jauh dari cukup untuk perawatan, perbaikan maupun penyediaan *spare part* yang apabila terjadi kerusakan pada alat perbaikan tidak bisa segera diatasi. Beberapa alat karena kondisi ini mengalami kerusakan yang lebih parah karena pembiaran yang terus menerus akibat imbas dari kekurangan anggaran ini. Alat di Balai Besar POM di Banda Aceh sudah banyak yang rusak karena kekurangan anggaran untuk perawatan yaitu penyediaan *consumeable part* serta suku cadang yang dapat memperpanjang *life time* alat. Walaupun begitu dapat disimpulkan anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Tercapainya target didukung oleh beberapa faktor. Peningkatan kompetensi personel pengujian yang dilakukan secara berkesinambungan, baik didapatkan dari pelatihan teknis, maupun transfer knowledge antar penguji sehingga memperlancar proses pengujian. Perencanaan kebutuhan laboratorium telah optimal dan anggaran dimanfaatkan secara efisien. Terutama untuk perbaikan dan pemeliharaan instrument, diantaranya perbaikan dan kalibrasi alat microwave MARS dan ICP OES untuk pengujian Cemaran logam sampel regional dan perbaikan alat HPLC 20 AD untuk pengujian sampel pangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama yang baik antar personel penguji dan pembagian tugas yang jelas mengenai penanggung jawab alat, dapat memperlancar proses penyelesaian sampel. Kendala yang dihadapi laboratorium pangan selama 2023 diantaranya: personel pengujian Pangan juga dilibatkan dalam kegiatan lain seperti kegiatan SAKA POM, kegiatan ProPN Desa, Pasar dan Sekolah, sehingga juga mempengaruhi kondisi penyelesaian sampel tetapi dapat di atasi dengan sistem kerja yang cepat (paperless). Jumlah sampel pihak 3 dari DAK dari Dinkes Kab/Kota yang datang bersamaan dengan sampel Regional mulai dari bulan Mei s.d November 2023 sehingga menyebabkan clock on dan clock of sampel rutin untuk menyelesaikan sampel pihak ketiga terlebih dahulu.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Untuk mempertahankan capaian, Balai Besar POM di Banda Aceh mulai mendata alat-alat yang perlu perbaikan segera untuk menghindari kerusakan yang lebih berat. Merencanakan perencanaan di awal tahun 2024 dengan melibatkan seluruh tim pengujian. Mendata kompetensi yang dibutuhkan personel dan berkoordinasi dengan laboratorium regional Medan terkait pembagian pengerjaan sampel regional.

Table 98. Matriks dan Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	<p>Pada bulan Oktober Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 96,88%. Kendala di bulan ini adalah personel pengujian mengikuti kegiatan SAKA POM secara simultan bergantian, untuk mendukung inovasi "Sanger Ureung Aceh", sehingga dilakukan clock of dan clock of pengerjaan sampel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sisa sampel yang belum diuji. • Meningkatkan Monitoring dan evaluasi sampling . Mengubah target Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu sehingga hasil dapat disimpulkan 			<p>Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di bulan Oktober 96.88 %</p>	-
2	<p>Pada bulan November Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 99,11%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan kedepannya lemari asam dapat segera ditangani mengingat Lab. Pangan mengerjakan sampel regional cemaran logam dan cemaran proses. Juga, perlunya pengadaan reagen dan kit yang memadai dan lebih awal agar reagen atau kit yang inden lama tidak menjadi kendala dalam pengujian 			<p>Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di bulan November 99.11 %</p>	<p>Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di bulan November 99.11 %</p>
3	<p>Pada bulan Desember Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100,00%. Kendala penyelesaian sampel adalah: 1. kondisi alat laboratorium yang sudah menua dan perlu perbaikan seperti HPLC, Lemari asam, Microwave, AAS, ICP OES , dll, namun beberapa sudah dapat diatasi dengan mendatangkan teknisi untuk perbaikan dan pemeliharaan (Microwave, ICP, HPLC). 2.Reagen dan kit pengujian yang inden lama sehingga menunda proses pengujian dengan menggeser sampling di bulan berikutnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan kedepannya lemari asam dapat segera ditangani mengingat Lab. Pangan mengerjakan sampel regional cemaran logam dan cemaran proses. Juga, perlunya pengadaan reagen dan kit yang memadai dan lebih awal agar reagen atau kit yang inden lama tidak menjadi kendala dalam pengujian 			<p>Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di bulan Desember 100 %</p>	<p>Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di bulan Desember 100.00 %</p>

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW III digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik sampling maupun pengujian. Kendala pengujian yang paling banyak terkait penginputan SIPT oleh balai regional yang tidak konsisten, sehingga dapat menjadi dasar untuk koordinasi ke balai tersebut telah dibahas di lakin interim dan telah ditindaklanjuti sehingga sampel dapat diselesaikan.

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh


Sasaran Kegiatan 7 dicapai dengan NPS 107,29 dengan kategori sangat baik.

Indikator Kinerja

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 99. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	85,83	107,29 	Sangat Baik

Pada tahun 2022, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP sebesar 15 % - nilai A $[(a + b + c + d)/\text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40 % - nilai B $[(b + c + d)/\text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30 % - nilai C $[(c + d)/\text{jumlah perkara}]$

d. Tahap 2 sebesar 15 % - nilai D $[(d)/\text{jumlah perkara}]$

Nilai tingkat keberhasilan = $[(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)] \times (\text{jumlah capaian/target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

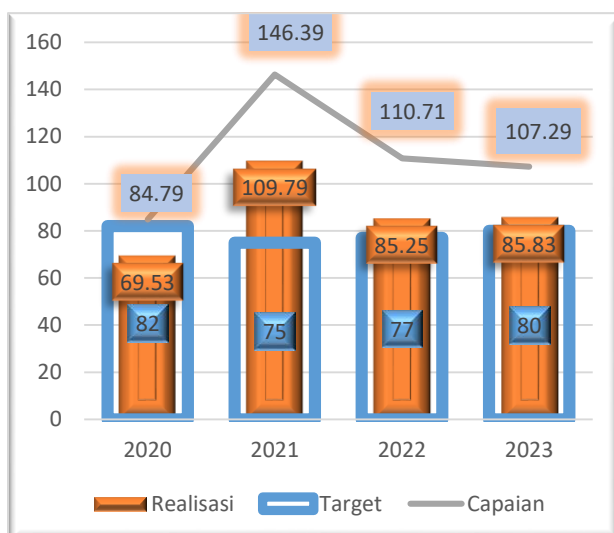
Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)).
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum).
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 adalah 85,83 dari target 80. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,29% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya



Gambar 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Terdapat sedikit kenaikan realisasi pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi menurun

cukup signifikan. Sedangkan dalam hal pencapaian kinerja, terlihat fluktuasi dari tahun 2020 ke tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan, namun capaian indikator pada tahun 2023 masih pada kategori **Sangat Baik**.

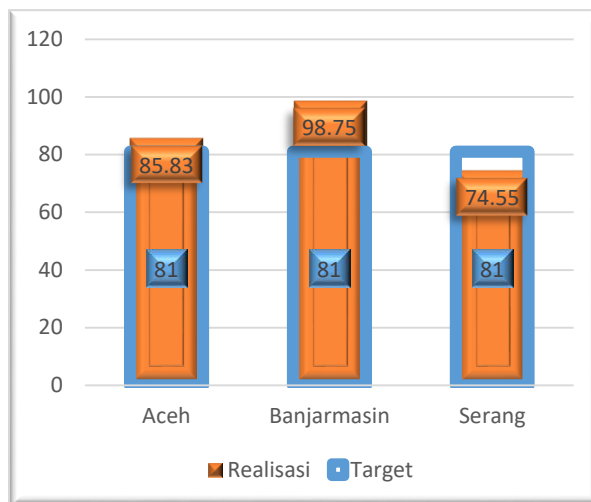
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 100. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82.00	85,83	104.67 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 104.67 % dengan kriteria “Sangat Baik”. Sekalipun Capaian telah melampaui target Renstra 2024, perbaikan dan peningkatan berkelanjutan tetap harus dilakukan untuk mempertahankan capaian pada tahun berikutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Gambar 52. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023

yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang. Namun dari ketiga Balai Besar yang dibandingkan, Balai Besar POM di Banda Aceh dan Banjarmasin masih berada di atas target Nasional, sedangkan Balai Besar POM di Serang di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2023 mencapai target. Namun demikian, dilihat dari trend pencapaian, terdapat penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Hal ini terjadi, karena adanya operasi intensifikasi (Operasi Tematik dan Operasi Pangea) yang digelar secara simultan pada TW II, sehingga para terduga pelaku kejahatan obat dan makanan yang menjadi target operasi menjadi lebih waspada. Selain itu, kenaikan target (sebagai faktor pembagi) dari tahun 2021 ke tahun 2023 juga menyebabkan turunnya persen capaian. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target tahun 2023 adalah:

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan bahan keterangan secara intensif untuk memperoleh informasi awal yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan atau operasi intelijen. Informasi adanya produksi atau pun peredaran obat dan makanan ilegal dapat diperoleh melalui kegiatan patroli siber dan kegiatan pengawasan di

lapangan. Hasil patroli siber yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan akan dilakukan rekomendasi “take down” melalui Laporan Siber setiap bulan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan. Profiling dilakukan terhadap hasil patroli siber yang dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan. Pengaduan masyarakat terkait adanya produksi atau peredaran obat dan makanan ilegal baik melalui sosial media, nomor whatsapp mau pun melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen segera ditindaklanjuti dengan verifikasi kebenaran informasi tersebut. Hasil kegiatan dan operasi intelijen yang telah lengkap dan valid akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan.

Selama tahun 2023 telah dilakukan operasi penindakan sebanyak 5 kali. Kegiatan operasi penindakan selalu melibatkan kepolisian Daerah Aceh dan kepolisian resor setempat. Terdiri dari operasi penindakan rutin 2 kali, operasi tematik dan operasi Pangea 2 kali.

Pada bulan Februari 2023 dilakukan operasi penindakan terhadap pelaku produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya/dilarang di Kabupaten Aceh Utara. Sarana tersebut telah beberapa kali mendapatkan pembinaan dan sebelumnya pada tahun 2022 sarana/pelaku tersebut telah pernah terjerat proses hukum yang ditangani oleh kepolisian resor Aceh utara. Namun berdasarkan hasil operasi intelijen diketahui pelaku masih melakukan produksi dan distribusi kosmetik jenis krim pemutih yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Sehingga dilakukan operasi penindakan dan ditindaklanjuti menjadi penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara. Operasi TEMATIK dilakukan selama bulan April 2023 di terhadap pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, peredaran obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat, serta terhadap produsen Mie Basah yang diduga masih terdapat penggunaan bahan berbahaya. Operasi tematik dilakukan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Banda Aceh. Hasil operasi penindakan TEMATIK langsung ditindaklanjuti melalui gelar perkara dan diputuskan terdapat 4 orang pelaku yang diproses ke tingkat penyidikan.

Operasi Pangea XVI dilakukan sebanyak 2 kali, operasi PANGEA XVI pada bulan Juni 2023 dilakukan terhadap sarana toko obat dan toko jamu yang diduga mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat. Operasi PANGEA XVI juga dilakukan pada bulan Oktober terhadap pelaku peredaran kosmetik dan obat tradisional ilegal. Operasi Pangea XVI dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara. Hasil operasi penindakan PANGEA XVI langsung ditindaklanjuti melalui gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar perkara tidak ada pelaku atau sarana yang diproses penyidikan. Terhadap temuan produk selama operasi dilakukan pemusnahan dan pelaku menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pada bulan November 2023 dilakukan operasi penindakan di Kota Banda Aceh terhadap pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan hasil gelar perkara diputuskan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Gelar perkara dilakukan dengan melibatkan Korwas PPNS Polda Aceh untuk memberikan saran dan pendapat terhadap hasil operasi penindakan. Apabila unsur unsur pasal yang dipersangkakan telah terpenuhi dan telah diperoleh minimal dua alat bukti serta dengan tetap mengedepankan azas ultimum remedium, maka hasil operasi penindakan tersebut akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh 6 perkara tindak pidana melakukan produksi dan/atau mengedarkan obat dan makanan ilegal. Terdiri dari 1 perkara melakukan produksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, 4 perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, serta 1 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat. Segera setelah dikeluarkannya perintah penyidikan, PPNS segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Aceh dan tersangka. PPNS melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan tersangka. Pemeriksaan terhadap 6 tersangka tersebut terdapat 1 tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Terhadap kendala ini, PPNS terus berupaya melakukan pemeriksaan dengan melibatkan kepolisian daerah setempat dan berhasil dilakukan

pemeriksaan tersangka. Keenam perkara tersebut terjadi antara lain 1 perkara di Kabupaten Aceh Utara, 1 perkara di Kabupaten Aceh Timur, 1 perkara di Kabupaten Bireuen dan 3 perkara di Kota Banda Aceh.

Penyelesaian 6 perkara tersebut terdapat 5 perkara telah selesai dilakukan proses tahap II (proses penyerahan tersangka dan barang bukti) dan telah mendapatkan putusan pengadilan, sedangkan 1 perkara yang dilakukan penindakan bulan November 2023 pada proses SPDP pada bulan Desember 2023. Terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan tersangka. Penyelesaian berkas perkara dan proses tahap I (penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum) direncanakan akan dilakukan pada Januari Tahun 2024.

Pada bulan Agustus telah terbit putusan Pengadilan Negeri terhadap 1 perkara di Kabupaten Aceh Utara yang melakukan produksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada bulan September 2023, diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen terhadap 1 perkara di Bireuen yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Telah terbit juga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pada bulan Oktober 2023, diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Idi terhadap 1 perkara di Kabupaten Aceh Timur terhadap pelaku yang mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan subsider penjara selama 1 (satu) bulan.

Pada bulan Desember 2023, diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap perkara di Kota Banda Aceh terhadap pelaku yang mengedarkan

kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan subsidi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selama tahun 2023 telah dilakukan penginputan data rawan kasus melalui aplikasi dashboard penindakan. Penginputan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan juga dilakukan terhadap Laporan Informasi, Rencana Operasi, Laporan Intelijen, Profiling dan juga proses penyidikan.

Pada tahun 2023 juga telah dilakukan kegiatan cegah tangkal berupa penyusunan analisis kerawanan kejahatan dengan tema “Analisis Penyebab Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih Ilegal Mengandung Merkuri Pada Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh”. Selain itu, telah dilakukan kegiatan penggalangan berupa kegiatan FGD dengan tema “Upaya Paksa oleh PPNS BPOM dalam Penanganan Perkara Kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan FGD tersebut melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh telah mendapatkan 6 perkara yang diproses hukum dari target 6 perkara yang ditetapkan. Keenam perkara tersebut, terdiri dari 1 perkara terkait obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, serta 4 perkara terkait kosmetik yang tidak memiliki izin edar Kosmetika.

Keberhasilan memperoleh 6 perkara tersebut, tidak lepas dari:

- a. Dukungan dari masyarakat dalam bentuk laporan tentang adanya dugaan tindak pidana peredaran obat tradisional untuk pelangsing yang mengandung BKO. Laporan tersebut kemudian dilakukan investigasi, dan ditindaklanjuti dengan proses *Pro Justitia*.
- b. Kegiatan/operasi intelijen serta patroli siber untuk memantau dan memprofile secara intens terduga pelaku kejahatan obat dan makanan yang melakukan penjualan produk obat dan makanan ilegal secara *online* yang dilakukan sejak awal tahun.

- c. Dukungan teknis dari fungsi-fungsi lain yang ada di Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain: Pengujian sampel hasil investigasi maupun barang bukti oleh Fungsi Laboratorium Pengujian, Pembuatan akun SIPT untuk personil Penindakan oleh Bagian Tata Usaha, penyediaan barang bukti surat oleh Fungsi Pengawasan
- d. Koordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian sebagai mitra kerja dalam setiap kegiatan mulai pengamanan kegiatan penindakan, gelar kasus dan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti).
- e. Kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan JPU dalam pemenuhan P-19 sampai tahap 2.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 101. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Penyelesaian satu perkara 2023 yang <i>carry over</i>		Koordinasi dengan JPU menyelesaikan sampai dengan Tahap 2	Maret 2024	Masih terdapat satu perkara tahun 2023 yang <i>carry over</i> . Hal tersebut disebabkan SPDP perkara terbit di akhir tahun (Desember 2023)	-

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 102. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	698.310.000	689.825.802	98,78	107,29	(Efisien)

Dari data pada tabel, dapat diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian output}}{\% \text{ Capaian input}} = \frac{107,29}{98,78} = 1,08$$

Sehingga nilai Tingkat Efisiensinya (TE) adalah sebagai berikut:

$$TE = \frac{\text{Indeks Efisiensi} - \text{Standar Efisiensi}}{\text{Standar Efisiensi}} = \frac{1,08 - 1}{1} = 0,08$$

Dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,08, maka capaian efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai keberhasilan kinerja penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah **100 % (efisien)**.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pihak eksternal maupun internal. Dari pihak eksternal, laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran tentang kejahatan obat dan makanan yang mendominasi di wilayah Provinsi Aceh, serta sejauh mana kinerja penindakan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Sedangkan, untuk pihak internal, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan kegiatan di waktu yang mendatang.

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal


Sasaran Kegiatan 8 dicapai dengan NPS 103,46 dengan kategori sangat baik. Indeks Sasaran Kegiatan 8 dicapai dengan NPS 103,46% (Kategori Sangat Baik). Sasaran Kegiatan 8 tercapai karena didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Indeks RB dan Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh. Kontribusi tercapainya kedua indikator ini dapat dilihat dari keberhasilan Balai Besar POM di Banda Aceh meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Bulan Desember tahun 2023 berdasarkan penilaian KemenPANRB dan Nilai AKIP dengan predikat BB.

Indikator Kinerja

24. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 103. Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	81.20	86.23	106.19 	Sangat Baik

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

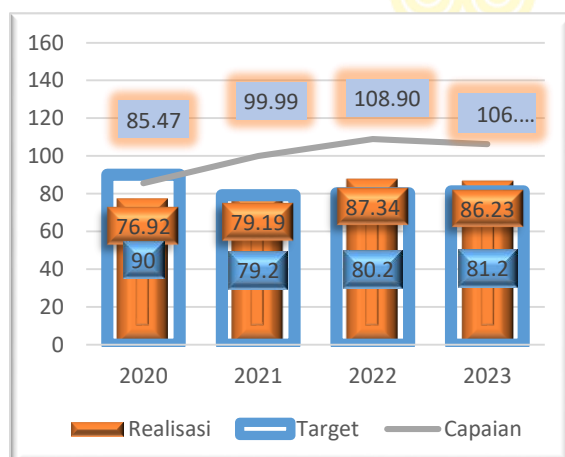
Berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB pada Bulan Desember 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada BALAI BESAR POM di Banda Aceh sebesar 86,23 dengan rincian sebagai berikut:

Table 104. Komponen Penilaian RB

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Ket
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,59	2,81	6,4	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,54	3,00	5,54	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,08	4,25	8,33	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,47	4,52	8,99	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,9	6,88	12,78	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,25	4,18	8,43	MS
TOTAL PENGUNGKIT					50,47	
B.	Komponen Hasil	40,00				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,00	
	1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,50	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,76	
	1. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,76	MS
TOTAL HASIL					35,76	
NILAI PMPZI					86,23	

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 8%; Penataan Tatalaksana: bobot 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Birokrasi Bersih dan Akuntabel: bobot 22,5%; Pelayanan Publik yang Prima: bobot 17,5%.

b. Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya



Gambar 53 Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas, terdapat fluktuasi pada realisasi dan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil

meraih WBK dari Kementerian PAN dan RB.

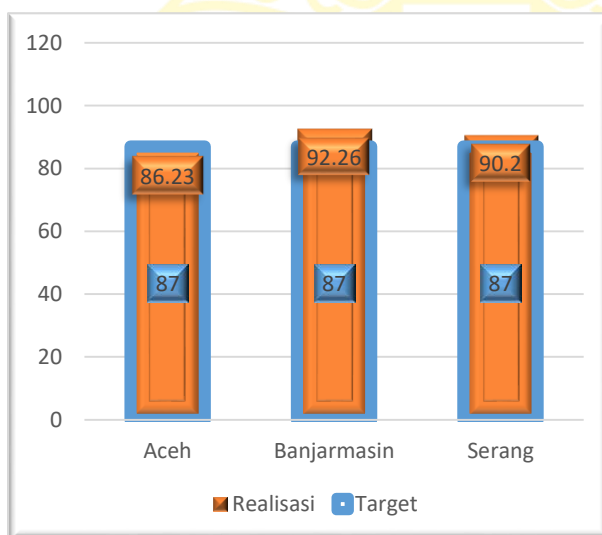
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Table 105. Realisasi Indeks RB BALAI BESAR POM di Banda Aceh tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	82.2	86.23	106.19 ▲	Tercapai/ Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	88.64	86.23	97.28 ▲	Akan Tercapai

Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori **tercapai/melampaui**. Untuk tahun 2024, terjadi review target pada indeks RB oleh Unit Pengampu di BPOM menjadi 88.64 yang didapat dari perhitungan perkalian rata-rata perbandingan realisasi seluruh unit kerja tahun 2023 dengan 2022. Dengan dilakukannya review target oleh Unit Pengampu BPOM, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya peningkatan dan perbaikan agar target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal



Gambar 54. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain

Berdasarkan grafik, realisasi indeks RB tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banda Aceh. Dari ketiga Balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Banda

Aceh yang belum mencapai target nasional (87).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian nilai RB Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan serta telah berhasil meraih predikat WBK. Nilai yang diperoleh untuk masing-masing pokja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, penerapan RB dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Besar POM di Banda Aceh berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja yang akuntabel dan transparan serta peningkatan kompetensi keseluruhan pegawai. Konsistensi pelaksanaan RB akan terus dipertahankan guna menjaga keberlangsungan predikat WBK yang telah diraih serta penerapan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh. Penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja:

1. Pimpinan terlibat aktif dan berperan sebagai role model dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja.
2. Telah menetapkan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan peraturan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Telah menerapkan inovasi di area pelayanan publik, diantaranya:
 - a. Sanger Ureung Aceh, merupakan inovasi yang meliputi:
 - 1) Pelayanan Informasi, pengujian dan pengawasan produk Obat dan Makanan pada warung kopi/kafe untuk memastikan keamanan pangan dari produk yang dijual, pemeriksaan sarana yang menjamin higienitasnya serta edukasi menyeluruh terhadap pemilik warung kopi dan pengunjungnya. Pemilihan warung kopi/kafe sebagai wahana jemput bola dalam pelayanan Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap masyarakat.
 - 2) Sosialisasi aplikasi BPOM Mobile untuk mengetahui legalitas produk Obat dan Makanan, layanan pengaduan serta berita terkini terkait pengawasan Obat dan Makanan.
 - 3) Pada tahun 2023 Sanger Ureung Aceh juga melibatkan anggota SAKA

POM untuk kegiatan Pengawasan, pengujian dan Pemberian KIE obat dan makanan.

Inovasi ini sudah berjalan sejak tahun 2019 namun pada tahun 2020 tidak terlaksana karena adanya pandemi covid-19 dan dilanjutkan pada tahun 2021, inovasi ini awalnya hanya berupa penyampaian informasi obat dan makanan aman kepada masyarakat. Berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya diketahui bahwa masyarakat Aceh mempunyai kebiasaan melakukan sebagian besar aktivitasnya di warung kopi, sehingga untuk menjamin keamanan pangan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi, maka dikembangkan inovasi Sanger dalam bentuk Tribakti Pangan Aman yang berupa penyampaian komunikasi informasi dan edukasi pangan aman, pemeriksaan sarana dan prasarana warung kopi dan pengujian makanan pendamping kopi. Pelaksanaan inovasi ini melibatkan 57 Kader yang tersebar di 23 Kab/Kota se Aceh dengan target terlaksananya intervensi pangan aman ke 1.097 Warung Kopi se Aceh dalam kurun waktu satu bulan dan inovasi ini berhasil mendapatkan rekor MURI.

b. *E-Learning* KORPORASI (Kolaborasi Fasilitasi UMK dalam Sertifikasi Izin Edar Obat Tradisional Kosmetika Pangan Olahan)

Pemberian layanan terkait fasilitasi Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dalam pengurusan sertifikasi dan izin edar produk UMK yang sesuai standar dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Kab/Kota.

4. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari Agent of Change (AoC) bersama dengan Pimpinan yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi.
5. Pimpinan telah terlibat dalam perencanaan kinerja dan melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan menurut saran APIP terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Rencana kerja pembangunan ZI belum seluruhnya dilakukan, hasil pemantauan secara berkala belum dilengkapi dengan kendala, Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL tersebut.
2. Belum dapat menunjukkan rencana aksi agen perubahan tahun berjalan.
3. Implementasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK belum dituangkan dalam Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) kegiatan/tugas.
4. Penggunaan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pemberian layanan belum dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan secara berkala dan belum dilengkapi dengan tindak lanjut atas kendala yang ditemui.
5. Mutasi pegawai mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi, namun belum terdapat dokumentasi bahwa pelaksanaan mutasi disertai pertimbangan terkait kompetensi jabatan dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan mutasi yang terkait dengan perbaikan kinerja.
6. Telah melakukan pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
7. Telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dan WBS, namun inovasi yang disampaikan tidak terdapat pemisahan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan WBS serta belum terdapat bukti dukung telah dianalisis dampak kemanfaatan sebelum dan setelah implementasi inovasi dalam peningkatan kinerja Unit Kerja.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 106. Efisiensi anggaran pada Indikator Indeks RB BALAI BESAR POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	272.767.000	270.831.948	99.29	106.19	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien, karena capaian indikator lebih

tinggi daripada % realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh dengan melakukan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Rencana Aksi yang sudah dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai target dan meraih WBK antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait budaya kerja dan pola pikir melalui:
 - a. Inovasi KURSI (Kuis Reformasi Birokrasi) yang dilakukan setiap hari senin secara daring setelah Apel Nasional Badan POM.
 - b. Parrkir (Pantun hari krida olahraga), dilakukan setiap hari kamis untuk mengingatkan dan mengajak pegawai untuk berolahraga pada hari Jumat.
2. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik di Balai Besar POM di Banda Aceh (melalui media sosial Balai), melalui inovasi:
 - a. Rasa dari Hati, pengisian data sampel untuk komoditi pangan, kosmetik dan obat oleh Fungsi Pengujian dan Pemeriksaan.
 - b. SPRINT, pembuatan surat tugas melalui aplikasi.
3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui inovasi REPOST (Reward and Punishment) dengan menentukan pegawai teladan dan telatan setiap bulan yang dinilai dari SKP dan Perilaku 360.
4. Melakukan peningkatan nilai kinerja dan anggaran melalui inovasi internal Aplikasi SIGARANG (Sistem Informasi Pagu Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran) yang memuat pagu alokasi, jenis kegiatan, jenis belanja, laporan FA detail, link capaian output, RHPK dan usulan revisi anggaran.
5. Melakukan pembekalan dan sosialisasi tentang gratifikasi, whistle blowing system, benturan kepentingan dan manajemen resiko terhadap seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh melalui inovasi SIMELAN (Siap Menindaklanjuti Laporan Anda).
6. Implementasi inovasi pemberian informasi dan pelayanan publik kepada

masyarakat baik secara luring dan daring (media sosial Balai) melalui inovasi SANGER dan JANET (Jawab Netizen).

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	<p>a. Papan nama petugas pemberi layanan agar selalu diletakkan pada meja pelayanan. Harus selalu terdapat petugas di pelayanan publik meskipun jam istirahat.</p> <p>b. Agar menampilkan jenis pelayanan, informasi tarif PNBP serta informasi terkait public warning terkini.</p> <p>c. Agar berkoordinasi dengan Inspektorat Utama BPOM untuk mendapatkan standing banner WBS terbaru.</p> <p>d. Menambahkan fitur layanan atau informasi pada komputer yang digunakan penerima layanan untuk mengisi SPKP dan SPAK.</p> <p>e. Menambahkan petunjuk arah untuk toilet yang strategis</p>	Sudah melakukan tindak lanjut terhadap perbaikan yang direkomendasikan Tim TPI Inspektorat II BPOM	-	2023	<p>a. Papan nama petugas pemberi layanan tidak diletakkan pada meja pelayanan.</p> <p>b. Terdapat layar monitor di ruangan pelayanan publik sebagai media informasi, namun jenis pelayanan, informasi tarif PNBP dan informasi terkait public warning belum ditayangkan.</p> <p>c. Standing banner WBS yang ada di ruang pelayanan publik belum menggunakan informasi media yang terbaru.</p> <p>d. Komputer untuk penerima layanan mengisi SPKP dan SPAK agar ditambahkan kebermanfaatannya dengan menambahkan fitur layanan lainnya.</p> <p>e. Petunjuk arah untuk toilet belum tersedia.</p>	Sudah dilakukan perbaikan untuk semua rekomendasi

2.	a. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan	Sudah melakukan kegiatan rapat monev RB			a. Belum dilakukannya rapat monev RB TW IV	Sudah dilakukan rapat monev RB TW IV pada Bulan Februari 2024
----	------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	--	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------


i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh meningkatkan kinerja di bidang reformasi birokrasi dengan memanfaatkan inovasi-inovasi di setiap kelompok kerja. Sehingga pada tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh mampu meraih predikat WBK. Untuk mempertahankan predikat WBK di tahun berikutnya, Balai Besar POM di Banda Aceh akan senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam laporan kinerja periodik.

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 107. Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	78.90	79.48	100.74 	Sangat Baik

Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu sebesar 79,48 dari target 78,90 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,74% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Table 108. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), dengan nilai 79.48.

Table 109. Bobot Penilaian SAKIP

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24

Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

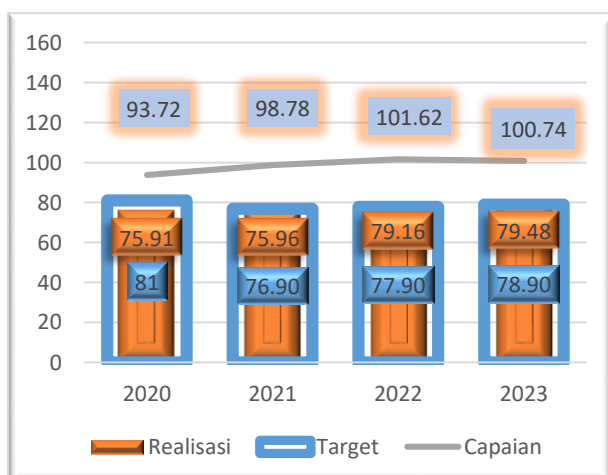
Table 110. Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Tahun 2023	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48
4.	Evaluasi Internal	20	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	15,04
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79.48
	Tingkat Akuntabilitas		BB

Table 111. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2022

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2015	68.18	Baik (B)
2016	69.13	Baik (B)
2017	70.72	Sangat Baik (BB)
2018	75.39	Sangat Baik (BB)
2019	75,91	Sangat Baik (BB)
2020	75,91	Sangat Baik (BB)
2021	79,16	Sangat Baik (BB)
2022	79,48	Sangat Baik (BB)

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya





Gambar 55 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan pada Nilai AKIP tahun 2023 sebesar 0,32 point dari tahun 2022, 3,52 point dari tahun 2021 dan

3.57 point dari tahun 2020. Pada tahun 2023, realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 78,90 dan berhasil meraih Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal ini diperoleh dengan upaya-upaya terus menindaklanjuti rekoendasi dari APIP dengan tepat waktu.

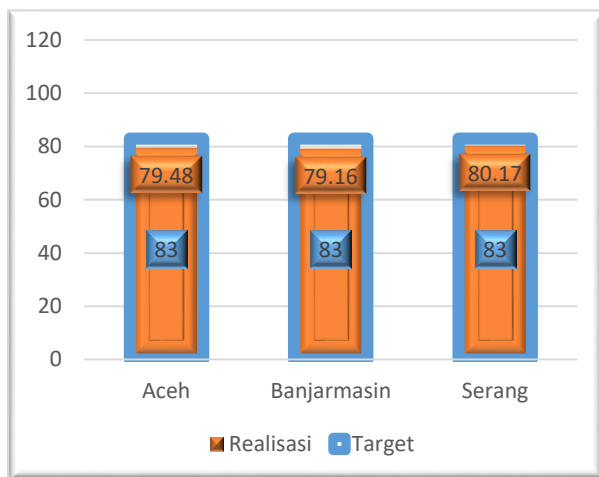
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Table 112. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	79.90	79.48	99.47 	Akan Tercapai
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	82.4	79.48	96.45 	Akan Tercapai

Nilai AKIP tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Pada tahun 2024 dilakukan review target oleh Unit Pengampu untuk nilai AKIP tahun 2024 menjadi 82.4, sehingga diperlukan perbaikan dan komitmen untuk meningkatkan nilai AKIP serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP secara tepat waktu.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal
 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat kedua jika dibandingkan 2 Balai setara/sejenis.



Gambar 56 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain

Yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Serang dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banjarmasin. Ketiga Balai setara/sejenis masih di bawah target nasional (83).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh telah berhasil meraih nilai AKIP menjadi 79,48 (BB). Peningkatan nilai AKIP antara lain disebabkan karena meningkatnya hasil penilaian pada komponen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal dibandingkan nilai AKIP tahun 2022. Namun diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar nilai seluruh komponen indikator kinerja dapat meningkat sehingga nilai AKIP dapat meningkat di masa yang akan datang. Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menindaklanjuti semua rekomendasi APIP di tahun 2022 dengan tepat waktu. Perencanaan kinerja telah dilakukan penyusunan ulang terhadap analisis SWOT dengan mempertimbangkan isu-isu terkini yang berdampak terhadap organisasi, melakukan penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama serta melampirkan kertas kerja, serta penyesuaian rencana kerja individu pada SKP pegawai. Pengukuran kinerja telah dimanfaatkan untuk memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan capaian kinerja pada laporan kinerja tahunan, interim dan laporan evaluasi internal dengan membuat link RAPK Internal. Pelaporan kinerja telah dijadikan dasar untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dan/atau hambatan yang dihadapi serta rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kinerja sudah dilakukan. Hasil Evaluasi Internal telah dilakukan pengisian capaian kinerja pada Aplikasi Simetris dan rencana aksi tindak lanjut sesuai periode pelaporan yang sudah

ditetapkan.

Seluruh komponen indikator kinerja perlu ditingkatkan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023. Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit sakip tahun 2023 antara lain: Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja; Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan penyajian informasi pada dokumen perencanaan kinerja; Menyusun indikator pada Perjanjian Kinerja yang belum diturunkan sampai ke level individu/anggota tim pada MPH unit kerja; Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan; Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan; Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja; Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis; Menyajikan informasi pada laporan kinerja dalam hal terdapat adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan; Memastikan pengisian capaian kinerja, hambatan, rencana tindak lanjut atas realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS secara tertib; Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan Analisis permasalahan/kendala, Rekomendasi/rencana aksi, dan Data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi; Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 113. Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP
Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	116.583.000	116.367.796	99.82	100.74	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada %

realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh dengan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain melaukagn rapat koordinasi antar bidang di Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan serta kegiatan pertemuan penyusunan laporan kinerja; Membuat link RAPK internal untuk memastikan keselarasan capaian kinerja antara RHPK dengan laporan kinerja tahunan, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal tahun berjalan; Memanfaatkan Aplikasi SIGARANG (Sistem Informasi Pagu Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran), merupakan aplikasi internal yang dibangun untuk mempermudah penyajian data capaian realisasi anggaran; Melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Inspektorat Utama pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP tahun 2022; Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja; Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan realisasi target kinerja secara berkala.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 114. Matriks dan tindak lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan monitoring dan evaluasi internal triwulan	Melaksanakan rapat triwulan terkait evaluasi internal	-	-	Belum terpantaunya monitoring capaian kerja, justifikasi, dan	Capaian kerja, justifikasi, dan tindak lanjut capaian kinerja per triwulan

					tindak lanjut capaian kinerja per triwulan	dapat dipantau
2	Membuat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.	Telah dilakukan pembuatan dan penyempurnaan pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja.	-	-	Pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja masih belum memuat mekanisme yang jelas.	Pengumpulan data kinerja telah memuat mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
3	Membuat Keselarasan data capaian kinerja antara RHPK dengan laporan kinerja tahunan, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal tahun 2022.	Telah dibuatkan link RAPK internal.	-	-	Hasil pengukuran data kinerja yang disajikan pada RHPK belum selaras dengan laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal tahun 2022.	Link RAPK internal dapat memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan capaian kinerja pada laporan kinerja tahunan, interim dan laporan evaluasi internal.
4	Meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan LAKIN Tahun 2023.	Mengundang Tim SAKIP dari Balai Besar POM di Banda A untuk pendampingan dalam penyusunan pelaporan kinerja.	-	-	Nilai perencanaan kinerja masih rendah.	Terjadi peningkatan nilai AKIP pada perencanaan kinerja.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan data yang diperoleh (sesuai dengan RAPK) terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja yang tidak mencapai target, dan akan dilakukan upaya untuk meningkatkan target tersebut pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan

nilai AKIP pada tahun 2024 akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan tindak lanjut pada komponen-komponen nilai SAKIP.

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 9 dicapai dengan **NPS 108,59** dengan kategori **sangat baik**. Dimensi kinerja telah memperoleh poin maksimal (25) didukung dengan nilai SKP kriteria baik diseluruh pegawai. Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi Repost “Reward dan Punishment”.

Indikator Kinerja

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 115. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	83.00	90.13	108.59	Sangat Baik

Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25 %; kompetensi memiliki bobot 40 %; kinerja memiliki bobot 30 %; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

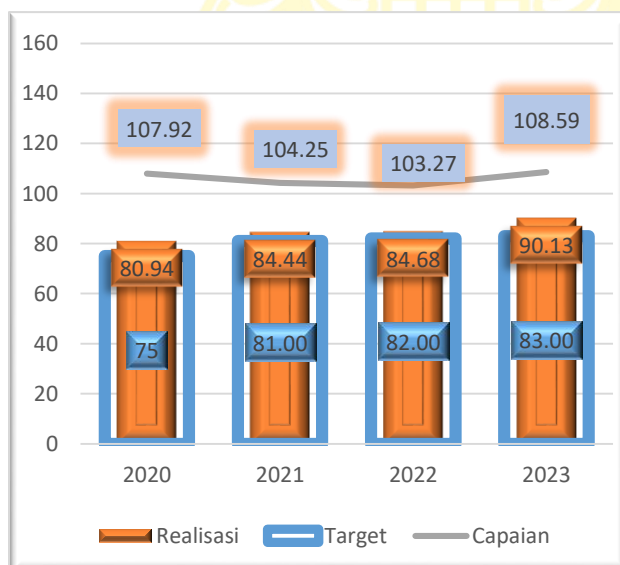
Indeks Profesional ASN adalah Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesional ASN diukur dengan menggunakan 4 (dimensi), yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BALAI BESAR POM di Banda Aceh sesuai aplikasi SIASN sebesar 90,13. Capaian indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh sudah berhasil mencapai target yaitu 108,59% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 57 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan signifikan realisasi pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 dibandingkan tahun 2020, 2021 dan 2022. Hasil ini diharapkan akan meningkat lagi di tahun 2024 dikarenakan ada pegawai

yang menyelesaikan pendidikan dan mengikuti diklat jabatan di tahun 2024.

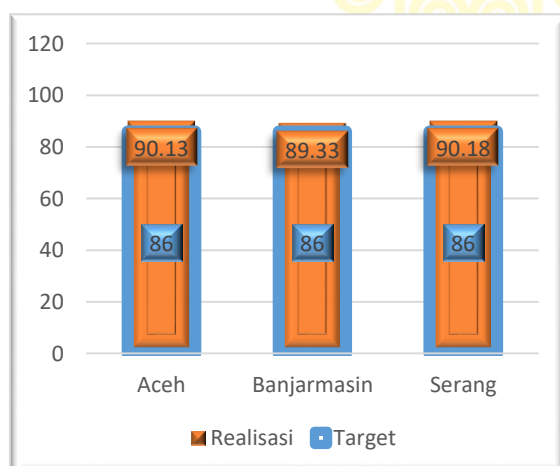
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra 2024

Table 116. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 dengan target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	84.00	90.13	108.59 ▲	Tercapai/ Melampaui
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	90.52	90.13	99.56 ▲	Akan Tercapai

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dan diprediksi akan meningkat sampai tahun 2024. Mengingat adanya pegawai yang melanjutkan pendidikan dan adanya pengembangan kompetensi setiap tahun yang harus diikuti oleh pegawai. Jika dilihat dari tren realisasi indeks profesionalitas ASN setiap tahun dari 2020-2022, indeks IP ASN mengalami peningkatan sehingga dilakukan review target oleh unit pengampu tahun 2024 menjadi 91.52. Penetapan target 2024 berdasarkan tren realisasi setiap tahun dari 2020-2022 yang mengalami peningkatan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan target nasional



Gambar 58 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat kedua dibandingkan tiga Balai sejenis/setara. Balai Besar POM di Serang berada di peringkat tertinggi dan Balai Besar POM di Banjarmasin

yang paling rendah namun semua Balai sudah mencapai target nasional (86).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan pendidikan lanjutan dari beberapa pegawai yaitu jumlah pegawai dengan 70.23% berpendidikan S1 dan 13.09 % berpendidikan S2. Pada tahun 2023, ada beberapa pegawai yang masih dalam proses melanjutkan pendidikan.

Dimensi kompetensi telah meningkat melalui pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal dan non klasikal yang diikuti oleh seluruh pegawai. Namun, karena terjadi perubahan kriteria penilaian kompetensi, maka poin yang didapatkan tidak maksimal. Terdapat 2 pegawai yang belum melaksanakan diklat fungsional, dan diharapkan akan mengikuti diklat tahun 2024.

Dimensi kinerja telah memperoleh poin maksimal (25) didukung dengan nilai SKP kriteria baik diseluruh pegawai.

Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal (data menyusul) karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi Repost "Reward dan Punishment". Inovasi ini dilakukan setiap triwulan (pemberian sertifikat kepada 3 orang pegawai dengan jumlah kinerja terbaik) untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pegawai yang mendapatkan punishment yaitu pegawai yang kedisiplinan rendah, diberikan punishment. Hal tersebut dilakukan dalam pemenuhan kedisiplinan pegawai agar lebih baik.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks profesionalitas ASN dilakukan pemantauan terhadap nilai yang dicapai atas 4 dimensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga berpengaruh untuk memaksimalkan IP ASN Balai Besar POM di Banda Aceh. Telah dilakukan upaya meningkatkan nilai indeks dengan menghimbau pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis yang tersedia di aplikasi IDEAS BPOM sehingga capaian Target Jam Pelajaran ASN di atas 100%. Pada tahun ini akan terjadi kenaikan, karena adanya kenaikan penilaian kinerja untuk SKP 2023, Dengan penilaian TW IV sementara 1 orang Pegawai mendapat nilai sangat baik yang

nantinya akan berpengaruh pada indeks kinerja tahun 2023.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 117. Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP
Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	155.624.000	150.222.994	96.53	103.27	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien, karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan melakukan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dengan adanya target 20 JP dalam waktu satu tahun, maka setiap pegawai berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti sosialisasi/seminar/workshop/diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh PPSDM dan juga mengikuti pelatihan secara mandiri (peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara internal dan eksternal). Dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi peningkatan kompetensi pegawai akan terus dilakukan. Untuk meningkatkan kompetensi mansoskul, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menugaskan ASN untuk mengikuti Pelatihan Manajemen dan SDM dengan penyedia dari Swasta Profesional.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 118. Matriks dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	Mengusulkan pegawai yang telah diangkat Jabatan Fungsional untuk mengikuti Diklat sesuai jabatan	2024	Kompetensi pegawai stagnan dan tidak ada perkembangan	Kompetensi pegawai meningkat dan diharapkan produktifitas pegawai pun akan meningkatkan
2.	Untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal S1	-	Meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui Tugas Belajar bagi pegawai	2024	Masih terdapat 15% pegawai yang masih dalam proses pendidikan untuk naik ke S-1	Jumlah pegawai yang pendidikannya di bawah S1 akan berkurang dan akan meningkatkan nilai IP ASN

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Lakin Interim tahun 2023, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian jam pelajaran secara berkala serta ada beberapa pegawai yang sudah mengikuti diklat jabatan, sehingga target indeks profesionalitas ASN dapat tercapai. Pada triwulan IV terdapat perubahan dimensi penilaian yang disesuaikan dengan jenjang jabatan.

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan 10 dicapai dengan NPS 110,83% (Kategori Sangat Baik). Sasaran Kegiatan 10 tercapai karena didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal. Kontribusi tercapainya Sasaran 10 dapat dilihat dari realisasi

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang melebihi target tahun 2023 yang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Indikator Kinerja

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 119. Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.0	85.4	101.67	Sangat Baik

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

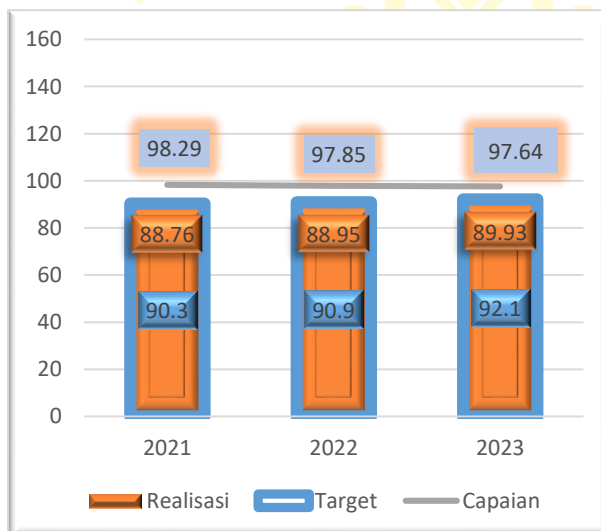
Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM. Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

Table 120. Tabel Parameter Penilaian GLP

Parameter GLP	Target 2023 (%)
Standar Ruang Lingkup GLP	> 65
Standar Kompetensi personel laboratorium	>75
Standar Alat Laboratorium	>70

Pada tiap triwulan dilakukan monev pemenuhan GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), pada Triwulan IV telah dilakukan penilaian secara kumulatif terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium dan Balai Besar POM di Banda Aceh mendapat nilai Presentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 88,3%, pemenuhan Standar Kompetensi personel laboratorium sebesar 93,4% dan Standar Alat Laboratorium sebesar 74,4%, sehingga total pemenuhan GLP sampai dengan triwulan IV sebesar 85,4%. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 sudah berhasil mencapai target yaitu 101,67% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2023 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Gambar 59. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2023 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 sebagai

hasil dari upaya Balai Besar POM di Banda Aceh dengan melakukan monev

rutin terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium; melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan sebanyak 44 verifikasi metode analisis, dan penambahan ruang lingkup sebanyak 70 jenis zat aktif pada tahun 2023; pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online; dan pemenuhan Standar Alat laboratorium dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

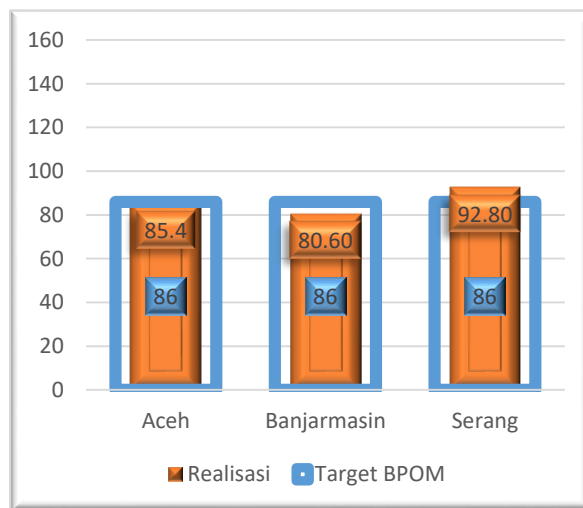
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 121. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	91	85.4	93.85 ▲	Akan Tercapai
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	87	85.4	98.16 ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Akan Tercapai**. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP menjadi 87. Dengan dilakukannya reviu target, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 60. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Serang (92.80%) dan yang terendah adalah Balai Besar

POM di Banjarmasin (80.60%), dari ketiga balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Serang yang mencapai target nasional (86).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Balai Besar POM di Banda Aceh berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan, capaian target tahunan sebesar 85.4 % dari target 84 % tahun 2023. Dalam pelaksanaan terdapat kendala dalam pencapaian nilai SKL tahun 2023 antara lain: Menurunnya nilai komponen Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%) pada TW 3 sebesar 9.9 point (nilai TW II 80.9 menjadi 70.9 pada TW 3) **disebabkan adanya penyesuaian pengujian konsep New Regional. Penyesuaian konsep New Regional di Balai Besar POM Banda Aceh yaitu 1 unit Intrument LCMS-MS di Balai Besar POM di Banda Aceh di transfer ke BALAI BESAR POM Medan, Hal ini menyebabkan ada penyesuaian SKL dan menyebabkan turunnya nilai SKL Balai Besar POM di Banda Aceh.**

PK Vitamin K4 belum bisa dipenuhi sesuai SRL karena belum memiliki baku; PK Albumin pada Obat Tradisional belum bisa dipenuhi karena belum memiliki baku dan guard kolom; Identifikasi Orlistat, Bromheksin , Dapoksetin, Fenitoin, dan Cetirizin belum bisa dipenuhi sesuai SRL karena terkendala belum memiliki baku, dan kolom C8 (Identifikasi Orlistat) dan Dikloremetan (Identifikasi Bromeheksin); - Vit A Asetat

cair sudah dilakukan namun terkendala puncak pada sampel tidak muncul; PK Residu n-Heksan belum bisa dipenuhi karena belum memiliki kompetensi penggunaan GC MS secara HS.

Jumlah sampel yang masuk tidak proposional, tidak sesuai Renlak, ada bulan yang sedikit sampelnya tapi bulan Juli, Agustus, September di atas 95, Kompetensi belum memenuhi untuk uji PK BTP PK Pemanis, PK analit Albumin, dan beberapa BKO. Belum pernah dilakukan pengujian. Pemindehan alat LCMSMS ke Medan juga akan mengurangi jumlah SRL di 2024 Sulit menaikkan RL karena sampel susah ditemukan ada senyawa sudah dilarang beredar tetapi masih ada di RL. Beberapa sediaan yang menjadi target RL TW II sudah jarang ditemui di pasaran: Danazol, Nimesulid tablet, Diclofenac Sodium, misoprostol tablet lepas tunda. Pada awal tahun direncanakan penambahan RL TW III PK akrilamida dalam kopi dan produk olahan kentang, namun parameter tsb beralih ke Balai Besar POM di Medan.

Solusi alternatif yang telah dilakukan untuk menaikkan nilai SKL antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan reagen dan baku pembandingan dan berkoordinasi ke P3OMN; Pengadaan suku cadang berupa kolom C8 dan guard kolom; Melakukan identifikasi terhadap kegagalan PK Vit A asetat cair; Pengajuan anggaran pelatihan.
- b. Koordinasi dengan P3OMN untuk sampling di wilayah Jakarta dan koordinasi dengan Balai Lain untuk sampling dan Koordinasi dengan dinkes Kab / Kota, IFK dan RS Kab/Kota.
- c. Melakukan monev terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- d. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan verifikasi metode, Sampai dengan triwulan IV verifikasi metode analisis yang telah terlaksana adalah sebanyak 44 metode analisis pada tahun 2023.
- e. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN terutama untuk penguji yang belum

memiliki sertifikat untuk kompetensi - kompetensi yang dipersyaratkan. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 122. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.983.464.000	3.980.348.941	99.92	101.67	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sudah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya sudah mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Hal ini disebabkan fokus anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang mendesak diadakan dan diperbaiki, kedepannya akan direncanakan untuk pemeliharaan alat yang lebih baik.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah: Dalam rangka pemenuhan SRL telah dilakukan verifikasi terhadap 44 metode analisis pada tahun 2023. Verifikasi Metoda Analisa dilakukan diawal tahun dalam upaya pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien. Peningkatan SRL obat juga dioptimalkan dengan berkoordinasi dengan PPPOM, RSUD Abbiya dan Apotek Kimia Farma di Banda Aceh. Pelatihan internal bagi personel laboratorium yang dilakukan di Balai sehingga pelatihan dapat diikuti oleh semua personel laboratorium. Pemenuhan alat

laboratorium pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Perencanaan yang baik dan tepat waktu untuk pengadaan reagensia, suku cadang, baku pembanding dan bahan penunjang pengujian. Koordinasi yang baik dan intensif dengan Pusat, antar anggota diregion Medan dan dengan lintas sektor dalam upaya pemenuhan ruang lingkup pengujian untuk sampel yang tidak beredar di Wilayah UPT.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Regionalisasi laboratorium Badan POM sudah dilaksanakan mulai tahun 2022, dengan program ini diharapkan peningkatan efisiensi baik waktu, reagen, maupun efisiensi terhadap alat-alat laboratorium dapat dicapai. Perbedaan pola pengujian terkait regionalisasi tentunya akan berpengaruh terhadap pemenuhan standar GLP, diharapkan P3OMN dapat membuat tools penilaian pemenuhan standar GLP yang disesuaikan dengan kondisi regionalisasi laboratorium.

Perencanaan yang baik terhadap kebutuhan reagensia, suku cadang, dan baku pembanding untuk mengantisipasi kekurangan dan kehabisan reagensia untuk pengujian rutin maupun pengujian regional.

Penggunaan Aplikasi Apresiasi yang lebih intensif untuk mendukung pengujian terhadap kekurangan dan kehabisan stock reagensia, baku pembanding dan suku cadang antar region Medan. Peningkatan koordinasi internal antara lain dengan tim inspeksi agar melakukan sampling obat-obat yang sulit di pasaran pada awal tahun terkait sampel yang harganya mahal atau keterbatasan ketersediaan di pasaran. Meningkatkan kompetensi penguji melalui OJT (On Job training).


i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW III digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik dalam peningkatan standar ruang lingkup agar memudahkan monitoring dan evaluasi sehingga capaian dapat ditingkatkan.

28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 123. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2.5	3	120.00 	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

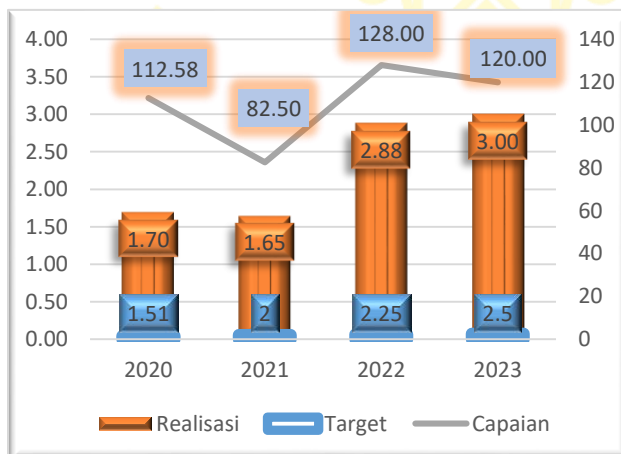
Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 120%, sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya



Gambar 61. Realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun

2020 dan 2021, namun terjadi penurunan realisasi dan capaian di tahun 2023 sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi secara ketat setiap bulan terhadap semua komponen.

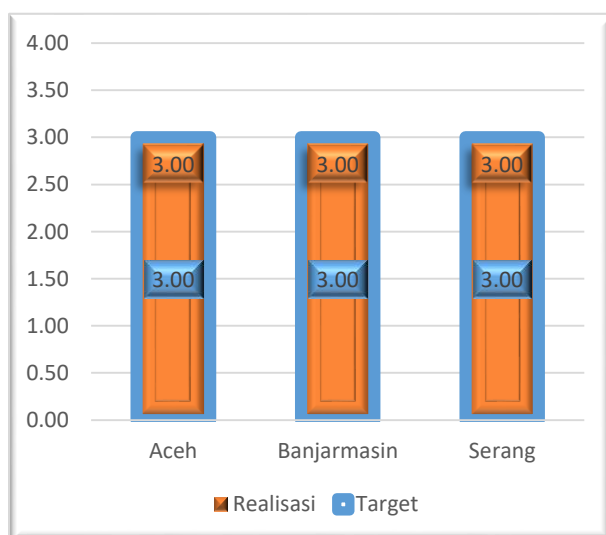
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Table 124. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	3	3.00	120.00 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai target Renstra 2024 sebesar 120.00% dengan kategori tercapai/melampaui. Realisasi nilai 3 (tiga) merupakan nilai maksimal, sehingga tidak perlu dilakukan reuiu untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian



Gambar 62. realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai memiliki realisasi indeks pengelolaan data dan informasi yang sama dan sudah mencapai target nasional (3.00).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator hingga tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SPIMKER	Pemutakhiran SIPT	Pemanfaatan Berita aktual	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Email	Realisasi Indeks
0.6	2.4	3	3	3	3	3

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain: meningkatkan akses email oleh pegawai, dengan cara melakukan monev dalam penarikan data setiap bulan untuk pengecekan aktifasi email setiap pegawai.

- a. Tetap rutin melakukan upload berita aktual oleh petugas balai dengan target yang ditetapkan.

- b. Meningkatkan akses sharing folder dalam waktu 1 bulan.

Nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah karena masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya:

- a. Penginputan data kasus keracunan yang dilakukan tidak tepat waktu.
- b. Verifikasi data kasus keracunan yang diverifikasi tidak maksimal 30 hari kerja.
- c. SIPT tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini di perlukan agar proses kerja sistem tersebut lebih maksimal.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 125. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023 (%)	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	75,000,000	74,620,100	99.49	120	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator senilai 99.49% realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indeks pengelolaan data dan informasi pada Balai Besar POM di Banda Aceh disetiap bidang/sub bidang telah sesuai target. sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi secara berkala. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks salah satunya dengan pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh seperti Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pemeliharaan Peralatan Kantor. Pada

tahun 2023 telah diadakan 8 unit alat pengolah data seperti 1 laptop multimedia, 4 laptop administrasi dan 4 printer. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan target indikator dapat tercapai.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 126. Matriks dan Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi	Komitmen bersama seluruh pegawai terhadap pemanfaatan data dan informasi yang optimal	-	2023	Masih rendahnya nilai pemutakhiran SPIMKER dan SIPT	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim diperoleh informasi bahwa nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah. Oleh karena itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap SIPT agar proses kerja sistem lebih maksimal.

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel


Sasaran Kegiatan 11 dicapai dengan NPS 97,54% (Kategori Baik). Sasaran Kegiatan 11 didukung oleh Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar POM di Banda Aceh. Nilai NKA belum mencapai target pada tahun 2023 dikarenakan kurang efisien dalam pemanfaatan anggaran.

Indikator Kinerja

29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Table 127. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	92.1	89.83	97.54 	Baik

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus: $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Realisasi berasal dari nilai EKA sebesar 85,25 dari aplikasi Smart dan Nilai IKPA 96,71 dengan perhitungan $(85,25 \times 60\%) + (96,71 \times 40\%)$ sehingga diperoleh realisasi nilai kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 adalah 89.83 dengan kategori Baik.

Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 belum mencapai target, dikarenakan adanya Deviasi halaman III DIPA pada bulan Maret sebesar 7,39 dari pengadaan barang dan jasa, nilai Efisiensi pada EKA yang rendah serta penurunan pengelolaan UP dan TUP sebesar 9,4 dan harus dilakukan usaha perbaikan pada tahun berikutnya.

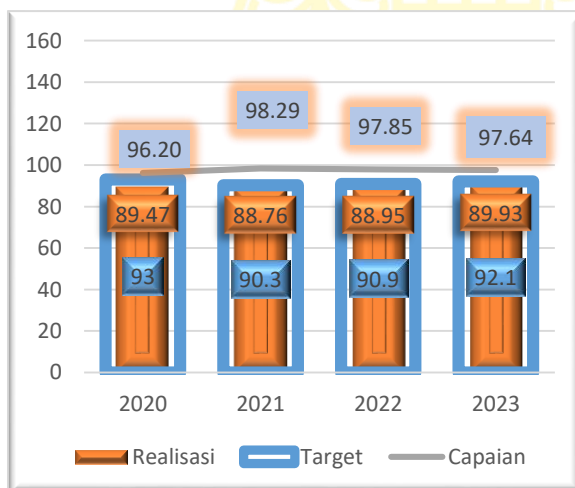
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 63 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan data, diperoleh informasi bahwa terjadi sedikit penurunan pada capaian nilai kinerja anggaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2023

terdapat peningkatan realisasi namun belum mencapai target tahun 2023. Hal ini dikarenakan, penyerapan anggaran tinggi hingga 99.51 %, akibatnya nilai efisiensi sangat kecil sehingga menurunkan nilai kinerja anggaran.

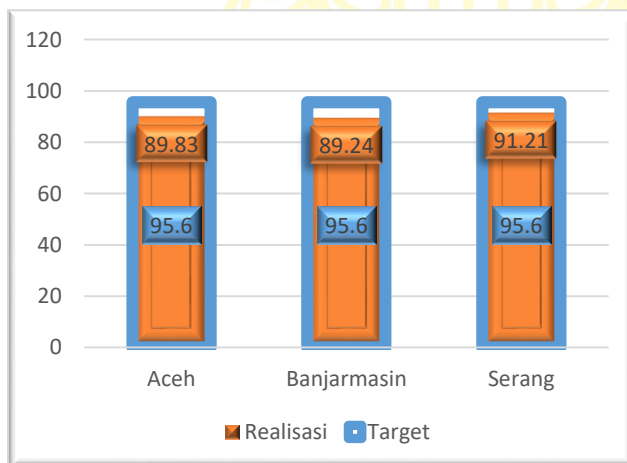
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

Table 128. Realisasi NKA Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Renstra2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	93.3	89.83	97.54 ▲	Akan Tercapai
	Target PK 2024	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
	89.87	89.83	99.95 ▲	Akan Tercapai

Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria akan tercapai. Pada Bulan Desember tahun 2023, dilakukan reviu target nilai kinerja anggaran tahun 2024 oleh unit pengampu menjadi 89.87. Target NKA Balai Besar POM di Banda Aceh mengalami penurunan dari sebelumnya dikarenakan perhitungan target disesuaikan dengan realisasi NKA pada triwulan III tahun 2023.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal



Gambar 64 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 berada pada peringkat kedua dengan peringkat tertinggi adalah Balai Besar POM di Serang. Realisasi ketiga Balai yang diperbandingkan berada di bawah target nasional (95.6).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2023 belum mencapai target, dipengaruhi oleh:

1. Nilai Deviasi Halaman III DIPA

Pada tahun 2023, Deviasi Halaman III DIPA terjadi dibulan Maret (73.85) pada belanja modal. Hal ini di sebabkan pembayaran pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan RPD yang sudah dibuat, sehingga perlu diupayakan realisasi anggaran disesuaikan dengan Rencana penarikan yang sudah disusun.

The screenshot shows a table with the following data:

NO	KODE HPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	001	063	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	73.85	99.59	100.00	100.00	94.04	100.00	100.00	96.71	100%	96.71
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.39	19.92	10.00	10.00	9.40	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.93				98.73			100.00			

2. Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan target penyerapan anggaran pada jenis belanja pegawai, barang dan modal. Penyerapan anggaran di Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 99.59 sehingga perlu dilakukan rencana penarikan anggaran secara proporsional setiap bulan sesuai target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

3. Belanja Kontraktual

Nilai maksimal dengan poin 100 didapatkan jika penyelesaian pembayaran perjanjian/kontrak belanja modal dilakukan pada triwulan I. Tahun 2023 nilai Belanja kontraktual mencapai target, karena penyelesaian pembayaran perjanjian/kontrak belanja modal dibayarkan pada triwulan I sehingga mendapatkan poin 100.

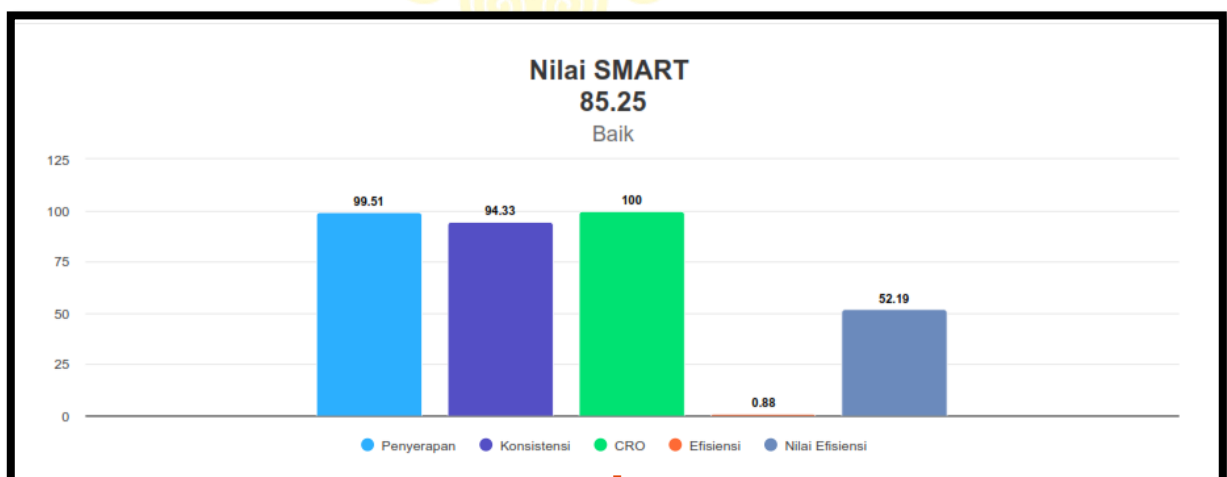
4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

UP/TUP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam

melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari . Kurangnya jumlah UP yang di revolving dibulan Februari serta adanya pengembalian sisa belanja TUP di bulan Desember yang besar mengakibatkan bobot penilaian pengelolaan UP dan TUP kurang sebesar 94.04, dengan adanya penurunan bobot pengelolaan UP makanya BALAI BESAR POM di Banda Aceh mengadakan bimtek terkait strategi peningkatan nilai IKPA, sehingga diupayakan pertanggungjawaban GUP ke KPPN minimal 2 kali dalam 1 bulan.

5. Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah

Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efiseiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20. Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendongkrak nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.



Gambar. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	001	063	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	1.13	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	35.11	90%	39.01
					Bobot	10	10	20	10	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	0.11	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	0.00			
					Nilai Aspek	50.57		75.00			0.00					

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE KPPN	PERIODE	KOMPONEN KETEPATAN WAKTU			KOMPONEN PERSENTASE GUP		KOMPONEN SETORAN TUP			NILAI	DETAIL
					JUMLAH PERTANGGUNGJAWABAN GUP/GU/NIHLU/PTUP	TEPAT WAKTU	NILAI KOMPONEN	JUMLAH GUP	NILAI KOMPONEN	JUMLAH TUP (NOMINAL)	JUMLAH SETORAN (NOMINAL)	NILAI KOMPONEN		
1	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	01	0	0	0	0	0.00	0	0	100.00	100.00	detail
2	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	02	2	2	100	2	84.14	0	0	100.00	96.04	detail
3	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	03	4	4	100	4	91.91	0	0	100.00	97.90	detail
4	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	04	6	6	100	6	94.60	0	0	100.00	98.65	detail
5	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	05	9	9	100	9	95.71	0	0	100.00	98.93	detail
6	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	06	11	11	100	11	96.49	0	0	100.00	99.12	detail
7	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	07	13	13	100	13	97.03	0	0	100.00	99.26	detail
8	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	08	15	15	100	15	97.43	0	0	100.00	99.36	detail
9	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	09	19	19	100	19	97.03	0	0	100.00	99.26	detail
10	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	10	23	23	100	23	97.54	0	0	100.00	99.39	detail
11	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	11	26	26	100	26	97.83	0	0	100.00	99.46	detail
12	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	001	12	29	29	100	27	97.91	700.000.000	152.375.544	78.23	94.04	detail

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 129. Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	16.236.055	16.173.716	99.62	97.54	Tidak Efisiensi

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien, karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Hal ini dikarenakan pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian

yang berlawanan. Dimana jika realisasi anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila realisasi anggaran tinggi nilai efisiensi pada EKA pasti rendah, akibatnya nilai kinerja anggaran/capaian indikator menjadi rendah.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP. Selama tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan 28 kali GUP dan 2 kali TUP serta mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk perjalanan dinas dan pengadaan barang dan Jasa.
- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan
Tahun 2023 pengelola keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh mengikuti bimtek terkait IKPA yang diselenggarakan oleh direktorat perbendaharaan setiap triwulan.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Selama Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan 7 (tujuh) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 27 (dua puluh tujuh) kali revisi POK. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,51 persen.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Table 130. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1.	Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal	Triwulan I s/d IV			Pembayaran dilakukan tidak sesuai RPD	Pembayaran anggaran dilakukan sesuai RPD
2.	Perlu peningkatan kompetensi Tim Pengelola Keuangan	Tim Pengelola Keuangan sudah mengikuti workshop IKPA setiap triwulan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan adanya pendampingan dari KPPN tentang Strategi mengelola UP/TUP			Nilai Deviasi halaman 3 DIPA dan pengelolaan UP/TUP rendah	Nilai IKPA dan EKA meningkat dari tahun 2022
3.	Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu	Sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023			- Terdapat pagu minus - terdapat ketidak sesuaian akun	-Tidak ada pagu minus - Akun sudah sesuai

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Jika dilihat dari capaian tahun 2021-2023, nilai kinerja anggaran selalu di bawah target. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Oleh karena itu, tahun 2024 dilakukan review target untuk nilai NKA yang disesuaikan dari realisasi pada triwulan III tahun 2023 yaitu 89.87.

Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2023 dengan anggaran awal sebesar Rp27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu

rupiah). Pada tanggal 22 Juli 2023 telah dilakukan revisi pemotongan tunjangan kinerja pegawai sehingga total anggaran menjadi Rp 26.015.761.000.- (Dua puluh enam milyar lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), Pada tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan revisi penambahan pagu anggaran pembelian alat laboratorium sehingga pagu menjadi Rp. 27.649.490.000.- (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pada tanggal 17 Oktober 2023 juga dilakukan revisi anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja Pegawai Pemerintah perjanjian Kinerja (P3K) Pagu anggaran akhir tahun 2023 sebesar **Rp. 28.836.827.000,- atau 99.51 persen.**

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	11.368.480.000	11.339.746.765	99.75
Belanja Barang	13.725.175.000	13.614.402.475	99.19
Belanja Modal	3.743.172.000	3.741.845.465	99.96
Jumlah	28.836.827.000	28.695.994.705	99.51

Realisasi PNPB Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	11,999,970
2	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,885,000
3	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	253,710,000
4	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	41,582,951
5	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,638,460
6	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	815,000
GRAND TOTAL									313,631,381

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi

suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk

menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Table 131. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perencanaan Kinerja					
	a. Melakukan analisa SWOT dengan mempertimbangkan isu-isu terkini.	Triwulan III			a. Masih terdapat ketidakselarasan antara isu strategis, analisis SWOT.	a. Sudah dilakukan analisis SWOT pada TW III dengan mempertimbangkan isu-isu terkini.
	b. Menyusun justifikasi dan mendokumentasikan perubahan target berdasarkan basis data yang memadai.	Triwulan I			b. Latar belakang perubahan target belum didukung dokumentasi/justifikasi serta belum berdasarkan basis data yang memadai.	b. Sudah melakukan penyusunan dokumen IKU dengan kertas kerja.
	c. Melakukan penyelerasan rencana kerja individu pada SKP pegawai agar tidak tumpang tindih.	Triwulan I			c. Masih terdapat tumpang tindih rencana kerja pada SKP Kabag TU dengan Subkoordinator PE.	c. Pada dokumen MPH sudah terdapat penyelerasan rencana kerja individu.
2.	Pengukuran Kinerja					
	a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja.	Triwulan I			a. Belum dibuatnya SOP pengumpulan data kinerja dengan timeline secara jelas.	a. SOP pengumpulan data kinerja sudah dilakukan dengan pembuatan jadwal pengumpulan data kinerja secara jelas.
	b. Memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan pada Lakin tahunan, interim dan laporan evaluasi internal.	Triwulan I			b. Masih terdapat perbedaan data capaian kinerja pada laporan kinerja dan evaluasi internal.	b. Membuat link RAPK Internal untuk memastikan validitas data kinerja dengan membuat batas waktu pada pengisian setiap awal bulan.
3.	Pelaporan Kinerja					
	a. Menyusun capaian kinerja atas seluruh indikator kinerja dan mengungkapkan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Triwulan I			a. Ada beberapa indikator kinerja yang belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	a. Sudah dilakukan perbaikan dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2022.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	b. Keselarasan capaian kinerja antara RHPK dengan Lakin tahunan, interim dan laporan evaluasi internal tahun 2022.	Triwulan I			b. Ada beberapa capaian kinerja yang tidak selaras antara RHPK, Lakin tahunan dan laporan evaluasi internal.	b. Membuat link RAPK Internal agar terdapat keselarasan capaian kinerja antara RHPK, Lakin tahunan dan laporan evaluasi internal.
	c. Menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja/hambatan yang dihadapi serta rekomendasi dan tindak lanjut.	Triwulan I			c. Ada beberapa indikator kinerja yang belum menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja/hambatan yang dihadapi serta rekomendasi dan tindak lanjut.	c. Sudah menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja/hambatan yang dihadapi serta rekomendasi dan tindak lanjut pada Lakin tahun 2022.
	d. Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan /penyebab inefisiensi dalam pencapaian kinerja indikator.	Triwulan I			d. Beberapa indikator kinerja belum dijelaskan penyebab inefisiensi capaian kinerja.	d. Upaya efisiensi/ inefisiensi telah dilakukan pada Lakin tahun 2022.
4.	Evaluasi Internal					
	a. Memastikan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut pada aplikasi Simetris secara berkala sesuai periode yang telah ditetapkan.	Triwulan I			a. Belum tertib mengisi realisasi, capaian, hambatan dan rencana tindak lanjut pada aplikasi Simetris sesuai periode pelaporan.	a. Melakukan pengisian capaian kinerja pada aplikasi simetris dan rencana aksi tindak lanjut sesuai periode yang ditetapkan.
	b. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja.	Triwulan II			b. Sebagian besar rekomendasi evaluasi SAKIP dan hasil evaluasi internal periode sebelumnya belum ditindaklanjuti.	c. Sudah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP dan hasil evaluasi internal periode sebelumnya.
5.	Capaian Kinerja					
	a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.	Triwulan I			a. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.	a. Melakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja.	Triwulan I			b. Belum mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja.	b. Sudah menyajikan di dokumen Lakin tahun 2022 optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pencapaian seluruh indikator kinerja.
	c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.	Triwulan I			c. Masih ada indikator kinerja belum mencapai target yang sudah ditetapkan.	c. Melakukan perbaikan pada kinerja dan pembuatan Lakin tahun 2022.
	d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.	Triwulan III			d. Belum membuat kertas kerja realisasi dan capaian terhadap target tahun berjalan.	d. Sudah melakukan penyusunan kertas kerja realisasi dan capaian terhadap target tahun berjalan.

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

3.3.1 Pemanfaatan Informasi Kinerja Periodik

Setiap triwulan dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja Interim. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di triwulan berikutnya. Diantaranya adalah tata kelola anggaran dengan melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal dan Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu.

3.3.2 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahunan

Beberapa Sasaran Kegiatan memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya diperoleh dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan

tools SWOT dan analisa tren dengan pembandingan yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya.

3.4 Realisasi Anggaran

Table 132. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,15	118,52	0,20	Efisien
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	97,34	101,99	0,05	Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,51	104,02	0,05	Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,04	107,42	0,08	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,40	100,56	0,01	Efisien
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,22	100	0,01	Efisien
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	98,79	107,29	0,09	Efisien
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	99,55	103,46	0,04	Efisien
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	98,16	108,59	0,11	Efisien
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	99,70	110,83	0,11	Efisien
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	99,62	97,54	-0,02	Tidak Efisien

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama yaitu, “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 2.686.947.182,- atau 9,32% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah efisien, karena capaian sasaran (118.52%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.15%) yang dikeluarkan.
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedua yaitu, “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 54.740.400,- atau 0,19% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengambilan data dan survey. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah efisien, karena capaian sasaran (101.99%) yang dihasilkan melebihi anggaran (97.34%) yang dikeluarkan.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketiga yaitu, “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 261.403.933,- atau 0,91% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengawasan penandaan dan perilaku OMKA dan Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha, lintas sektor dan pendamping UMK pangan. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien, karena capaian sasaran (104.02%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.51%) yang dikeluarkan.
4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keempat yaitu, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 2.019.415.814,-

atau 7.00% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengaduan, pendampingan UMKM. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien, karena capaian sasaran (107.42%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.04%) yang dikeluarkan.

5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kelima yaitu, “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 1.746.296.625,- atau 6.06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah efisien, karena capaian sasaran (100.56%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.40%) yang dikeluarkan.
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keenam yaitu, “Meningkatnya efektivitas produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 143.417.192,- atau 0.50% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengujian sampel obat dan makanan dan pengamanan makanan bagi tamu negara. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah efisien, karena capaian sasaran (100%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.22%) yang dikeluarkan.
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu, “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar Rp. 689.825.802,- atau 2,39% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan investigasi, penindakan, koordinasi, pemberkasan dan

peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah efisien, karena capaian sasaran (107.29%) yang dihasilkan melebihi anggaran (98.79%) yang dikeluarkan.

8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu, “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal sebesar Rp. 387.199.744,- atau 1,34% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan koordinasi, Bimtek, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah efisien, karena capaian sasaran (103.46%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.55%) yang dikeluarkan.
9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu, “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal sebesar Rp. 478.062.340,- atau 1,66% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan workshop, bimtek dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah efisien, karena capaian sasaran (108.59%) yang dihasilkan melebihi anggaran (98.16%) yang dikeluarkan.
10. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesepuluh yaitu, “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 4.054.969.041,- atau 14,06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan koordinasi, Bimtek, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah efisien, karena capaian sasaran

(110.83%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.70%) yang dikeluarkan.

11. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesebelas yaitu, “Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara akuntabel sebesar Rp. 16.173.716.632,- atau 56,09% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini termasuk yang terbesar karena dipergunakan untuk pembelanjaan gaji dan keperluan perkantoran. Kegiatan-kegiatan tersebut belum berdampak pada terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh. Target indikator belum tercapai karena ada 2 (dua) komponen yang berlawanan, dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Oleh karena itu, tahun 2024 dilakukan review target untuk nilai NKA yang disesuaikan dari realisasi pada triwulan III tahun 2023 yaitu 89.87. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah inefisien, karena capaian sasaran (97.54%) yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran (99.62%) yang dikeluarkan.

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TAHUN 2023
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Kegiatan	112,854,000 14	112,848,717 14	100.00 100.00	100.00	1	0.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Dokumen	174,905,000 231	174,905,000 351	100.00 151.95	151.95	1	0.52	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan Standar oleh BB/BALAI BESAR POM	Input : Dana Output : UMKM	52,594,000 14	52,594,000 14	100.00 100.00	100.00	1	0.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	378,040,000 1	375,332,555 1	99.28 100.00	100.72	1	0.01	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Jenis Layanan	127,867,000 32	127,467,650 51	99.69 159.38	159.87	1	0.60	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	188,000,000 1	187,475,365 1	99.72 100.00	100.28	1	0.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	75,000,000 5	74,620,100 5	99.49 100.00	100.51	1	0.01	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3165.EBA.962	Layanan Umum	Input : Dana Output : Layanan	188,321,000 1	186,866,350 1	99.23 100.00	100.78	1	0.01	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Lembaga	1,969,313,000 1	1,959,208,497 1	99.49 100.00	100.52	1	0.01	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BALAI BESAR POM Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	585,456,000 6	576,977,085 6	98.55 100.00	101.47	1	0.01	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana Output : Lembaga	727,631,000 72	727,348,486 72	99.96 100.00	100.04	1	0.00	Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Lembaga	1,032,284,000 25	1,022,876,356 25	99.09 100.00	100.92	1	0.01	Efisien
			3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana Output : Lembaga	425,232,000 19	424,487,810 19	99.82 100.00	100.18	1	0.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BALAI BESAR POM Banda Aceh	Input : Dana Output : Orang	233,077,000 1,010	230,255,706 2,287	98.79 226.44	229.21	1	1.29	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	450,275,000 448	446,208,700 448	99.10 100.00	100.91	1	0.01	Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	883,779,000 1,310	877,784,345 1,323	99.32 100.99	101.68	1	0.02	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	48,603,000 75	47,761,773 75	98.27 100.00	101.76	1	0.02	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BALAI BESAR POM	Input : Dana Output : Lembaga	84,161,000 72	83,085,350 72	98.72 100.00	101.29	1	0.01	Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BALAI BESAR POM	Input : Dana Output : Lembaga	1,671,060,000 896	1,644,887,872 896	98.43 100.00	101.59	1	0.02	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	3,480,172,000 1	3,479,750,000 1	99.99 100.00	100.01	1	0.00	Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Bulan	15,948,203,000 1	15,888,395,741 1	99.62 100.00	100.38	1	0.00	Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2023 adalah 106,51 dengan kategori Istimewa. Perspektif Internal process memiliki capaian tertinggi 109,30 disusul Perspektif Stakeholder dengan capaian 104,68 dan Perspektif Learning and Growth 105,1.

- a. Pada Perspektif stakeholder, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik.
- b. Pada Perspektif Internal Process, 4 (empat) Sasaran Kegiatan di level ini telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik.
- c. Pada Perspektif Learning and Growth, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik namun Sasaran Kegiatan 11 Nilai Kinerja Anggaran UPT gagal mencapai targetnya di tahun 2023.
- d. Terdapat 20 (dua puluh) IKU berhasil memperoleh kinerja sangat baik, 4 (empat) IKU berkinerja baik, 3 (tiga) IKU berkinerja cukup, dan 2 (dua) IKU berkinerja tidak dapat disimpulkan.
- e. 3 (tiga) Indikator Kinerja berkinerja cukup, yaitu:
 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian 99,26.
 - Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 99,32.
 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dengan capaian 97,54.
- f. 2 (dua) Indikator Kinerja yang Tidak dapat disimpulkan, yaitu:
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian sebesar 172,48.
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik dengan capaian 126,58.
- g. Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2023 telah merealisasikan Rp.

28.695.994.705 atau mencapai 99,51% dari anggaran DIPA Nomor SP DIPA-063.01.2.432790/2021 sebesar **Rp. 28.836.827.000**.

4.2 Saran

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyusun langkah-langkah untuk Indikator Kinerja yang capaiannya belum mencapai target.
3. Mengadakan pelatihan kompetensi kepada pegawai yang mendukung kinerja kegiatan.





LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Banda Aceh
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.62
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	19
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	78.9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.1
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
27,258,618,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banda Aceh, 22 Desember 2022
Pihak Pertama



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.

Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh Predikat terbaik ke-1 **Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester I Tahun 2023** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh Predikat terbaik ke-II **Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester II Tahun 2023** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh



Balai Besar POM di Banda Aceh meraih **Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada Bulan Desember Tahun 2023



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh **Apresiasi atas Inovasi Aplikasi “Klinik POMA”** dari Badan POM bahwa Inovasi Direplikasi di Tingkat Nasional



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh sertifikat “Si Paling Orkestrasi Tahun 2023” dari Badan POM dengan kategori Balai Besar POM



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh piagam penghargaan dengan Kategori “The Most Engaging Instagram Account” dari Badan POM dalam rangka HUT BPOM Tahun 2024





BADAN POM

**Jl. Mohd Daud Beureuh No. 110, Bandar Baru,
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh